

**PENGARUH MIGRASI
PENDUDUK
TERHADAP
PERKEMBANGAN
KEBUDAYAAN
DAERAH ISTIMEWA
ACEH**



PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA ACEH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1982**

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh tahun 1978/1979.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

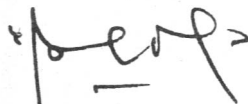
Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Dr. Syamsuddin Mahmud, Drs. Mas'ud D. Hiliry, Drs. Adnan Abdullah, Drs. Zakaria Ahmad dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Dr. P. Wayang, Dra. M.C. Suprapti, Dr. Soedjiran Resosudarmo, Drs. Suwaryo Wongsonegoro, Drs. Diding Kusnadi, Drs. Djanen Msc, Dra. Taryati, Suyanto, Wisnu Subagio.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, September 1982

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapakan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, September 1982

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SUMBER	11
BAB III MIGRASI	25
BAB IV PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN	39
BAB V HUBUNGAN MIGRASI DAN KEBUDAYAAN..	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	106
DAFTAR PERPUSTAKAAN	111
INDEX	119

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Migrasi merupakan salah satu unsur demografis yang ikut mewarnai segi-segi kebudayaan di daerah Aceh. Melalui migran penduduk setempat di Aceh mendapat peluang untuk berkenalan dengan sejumlah unsur kebudayaan baru. Dalam keadaan demikian, mereka biasanya akan mencoba membandingkan unsur-unsur kebudayaan yang mereka miliki dengan apa yang dibawa oleh para migran. Kalau unsur kebudayaan yang berasal dari migran tersebut dipandang lebih bermutu, maka pengaruhnya terlihat cukup kuat dan meluas dikalangan penduduk setempat. Pengaruh itu akan lebih kentara lagi kalau migran yang memiliki unsur kebudayaan yang bermutu itu mendapat peluang untuk ikut memelopori jalan ke arah pembentukan kelompok sosial baru yang membawa pergeseran lebih jauh dalam masyarakat. Lazimnya proses pergeseran yang demikian akan memerlukan tenggang waktu yang lama. Sebagai satu bentuk pergeseran kebudayaan asimilasi memerlukan waktu dua atau tiga generasi (Sauvy, 1974 : p. 462).

Proses pergeseran unsur kebudayaan di Aceh diperkirakan telah berlangsung sejak lama, melampaui batas waktu yang bisa diingat orang pada masa sekarang. *Letak geografisnya* di perairan Selat Sumatera telah dijadikan daerah Aceh begitu terbuka terhadap bermacam-macam unsur kebudayaan luar (Asing). Sejak lama, Selat Sumatera merupakan jalur lalulintas dunia, dan daerah di sekitarnya menjadi tempat pertemuan bermacam bangsa dan kebudayaan. Dari jalur sejarah perkembangannya dapat diketahui, bahwa pada masa kejayaannya kebudayaan Aceh memperlihatkan ciri-ciri yang amat asimilatif. Bahkan, kebudayaan Aceh bisa menjadi besar ketika itu, karena selalu menerima pelbagai ragam unsur kebudayaan di sekelilingnya. Kecuali itu, mereka juga mampu menggeser unsur kebudayaan yang membahayakan, tanpa menimbulkan kejutan dan kejengkelan. Contoh mengenai itu bisa ditemui pada karya tulis sastra lama. Kebanyakan karya tulis tersebut sangat asimilatif dan kosmopolitan, sehingga begitu

sulit untuk bisa ditemui apa yang dianggap sebagai sastra Aceh asli (Ismael Hussein, 1972 : halaman 2 – 3).

Dari segi lain, pengaruh migrasi terhadap unsur-unsur kebudayaan, di daerah Aceh juga bisa dilihat. Adanya migrasi menimbulkan pemusatan penduduk pada tempat-tempat pemukiman tertentu. Ini bisa membuka peluang bagi bermacam kesempatan kerja baru, serta dapat melahirkan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan, dan ini kerap kali menjadi sumber berbagai pergeseran. Pada giliran lebih lanjut, berbagai pergeseran itu bisa memunculkan gay hidup baru, yang dapat memperluas cakrawala pemikirannya. Betapa pun tradisionalnya sesuatu masyarakat, ia pun juga menginginkan corak kehidupan yang lebih baik dan bermakna, sesuai dengan cakrawala pemikiran yang dimilikinya. Semakin luas dan jauh cakrawala pemikirannya, semakin besar hasratnya untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya (Al-fian, 1977; halaman 202).

Bertitik tolak dari kenyataan dan latar belakang pemikiran seperti disebutkan di atas. Lewat study ini menarik untuk di pertanyakan tentang pengaruh apa yang telah ditimbulkan terhadap unsur-unsur kebudayaan di daerah Aceh, akibat adanya kontak sosial antara migran dan penduduk setempat. Analisa dalam usaha untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut, dilandasi oleh suatu asumsi dasar, bahwa *setiap migrasi selalu disertai oleh saling pengaruh antara berbagai unsur kebudayaan para pendukungnya yang bertemu*. Kalau permasalahan itu bisa ditemukan jawabannya, persoalan lain yang tetap pula menarik untuk dipertanyakan, adalah unsur-unsur kebudayaan manakah yang paling sukar berubah atau kena pengaruh kebudayaan lain, dan manakah yang paling mudah berubah atau diganti dengan unsur serupa dari kebudayaan lain.

Dengan kebudayaan bisa dimaknakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya itu. Berdasarkan pengertian ini, kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud. Pertama, sebagai suatu keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, sebagai suatu keseluruhan kegiatan kelakuan berpola manusia dalam masyarakat. Ketiga, sebagai benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1974:

halaman 15 – 19). Dari ketiga wujud kebudayaan itu diketahui adanya keaneka-ragaman unsur kebudayaan, ada yang kongkrit dan abstrak, atau ada yang material dan non-material. Namun, untuk keperluan studi ini unsur kebudayaan itu akan dibatasi kepada apa yang menonjol terlihat pada sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, pengetahuan dan teknologi tradisional, religi dan kepercayaan, kekerabatan dan lingkaran hidup, ceritera dan permainan rakyat, serta bahasa.

B. PROSEDUR PENELITIAN

Sebagian kegiatan studi ini bisa dijabarkan menjadi sejumlah prosedur yang ditempuh dalam menetapkan metode penelitian, dan analisa sample. Prosedur untuk menetapkan metode diperinci lagi menjadi penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan (meliputi observasi, wawancara, dan angket), dan sample daerah penelitian. Masing-masing prosedur itu akan diuraikan berikut ini.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini ada dua, yaitu metode untuk *penelitian kepustakaan* dan *penelitian lapangan*. Penelitian kepustakaan dilaksanakan oleh anggota peneliti, yaitu untuk mengumpulkan bahan dari sumber tertulis, yang ada hubungannya dengan migrasi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kecuali itu, juga dikumpulkan data mengenai macam-macam migrasi yang terdapat di Aceh, serta perkembangan kebudayaannya. Berbagai data yang diperoleh dari sumber kepustakaan ini, menjadi bahan utama untuk penulisan Bab-Bab II, III dan IV, serta merupakan landasan berpikir untuk menganalisa hasil penelitian lapangan.

Penelitian lapangan dilaksanakan oleh suatu team pelaksana pengumpulan data (enumerator), terdiri atas tujuh orang mahasiswa tingkat sarjana dari lingkungan Universitas Syiah Kuala, dibimbing tiga orang "supervisor", terdiri atas tenaga pengajar Universitas Syiah Kuala. Kepada mereka terlebih dahulu diberikan berbagai penjelasan mengenai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Karena ada dua macam kategori responden yang dipilih, maka penelitian ini juga mempergunakan dua macam daftar pertanyaan, masing-masing untuk penduduk setempat (asli), dan penduduk pendatang (migran), yaitu seperti yang tersusun pada Daftar tabel.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir semuanya disusun dalam bentuk yang jawabannya telah disediakan ("forced choice questionnaire"). Hanya beberapa pertanyaan saja yang disusun dalam bentuk "open ended question". Cara seperti ini memang disadari mengandung beberapa kelemahan, di samping juga ada kelebihan-nya. Penelitian semacam ini akan menghasilkan data kuantitatif, yang besar kemungkinan kurang tepat untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna untuk memahami pola kebudayaan dan perubahan sosial. Tetapi karena pemilihan sample berlangsung secara sistimatis, dan pencatatan hasilnya dilakukan secara lebih ekstensif, meliputi jumlah responden sebanyak 300 orang, maka penggunaan metode questionnaire ini masih tetap dapat memberikan manfaat yang cukup berarti. Kecuali itu, data kuantitatif tersebut dilengkapi lagi dengan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat ("key informan") dari kedua daerah penelitian (desa dan kota).

Dalam mempelajari pengaruh migrasi terhadap perubahan kebudayaan daerah, perlu kiranya dipahami ciri-ciri penduduk setempat dan migran (Germani, 1964: p. 160; Thomas, 1938: p. 927).

Untuk keperluan studi ini yang dipandang sebagai *pendatang* adalah *mereka yang tidak tergolong sebagai suku Aceh, dan juga tidak dilahirkan di Aceh*. Yang termasuk ke dalam suku pendatang ini adalah suku-suku Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, dan lain-lain. Sedangkan yang tergolong sebagai penduduk setempat adalah suku-suku Tamiang, Aceh, Aheuk James, Singkil, Simeulu, Gayo, dan yang serumpun dengan itu. Untuk menjadi responden dipilih kepala keluarga atau kepala rumah-tangga, yaitu mereka yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Responden ini bisa laki-laki, bisa juga perempuan, baik yang sudah kawin ataupun belum, janda atau duda. Kalau didasarkan kepada kepala keluarga, jumlah responden yang diambil melebihi 1/10 populasi daerah sample.

Pemilihan kepala rumah-tangga sebagai responden dilandasi oleh dasar pemikiran, bahwa mereka merupakan pencari nafkah

utama, dan mempunyai tanggung jawab terhadap keadaan rumah-tangganya. Selain itu, diketahui alamatnya. Kecuali itu, daftar rumah tangga bisa di dapat dari masing-masing kepala kampung, yaitu yang telah di susun berdasarkan hasil pendaftaran untuk pemilihan umum tahun 1977. Dari daftar ini ditarik sampelnya secara random, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut.

Selain responden tersebut, penelitian ini juga menggunakan pemuka masyarakat setempat, baik formal maupun informal, sebagai "key informan". Wawancara dengan "key informan" diharapkan dapat membantu analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengisian daftar pertanyaan. Data dari "key informan" ini lebih bersifat kuantitatif, terutama berkenaan dengan pola-pola interaksi sosial antara penduduk setempat dan pendatang. Wawancara ini dilaksanakan oleh "supervisor", dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang juga telah disiapkan sebelumnya. "Key informan" yang diwawancarai seluruhnya berjumlah *sepuluh orang*, masing-masing lima orang dari *daerah kota* dan *desa campuran*. Kelima orang "key informan" masing-masing daerah penelitian itu terdiri atas seorang pejabat, dua orang guru yang relatif sudah lama bertugas di daerah penelitian (minimal lima tahun), dan dua orang tokoh masyarakat lainnya.

Pada tahap pertama, penentuan daerah penelitian didasarkan kepada tingkat kabupaten. Maksudnya, di antara sepuluh kabupaten dan kotamadya yang ada di daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dipilih satu kabupaten yang frekwensi terjadinya migrasi adalah tinggi.

Dalam hal ini terpilih Kabupaten Aceh Besar. Karena sampai saat ini (secara tidak resmi) ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah juga ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka untuk *penelitian di kota akan terpilih sebuah kampung di Banda Aceh*. Frekwensi terjadinya migrasi di Banda Aceh boleh dikatakan cukup tinggi, dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Aceh, kecuali mungkin Aceh Besar. Alasan lain mengapa Kabupaten Aceh Besar dipilih sebagai daerah sample penelitian, adalah karena di kabupaten ini dijumpai sebuah desa yang didiami oleh penduduk setempat dan pendatang, yang berdasarkan penelitian-penelitian lalu memperlihatkan ciri-ciri asimilatif yang telah lebih jauh (Adnan Abdullah, 1976; Soeyanto, 1974). Desa yang dimaksudkan adalah *Saree*, yang mewakili daerah pedesaan untuk

penelitian ini. Sedangkan untuk daerah perkotaan dipilih *Kampung Sukaramai*. Pemilihan kampung ini karena didasarkan kepada pertimbangan, bahwa di sana relatif banyak terdapat pendatang yang berasal dari berbagai jenis asal-usul etnis, dibandingkan dengan kampung-kampung lain di Banda Aceh. Sample untuk tiap daerah penelitian ditentukan sebanyak 150 orang responden, terdiri dari atas 75 orang pendatang dan 75 orang penduduk setempat. Ini berarti bahwa jumlah responden seluruhnya adalah sebanyak 300 orang. Prosedur pemilihan ke-300 orang responden tersebut adalah sebagai berikut .

Pada tahap pertama, diadakan pemisahan antara penduduk asli dan pendatang berdasarkan daftar keluarga yang ada pada masing-masing kepala kampung (Saree dan Sukaramai). Jumlah kepala keluarga pendatang di Sukaramai adalah 271 orang dan di Saree 185 orang. Kemudian untuk masing-masing kepala keluarga ini diberi nomor urut, dari 1 - 271 untuk pendatang di Sukaramai, dan dari 1 - 185 untuk pendatang di Saree. Kemudian dicari angka selang (interval) untuk pemilihan sample pertama. Angka selang untuk Sukaramai didapati dengan memakai rumus :

$$1 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Pendatang}}{\text{Jumlah Sample}} = \frac{271}{75} = 3,6.$$

Angka selang ini dibulatkan menjadi 3. Untuk pemilihan sample pertama, ketiga rumah-tangga yang pertama disebutkan di dalam daftar diundi secara random, dan untuk ini kebetulan terpilih nomor 2. Berdasarkan pemilihan ini, maka rumah-tangga nomor 2 yang terdapat di daftar diambil sebagai sample pertama. Sample-sample berikutnya ditetapkan berdasarkan selang tiga, yaitu nomor-nomor 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya sampai dengan nomor 226.

Dengan cara yang sama seperti disebutkan di atas ditetapkan pula rumah-tangga sample untuk penduduk setempat di Saree dan Sukaramai. Jumlah penduduk setempat di Saree, adalah 92 kepala keluarga (lebih kurang 467 orang), dan di Sukaramai 426 kepala keluarga (2.300 orang). Karena konsep pendatang dalam studi ini dibatasi kepada penduduk yang bukan suku Aceh, serta tidak dilahirkan di daerah Aceh, maka kalau ada responden yang terpilih tetapi lahir di Aceh, maka responden tersebut segera diganti dengan yang lain dari urutan nomor berikutnya. Ini dilaku-

kan karena anggota kelompok etnis lain yang lahir di Aceh tidak dipisahkan sejak semula dari daftar penduduk desa sample penelitian.

2. Analisa sample

Hasil penelitian melalui daftar pertanyaan ini dianalisa menurut urutan pertanyaan yang terdapat dalam daftar angket. Untuk keperluan ini telah disediakan tabel yang diperlukan. Tabel tersebut disusun dalam dua bentuk yaitu *tabel marginal* dan *tabel silang*. Pekerjaan pengisian kedua tabel tersebut dilakukan secara manual oleh empat orang mahasiswa. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisa secara mengolah data yang telah ditabulasikan itu satu sama lain, dicari persentasenya, dibandingkan serta dicari saling hubungannya. Dengan cara demikian diharapkan akan ditemukan konsep-konsep dan kesimpulan-kesimpulan yang menjelaskan data.



Peta 1. Pembagian wilayah administrasi Daerah Istimewa Aceh.

BAB II

S U M B E R

Sudah sejak dulu kala manusia selalu berpindah-pindah tempat ke tempat lain. Perpindahan (migrasi) ini dilakukan baik secara perorangan, maupun dalam hubungan keluarga, dan dalam bentuk gerombolan besar.

Sebab utama perpindahan adalah motif ekonomi (Kuroda, 1965: p. 506), walaupun tak jarang pula orang melakukan perpindahan karena alasan lain seperti politik, agama, dan penyakit. Perpindahan penduduk dari desa ke kota misalnya, pada umumnya adalah untuk memperbaiki taraf hidup karena di kota, menurut mereka, terdapat kesempatan kerja yang lebih banyak dan baik. Demikian pula perpindahan penduduk dari satu daerah tertentu ke daerah lainnya, terutama karena daerah asalnya sudah kurang kemungkinan perbaikan taraf hidup. Kekurang-mungkinan ini terutama disebabkan sudah berkurangnya sumber daya alam.

Bila pengetahuan atau ketrampilan untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia tidak ada, maka proses perpindahan penduduk akan semakin cepat. Akan lebih fatal lagi kalau sumber daya alam ini habis karena dipergunakan dalam waktu yang sudah cukup lama. Migrasi dalam rangka seperti ini dapat digolongkan sebagai migrasi yang primitif (Lee, 1966: p. 47). Demikian pula sumber daya manusia yang terlalu banyak dibandingkan dengan ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki serta sumber daya alam yang sudah mendekati kejenuhannya di suatu daerah, akan mencari daerah baru. Jadi faktor sumber daya manusia inipun merupakan salah satu faktor yang mendorong migrasi, terutama pada negara yang masih bersifat agraris (United Nations, 1971 : halaman 12).

Daerah Aceh termasuk salah satu daerah tujuan migrasi penduduk dari daerah lainnya di Indonesia dewasa ini, tentu pula mempunyai daya tarik dan aspek sumber daya alam dan manusia ini. Dalam hal sumber daya alam, daerah Aceh masih mempunyai potensi yang cukup banyak. Sebaliknya dalam hal sumber daya manusia masih berkekurangan. Kedua keadaan di atas barangkali telah menyebabkan para migran memilih daerah Aceh sebagai daerah tujuan mereka.

A. SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah semua unsur dan kondisi pada lingkungan alam yang berguna bagi manusia sekarang ataupun di masa mendatang (United Nations, 1971; halaman 26). Sumber daya alam hanya akan bermanfaat kalau dihubungkan dengan manusia, dan erat sekali kaitannya dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan cenderung bertambah di daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang banyak. Sumber daya alam yang akan diuraikan disini adalah kesuburan tanah, daerah hutan, dan potensi pertambangan.

1. Kesuburan tanah

Sesuai dengan topografinya, yaitu bagian tengah daerah Aceh merupakan dataran-tinggi (rangkaian Bukit Barisan), serta di bagian timur dan barat berupa dataran-rendah, maka keadaan tanahnya pun dapat dibagi menjadi tanah datar, tanah bukit dan tanah gunung. Pada umumnya semua jenis permukaan tanah di Aceh adalah baik. Ini ditandai oleh hampir semua jenis tanaman tropik dapat tumbuh dengan subur (Departemen Perhubungan, 1977: halaman 2). Kadar mineral dalam tanah untuk daerah Aceh sulit diketahui, karena penelitian ke arah ini masih amat langka.

Berbicara tentang kesuburan tanah ini, kita harus menyinggung hubungannya dengan sumber daya alam yang lain, yaitu iklim dan sungai untuk irigasi. Karena hasil pertanian, terutama sekali padi akan bisa dihasilkan dengan baik, kalau terdapat pertimbangan yang baik antara sumber daya alam tersebut (air, iklim, dan tanah). Ini berarti bahwa hasil pertanian bukan hanya dihasilkan oleh tanah saja. Misalnya saja untuk menghasilkan satu pound padi memerlukan air sebanyak 200 - 250 galon (Ehrlich, halaman 12).

Iklim di daerah Aceh adalah iklim tropik dengan angka curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi (Zakaria Ahmat, 1977: halaman 13). Temperatur udara berkisar antara 26° - 30° C, kecuali di dataran-tinggi, terutama di dataran tinggi Takengon, suhunya berkisar antara 15° - 23° C kadang-kadang lebih dingin lagi (12° C).

Angka curah hujan yang relatif tinggi dan keadaan temperatur yang relatif baik merupakan sebagian kondisi yang berpengaruh dalam kegiatan pertanian. Ditambah lagi dengan adanya irigasi (yang sudah ada semenjak dulu), maka semua unsur tersebut mempengaruhi peningkatan produksi pertanian. Sumber air untuk irigasi adalah sungai yang cukup banyak di daerah Aceh.

Dengan adanya kombinasi sumber daya alam seperti diuraikan di atas, menyebabkan daerah Aceh juga menduduki posisi yang menguntungkan dalam segi potensi pertanian, perikanan dan perkebunan. Walaupun ditinjau dari masing-masing kabupaten potensi yang diberikan tidak sama, namun potensi tersebut terdapat di semua kabupaten.

Untuk melihat bagaimana urutan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan di daerah Aceh, menurut kabupaten, berikut ini diberikan gambaran tentang keadaan masing-masing potensi tersebut (Departemen Perhubungan, 1977: halaman 28 - 29).

a. Potensi pertanian

Ditinjau dari sektor pertanian ternyata bahwa yang paling tinggi potensinya adalah Kabupaten Aceh Timur, kemudian menyusul Kabupaten Aceh Utara, dan selanjutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kotamadya Sabang.

b. Potensi perikanan

Dilihat dari segi potensi perikanan (laut dan darat) ternyata bahwa yang sangat menonjol hasil maupun potensi perikanan adalah Kabupaten Aceh Timur, kemudian Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya berturut-turut adalah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Potensi perkebunan

Penilaian mengenai potensi perkebunan yang meliputi perkebunan besar ataupun perkebunan rakyat, nampaknya daerah yang menonjol adalah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Ka-

bupaten Aceh Barat dan selanjutnya secara berurutan adalah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, dan Kotamadya Sabang.

2. Luas persediaan tanah

Luas daerah Aceh adalah 5.539.000 ha (Universitas Syiah Kuala, 1972: halaman 33). Luas tanah yang sudah digarap untuk pertanian termasuk sawah, ladang, perikanan dan perkebunan hanya meliputi 650.244 ha. Sedangkan luas yang sudah dipergunakan untuk perkampungan dan kota baru mencakup 50.000 ha, sebagian besar (4.179.700 ha), masih merupakan hutan belantara yang merupakan potensi untuk pembukaan pertanian dan perkebunan baru. Sebahagian kecil (6,58%) lagi merupakan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian secara langsung, yaitu tanah yang berupa rawa-rawa, sungai dan danau. Sedangkan tanah yang ditumbuhi rumput dan alang-alang adalah 7,80%, masih dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha peternakan. Seandainya saja sepertiga dari luas seluruhnya (1.846.333 ha) dapat digarap untuk perluasan usaha pertanian dan perkebunan, maka di daerah Aceh masih tersisa potensi luas tanah yang tersedia untuk digarap sebanyak 1.196.109 ha (yaitu 1.846.333 - 650.244 ha). Potensi luas tanah yang masih tersedia ini terutama diperoleh dari pembukaan hutan untuk pertanian dan perkebunan.

3. Daerah hutan

Menurut Undang-Undang nomor 5/1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, hutan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Luas hutan, menurut undang-undang tersebut adalah 74,56 persen dari luas seluruh tanah di daerah Aceh. Ditinjau dari luasnya ini, hutan tersebut bukan saja merupakan potensi hasil hutan, tetapi juga merupakan potensi sumber mata pencaharian hidup bagi penduduk. Potensi ini merupakan pula daya penarik bagi penduduk untuk memperbaiki tingkat hidupnya di Aceh. Yang lebih penting lagi adalah sumbangan hutan untuk pembukaan areal pertanian dan perkebunan baru. Pembukaan hutan ini belum mengganggu kesuburan tanah

dan pengairan, selama luas hutan masih 30% dari luas tanah seluruhnya (Djojohadikusumo, 1955: halaman 175).

Luas areal hutan yang meliputi tiga perempat daerah Aceh inipun sudah merupakan suatu petunjuk bahwa sumber daya alam yang potensial ini belum tergarap dengan baik. Sebabnya bermacam-macam, antara lain adalah kurangnya tenaga yang trampil dan ahli, kurangnya modal, dan kecilnya angka kepadatan penduduk (lihat hasil sensus 1971). Dalam jangka waktu lebih kurang lima belas tahun, sejak 1960 sampai 1975 luas areal hutan hanya berkurang sebanyak 0,9 persen (Sunari S. Kanen, 1976: hlm. 4).

4. Potensi pertambangan

Secara alamiah pembentukan berbagai sumber daya alam dalam perut bumi telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hingga saat ini, belum banyak yang diketahui tentang potensi sumber daya alam pertambangan di daerah Aceh, walaupun penelitian sudah banyak dikerjakan sejak sebelum Perang Dunia II oleh orang atau perusahaan Belanda, seperti Zwierzycki, Hoviq Yansen Lindberg, Walvekamp, R.W. van der Marel, Mars mans alg. expl. My, Graother de Longh, Hoogen Road, Diend v/d Mij Bornw, BPM, dan KNPM (Unsyiah, 1972: halaman 212 - 216). Dalam kutipan laporan penelitian tersebut tidak disebut-sebut tentang potensi persediaannya. Sedangkan mengenai lokasi, jenis dan keadaan masing-masing endapan bahan tambang yang ada di Aceh dijelaskan secara lengkap dan terperinci. Yang jelas daerah Aceh memiliki bermacam-macam bahan tambang. Barangkali karena keadaan ini pula yang menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Hindia Belanda dahulu untuk tetap berkeinginan menaklukkan kerajaan Aceh, disamping adanya faktor-faktor politik lain. Untuk membuka areal pertanian dan perkebunan di Aceh Belanda membawa pula penduduk Jawa untuk dipekerjakan sebagai buruh pada perkebunan kelapa sawit di Saunagan – Aceh Barat, dan perkebunan karet di Langsa – Aceh Timur, dan daerah-daerah lainnya seperti Singkil.

Bahan tambang yang sudah digali di Aceh adalah minyak bumi dan pencairan gas alam. Minyak bumi, terutama terdapat di Kabupaten Aceh Timur. Sebenarnya pengusahaan sumber daya alam minyak bumi ini telah pernah dilakukan pada masa Peme-

rintahan Belanda. Tetapi kekacauan yang terjadi, terutama ketika Revolusi Kemerdekaan, penambangan minyak bumi Aceh Timur (Peureulak) terbengkalai hingga sekitar tahun enam puluhan. Baru setelah tahun enam puluhan, usaha penambangan minyak bumi ini dibuka kembali hingga sekarang oleh Pertamina. Usaha ini merupakan daya penarik bagi pencari kerja baik tenaga teknik, maupun tenaga administrasi dan tenaga yang diperlukan oleh perusahaan yang tidak langsung berhubungan dengan usaha penambangan minyak bumi.

Demikian pula dengan pembukaan pabrik pencairan gas alam di Lhok Seumawe — Kabupaten Aceh Utara. Proyek ini dikerjakan sejak tahun 1972, dan telah menampung lebih kurang 10.000 tenaga kerja yang langsung terlibat di dalam proyek ini (Siaran T.V.R.I., tanggal 19 September 1978). Di antara tenaga kerja sebanyak itu tentu terdapat tenaga kerja yang bukan berasal dari daerah Aceh, dan bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Besarnya proyek serta kemungkinan pembukaan industri yang memanfaatkan hasilnya, seperti rencana industri petrokimia, merupakan pula daya tarik bagi penduduk di luar Aceh untuk mencoba mengadu nasibnya di Aceh Utara dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Walaupun usaha penambangan minyak bumi dan pencairan gas alam bersifat padat modal, tapi dapat juga memberikan kesempatan kerja baik secara langsung ataupun tidak langsung. Malahan kadang-kadang usaha yang didirikan dan tidak langsung berhubungan dengan proyek ini, membuka kesempatan kerja yang lebih besar, dibandingkan dengan yang dapat diserap oleh proyek itu sendiri. Usaha yang tidak langsung tersebut misalnya usaha "catering", perbengkelan, lembaga keuangan seperti bank, pelabuhan, dan pengangkutan.

Sementara itu masih terdapat sumber bahan pertambangan yang belum digali di Aceh, yang menurut laporan peneliti-peneliti perusahaan Belanda, terdapat hampir di seluruh Aceh (perhatikan peta potensi alam). Bahan tambang tersebut adalah : batu-bara, besi, timah hitam, seng, tembaga, emas, mangaan, dan lain-lain.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah dan tingkat perkembangan

Menurut sensus penduduk 1920, penduduk Aceh berjumlah 718.433 jiwa, Sepuluh tahun kemudian, yaitu sensus tahun 1930, jumlah penduduk meningkat menjadi 975.945 jiwa. Ini berarti telah berkembang secara eksponensial dengan rata-rata 3,1% setiap tahun. Pada sensus penduduk 1961 dan tahun 1971 penduduk Aceh tercatat masing-masing 1.628.983 jiwa dan 2.008.341 jiwa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk Aceh dalam tahun 1930 – 1961 menurun menjadi 1,7%, dan antara tahun 1961 – 1971 naik lagi menjadi 2,1% per tahun (Lembaga Demografi, 1976: halaman 17).

Wilayah Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan status. Pada tahun 1949 Karesidenan Aceh dalam Propinsi Sumatera Utara dirubah menjadi Propinsi Aceh. Pada tahun 1950 dirubah lagi menjadi Karesidenan Aceh dalam Propinsi Sumatera. Pada tahun 1956 dirubah menjadi Daerah Otonom Aceh, 1957 menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Aceh, tahun 1959 menjadi Daerah Istimewa Aceh, dan terakhir tahun 1965 berstatus sebagai Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Universitas Syiah Kuala, 1972: halaman 27-29). Namun luas wilayah yang tercakup di dalamnya, berdasarkan sensus tahun-tahun 1920, 1930, 1961 dan 1971 adalah sama, sehingga kita tetap bisa memperbandingkan perkembangan penduduk yang terjadi di Aceh (secara demografis) dengan cukup teliti.

Tingginya tingkat perkembangan penduduk di Aceh dalam tahun 1920 an, mungkin juga karena adanya migrasi masuk ke daerah Aceh sementara dalam dasawarsa yang sama, tingkat perkembangan penduduk Indonesia hanya mencapai 2,1% setahun.

Bila tingkat perkembangan penduduk di Aceh dewasa ini adalah sama dengan tingkatnya dalam tahun 1961 - 1971, maka penduduk Aceh pada tahun 1978 ini diperkirakan sebesar 2.315.345 jiwa.

2. Persebaran penduduk, penduduk kota dan pedesaan

Pada sensus penduduk tahun 1971, persebaran penduduk Aceh rata-rata mencapai 37 jiwa per kilometer persegi. Kotamadya

Banda Aceh mempunyai kepadatan tertinggi, yaitu $4.831/\text{km}^2$. Sedang yang terendah adalah Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu $13 \text{ jiwa}/\text{km}^2$. Kita memaklumi bahwa dalam setiap kabupaten itu juga tingkat kepadatannya tidak merata, terutama antara desa dan kota. Kalau kita membandingkannya dengan mempertimbangkan lokasi wilayah dan kita memasukkan Kotamadya Banda Aceh ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka kepadatan Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya $60/\text{km}^2$ hanya meningkat menjadi $77/\text{km}^2$. Ini masih lebih rendah dari Kabupaten Aceh Utara ($99/\text{km}^2$) dan Kabupaten Pidie ($86/\text{km}^2$). Kabupaten-kabupaten yang lain mempunyai tingkat kepadatan yang lebih rendah dari $40/\text{km}^2$.

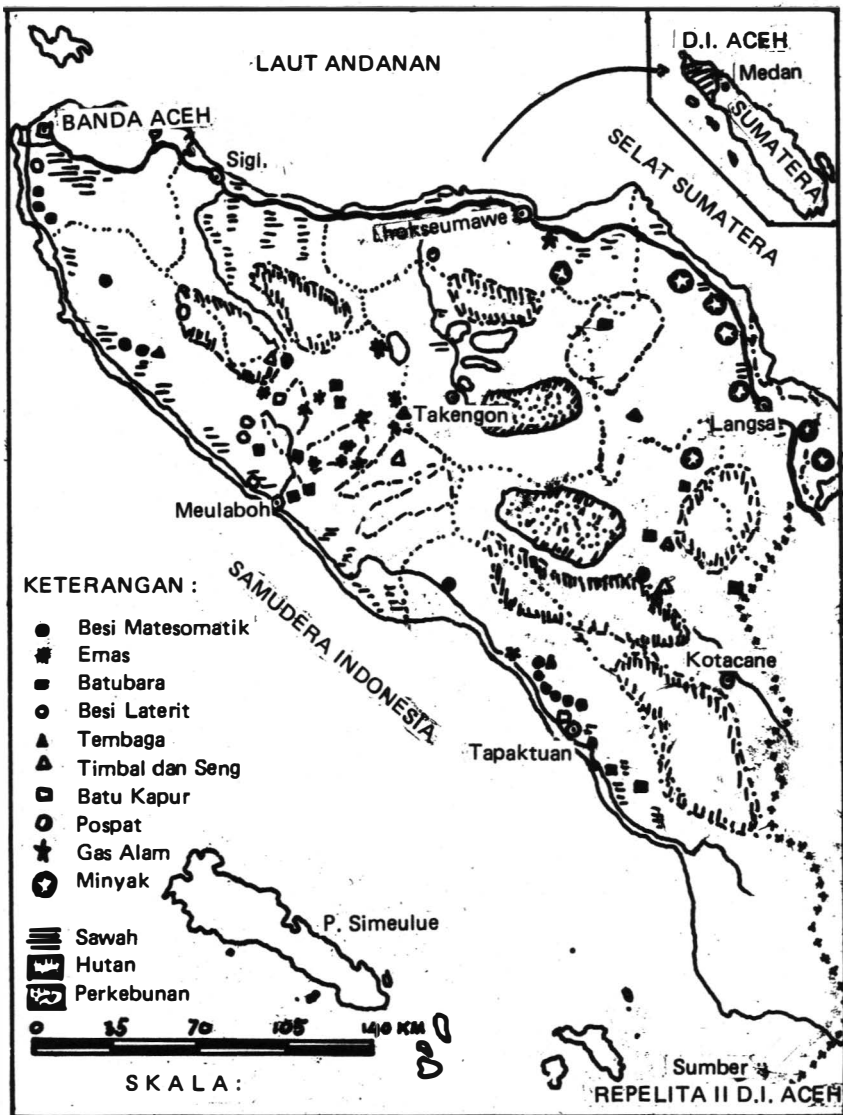
Sampai dengan sensus penduduk tahun 1971, hanya 169.497 jiwa atau 8,4 penduduk Aceh yang bertempat tinggal di kota, sedangkan yang lainnya, sebanyak 1.830.844 jiwa masih tetap tinggal di daerah pedesaan. Tingkat urbanisasi di Aceh 8,4%/tahun adalah cukup rendah bila dibandingkan dengan Sumatera secara keseluruhan (17,1% per tahun ataupun Indonesia 17,4% per tahun) (Castles, dan Moris, 1976: halaman 1).

3. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin

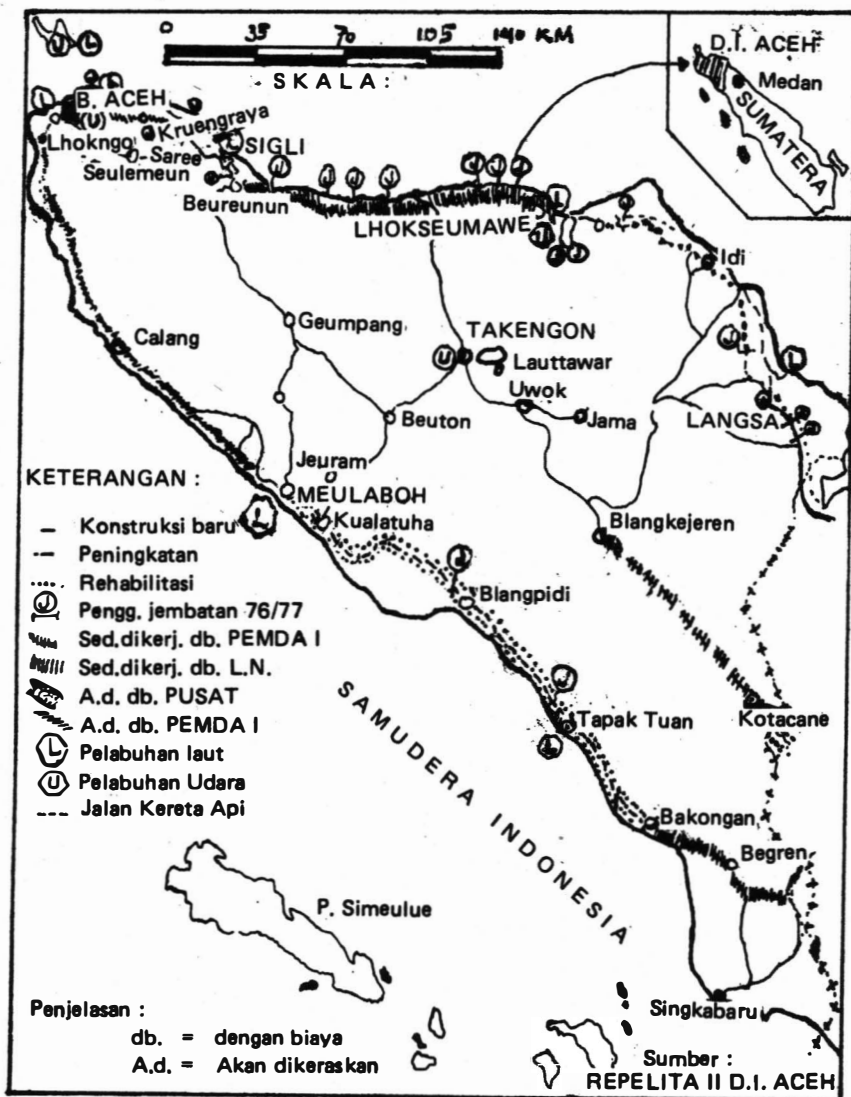
Pada sensus tahun 1971, penduduk Aceh terdiri atas 1.005.209 jiwa pria dan 1.003.123 jiwa wanita. Dengan demikian, angka perbandingan jenis kelaminnya (sex ratio) adalah 1.002, artinya 1.002 pria untuk setiap 1.000 wanita. Angka tersebut untuk daerah kota adalah 1.104.

Gambaran di atas ini mencerminkan adanya urbanisasi yang relatif lebih banyak dilakukan oleh kaum pria, terutama yang berada dalam usia kerja. Angka perbandingan jenis kelamin umur 15 - 64 tahun di kota adalah 1.117, dan di pedesaan adalah 942.

Angka imbangan jenis kelamin umur 9 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas, lebih rendah di kota daripada di pedesaan. Di kota 1.004 untuk umur 0 - 14 tahun dan 773 untuk umur 65 tahun ke atas. Sedangkan di pedesaan 1.060 untuk umur 0 - 14 dan 922 untuk umur 65 tahun ke atas. Rupanya ada kecenderungan pria berusia lanjut untuk tinggal di pedesaan (kembali ke desa). Atau memang tingkat kematian pria lanjut usia lebih tinggi di kota daripada di pedesaan.



Peta 2. Potensi Alam di Aceh



Peta 3. Prasarana di daerah Aceh

4. Struktur umur

Penduduk Aceh seperti juga penduduk Indonesia secara keseluruhan, tergolong penduduk muda. Jumlah penduduk yang berumur di bawah 15 tahun 44,8%. Proporsi penduduk umur 0 - 14 tahun ini lebih tinggi di daerah pedesaan (44,9%) dibandingkan dengan di daerah kota (43,9%). Jumlah penduduk Aceh yang berumur antara 15 - 64 tahun adalah 1.053.675 jiwa, atau 52,5%. Proporsi jumlah penduduk kelompok umur tersebut lebih tinggi di kota daripada di pedesaan. Di kota adalah 53,4%, sedangkan di desa adalah 52,4%. Sedangkan proporsi jumlah penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas adalah 2,7%. Keadaan ini sama untuk daerah pedesaan maupun kota.

Struktur umur seperti di perlihatkan di atas mengakibatkan tingginya ratio tanggungan (dependency ratio). Angka tanggungan ini untuk Aceh secara keseluruhan adalah 91%, yang menunjukkan bahwa setiap seratus orang yang berpotensi mencari nafkah, rata-rata menanggung 91 jiwa di luar dirinya. Untuk Indonesia secara keseluruhan ratio ini adalah 86,9% dan negara-negara maju di bawah 70%. Untuk daerah pedesaan Aceh, angka ratio ini sama besarnya dengan Aceh secara keseluruhan, yaitu 91%. Sedangkan untuk kota adalah 87%.

5. Angka kerja

Jumlah angka kerja di Aceh pada tahun 1971 adalah 644.319 orang, terdiri atas 575.754 orang bekerja dan 68.565 orang sedang mencari pekerjaan dan menganggur. Ini berarti, bahwa pada saat itu tingkat pengangguran di Aceh adalah 10,6%. Dari seluruh jumlah pengangguran ini, 25% di antaranya adalah orang yang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Dan 84% dari mereka yang mencari pekerjaan untuk pertama kali ini berasal dari kelompok umur 10 - 24 tahun.

Angka penyertaan angkatan kerja atau "labor force participation rate" (dihitung sebagai persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur 10 tahun keatas) di Aceh menunjukkan 48,1%. Di kota angka ini adalah 38,5%, sedangkan di desa lebih tinggi yaitu 49%.

Dari seluruh angkatan kerja di Aceh, 6,9% berada di daerah kota, sisanya 93,1% berada di daerah pedesaan. Ternyata proporsi

angkatan kerja yang ada di kota (6,9%) lebih kecil dibandingkan dengan angkatan kerja yang tinggal di desa (8,4%). Dilihat dari rendahnya angka penyertaan angkatan kerja dan proporsinya angkatan kerja di kota serta tingginya "school attendance ratio" di kota, sudah dapat diduga bahwa tingkat pengangguran di kota lebih rendah dari pada di daerah pedesaan. Di kota adalah 6,4% sedangkan di desa 11%. Kita sering mendengar bahwa masalah pengangguran adalah masalah urbanisasi atau masalah yang terdapat di kota. Kesan ini timbul karena seolah-olah lebih banyak yang nampak di kota. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa di antara orang yang mencari pekerjaan di kota lebih banyak mereka yang berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga lebih banyak terlihat.

Di daerah pedesaan, di samping tingkat penganggurannya cukup tinggi, terdapat pula orang yang setengah menganggur dalam jumlah yang cukup besar, dimana lebih dari empat per lima angkatan kerja berkedudukan sebagai pengusaha tanpa buruh dan bekerja keluarga.

Di daerah kota, propinsi terbesar angkatan kerja (30,6%) berada dalam sektor jasa. Untuk sektor yang sama ini di daerah pedesaan hanya 5,8%. Di daerah pedesaan, sebagian besar angkatan kerja (78,5%) berada dalam sektor pertanian, sementara dalam sektor ini di kota masih relatif tinggi, yaitu 22,8%.

Di tinjau dari kabupaten, maka tingkat pengangguran yang tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie (17,3%) dan terendah di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu 2,7% (Castles, dan Moris, 1976: halaman 8 - 10).

BAB III M I G R A S I

A. SEJARAH SINGKAT MIGRASI

Sensus tahun 1971 memperlihatkan bahwa 90.960 orang atau 4,54% penduduk Propinsi Daerah Istimewa Aceh tergolong sebagai pendatang. Kebanyakan mereka yaitu 58.724 orang, merupakan pendatang dari Sumatera Utara. Pendatang dari Pulau Jawa 21.244 orang. Daerah asal pendatang lainnya adalah Sumatera Barat, yaitu 5.907 orang. Sedangkan jumlah pendatang dari berbagai wilayah propinsi lain relatif kecil, masing-masing di bawah seribu orang, kecuali dari luar negeri sebanyak 1.141 orang dan umumnya terdiri dari orang Cina. Hanya pendatang dari Kalimantan Tengah yang tidak dijumpai di wilayah Aceh ketika sensus itu diadakan, walaupun ada, merupakan pindahan dari wilayah propinsi lainnya (Tabel III.1).

Tabel III.1

PENDUDUK YANG PERNAH PINDAH MENURUT PROPINSI TERAKHIR SEBELUM TINGGAL DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Propinsi Terakhir Sebelum Pindah	Tempat Tinggal		T o t a l
	Kota	Desa	
D.I. Aceh	0	0	0
Sumatera Utara	14 830	43 894	58 724
Sumatera Barat	4 052	1 855	5 907
R i a u	381	408	789
J a m b i	48	247	295
Sumatera Selatan	471	392	863
B e n g k u l u	11	402	413
L a m p u n g	26	68	94
K.D.I. Jakarta	1 556	1 639	3 195
Jawa Barat	1 455	1 451	2 906
Jawa Tengah	2 257	7 666	9 923
D.I. Yogyakarta	531	1 381	1 912
Jawa Timur	1 085	2 203	2 288
B a l i	10	0	10

Nusa Tenggara Barat	5	48	53
Nusa Tenggara Timur	11	11	22
Kalimantan Barat	58	99	157
Kalimantan Tengah	0	0	0
Kalimantan Selatan	23	98	121
Kalimantan Timur	41	79	120
Sulawesi Utara	55	10	65
Sulawesi Tengah	236	24	260
Sulawesi Selatan	73	156	229
Sulawesi Tenggara	67	0	67
M a l u k u	67	222	289
Irian Barat	26	91	117
Luar Negeri	842	299	1 141
J u m l a h	28 217	62 743	90 960

Sumber : *Sensus Penduduk 1971 : Penduduk D.I. Aceh Serie E.*
No. 01, BPS Jakarta, hlm.: 132 - 4.

Akan tetapi, kapan saat pertama kali pendatang dari berbagai wilayah itu mulai bermukim di Aceh, amat sulit diketahui secara pasti. Bahkan, dari beberapa tulisan atau hasil penelitian yang pernah diterbitkan diketahui, bahwa penduduk asli yang mendiami wilayah Aceh dewasa ini berasal dari percampuran darah beberapa bangsa lain. Pendapat demikian antara lain dikemukakan oleh Teungku Chik Kuta Karang, bahwa orang Aceh terdiri atas campuran darah Arab, Persi, dan Turki (Said, 1961: halaman 22). Pendapat lain, yaitu dari Dr. Julius Jacobs mengatakan, bahwa orang Aceh merupakan suatu percampuran darah dari berbagai pendatang seperti Melaka, Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, India, Arab, Habsyi, dan Jawa (Said, 1961: halaman 23). Percampuran darah orang Aceh yang berbagai macam itu diperkirakan telah terjadi sejak masa-masa kesultanan, ketika hubungan dagang dengan negeri-negeri luar semakin bertambah luas.

Hubungan antara orang Aceh dengan negeri-negeri luar diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-9 sampai dengan abad ke-15. Berbagai sumber tulisan dari orang Arab, Persi, Cina, dan Eropah menyebutkan *Lamri* merupakan salah satu pusat perdagangan yang penting pada masa itu, meskipun penduduknya

pada tahun 1413 tidak lebih dari seribu keluarga. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, 1607 - 1636, hubungan perdagangan di Aceh semakin bertambah ramai, Banda Aceh Darussalam, ibukota Kesultanan Aceh, merupakan salah satu pusat perdagangan yang terpenting di zaman pra-industri. Sebagai kota pelabuhan dan ibukota kesultanan, Banda Aceh Darussalam amat kosmopolitan, karena berbagai kelompok etnis, seperti Gujarat, Keling, Arab, Jawa, Portugis, Pegu (Birma) dan Tionghoa di dalamnya. Selain itu Banda Aceh Darussalam juga dikunjungi pedagang dari Istambul, Venesia, Aleppo, Hujerat, Arab, Malabar, Coromandel, Bengal, Pagu, Melaka, Siam, Cina, Kalimantan, Jawa, Inggris, Belanda, dan Perancis (Siegel, 1969: halaman 3, Castles dan E. Moris, 1976: halaman 3).

Hubungan baik dengan bangsa luar pada masa itu dibina dengan berbagai cara. Kepada pedagang Jawa yang datang berdagang ke Pasei diberi kebebasan dari pembayaran bea impor-eksport. Dengan Malaka diadakan kerja-sama untuk keperluan pengangkutan di laut. Walaupun Kerajaan Pasei tidak mempunyai armada dagang, namun dengan menggunakan jung-jung Kerajaan Malaka, mereka dapat mengadakan pelayaran sampai ke negeri Cina. Ketika terjadi konflik bersenjata dengan Kerajaan Malaka pada tahun 1537 - 1547 dan 1568. Kerajaan Aceh mendapat tambahan kekuatan dari lebih kurang 400 orang prajurit Turki.

Pada abad ke-16 sampai ke-17 ibukota kerajaan Aceh menjadi pusat studi agama Islam yang didatangi oleh ulama dari berbagai negeri Islam, seperti Syikh Nur-adin dari Mekah, Syaikh Abdul Khair ibn Syeikh ibn Hajar Muhammad Yamani, dan Syeikh Muhammad ibn Hasan ibn Muhammad Hamid ar-Raniry dari Gujerat (Ibrahim Aleian, 1972: halaman 2 - 3).

Arus migrasi ke Aceh semakin lebih menderas ketika kekuasaan pemerintah Hindia Belanda mulai kuat terutama yaitu sejak tahun-tahun pertama abad ke 20. Sejak saat itu terlihat bermacam kegiatan pembangunan yang memerlukan banyak tenaga kerja. Pada tahun 1919 jalan kereta api dari Banda Aceh ke Medan selesai dibangun. Selama tahun-tahun berikutnya mulai pula dibangun jalan raya untuk jurusan yang sama, dan pelabuhan pada beberapa ibukota kabupaten, seperti Ulee Lhue (Aceh Besar), Sigli (Pidie), Lhok Seumawe (Aceh Utara), Kuala Langsa dan

Kuala Simpang (Aceh Timur). Beberapa jenis usaha perkebunan besar mulai pula dikembangkan di wilayah Aceh, seperti pembukaan kebun karet dan kelapa sawit di Aceh Timur dan Aceh Selatan, serta kebun kopi di Aceh Tengah. Selain itu, kehidupan ekonomi di Aceh tidak lagi terbatas kepada hasil pertanian, tetapi juga bertambah dengan hasil tambang, seperti minyak bumi dari Aceh Timur, dan emas dari Aceh Barat.

Bersamaan dengan berbagai kegiatan pembangunan itu terlihat pula kemajuan dalam kegiatan perdagangan. Sejumlah pedagang luar, seperti orang Cina, India, Arab, Minangkabau, dan Batak semakin tertarik untuk menjalankan usahanya di Aceh.

Pada tahun 1907 Gubernur van Daalen, yang memegang tampuk kekuasaan di daerah Aceh ketika itu, memprakarsai pendirian sekolah-sekolah desa. Ini memerlukan pula tenaga-tenaga guru dari wilayah lain (Ibrahim Alfian, n.d. : halaman 22). Sebaliknya, anak-anak kaum bangsawan mulai dikirimkan untuk mendapatkan pendidikan pada lembaga persekolahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda di berbagai wilayah lain, seperti di Bukittinggi Bandung, dan Serang. Semua perkembangan itu menjadikan wilayah Aceh semakin terbuka dan tambah menarik untuk didatangi.

Pada pengujung dasawarsa 1950-an, wilayah Aceh memperoleh status propinsi. Status baru ini memerlukan tambahan bermacam peralatan kelembagaan. Bersama dengan itu dibuka pula kesempatan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan berbagai jenis dan tingkatan sekolah, termasuk pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam.

Pada pertengahan tahun-tahun enam puluhan, Sabang berfungsi sebagai pelabuhan bebas, dan pabrik gula Col Girek mulai berproduksi. Dalam dasawarsa tujuh puluhan ini dibangun pula industri pencairan gas alam di Arun, Aceh Utara. Keterbukaan kesempatan dan pembangunan proyek industri seperti disebutkan ini jelas mengundang banyak pendatang dari wilayah lain.

B. TEMPAT PEMUKIMAN

Jaringan hubungan dengan bangsa atau suku bangsa lain yang begitu luas dan terbuka, kiranya dapat menjadi salah satu

kondisi yang menimbulkan keaneka ragaman latar belakang sosial budaya penduduk yang mendiami wilayah Aceh dewasa ini. Ada di antara para pendatang tersebut yang telah begitu jauh mengasimilasikan diri dengan penduduk asli, sehingga amat sulit untuk mencari ciri-ciri yang membedakannya. Sebaliknya, ada pula pendatang yang tampaknya sangat sulit mengasimilasikan diri dengan penduduk asli, sehingga untuk membedakannya berdasarkan sifat karakteristik relatif mudah. Berdasarkan sifat karakteristik tertentu itu, maka di wilayah Aceh dewasa ini dikenal beberapa kelompok etnis, baik yang tergolong sebagai penduduk asli, maupun yang tergolong sebagai pendatang.

Yang tergolong sebagai jenis penduduk asli adalah orang-orang *Aceh, Gayo, Simeulu, Singkil, Tamiang*, dan *Aneuk Jamee*. Bagian terbesar orang Aceh mendiami daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, sebahagian Aceh Timur, sebahagian Aceh Barat, dan sebahagian Aceh Selatan. Orang Gayo dan Alas, umumnya, masing-masing tinggal di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Orang Simeulu merupakan penduduk asli Pulau Simeulu, dan orang Singkil berdiam di daerah singkil – Aceh Selatan. Orang Tamiang mendiami daerah Tamiang di Aceh Timur. Sedangkan orang Aneuk Jamee, pada mulanya berasal dari Minangkabau, tinggal di Aceh Selatan.

Tabel III.2

SUSUNAN PENDUDUK DAERAH ACEH BERDASARKAN
SUKU BANGSA, TAHUN 1930

Suku Bangsa	Laki-laki	Wanita	Total	%
A c e h	390 279	385 481	775 760	74,49
Simeulu	9 249	8 748	17 997	1,84
Singkil	7 665	7 783	15 448	1,58
Tamiang	5 792	5 678	11 470	1,18
G a y o	25 347	27 072	52 419	5,37
A l a s	6 474	7 147	13 621	1,40
B a t a k	4 131	3 237	7 368	0,75
Minangkabau	4 855	3 677	8 532	0,87
J a w a	34 148	28 088	60 236	6,17

Lain-lain	7 900	5 194	13 094	1,35
J u m l a h	495 840	480 105	975 945	100,00

Sumber : Disusun Berdasarkan angka-angka dari *Volkstelling 1930 Deel IV Inshoemscho Bevolking van Sumatra*, Batavia, 1935 hlm. 162.

Tempat pemukiman pendatang yang bisa diketahui dari sensus tahun 1971 hanya terbatas kepada perbedaan antara desa dan kota (Tabel III.1). Lebih kurang 68,98% pendatang tersebut didaftarkan sebagai penduduk desa, yang umumnya terdiri atas pendatang dari Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Berapa jumlah mereka yang benar-benar berasal dari sana (ethis Batak dan Jawa) amat sulit diketahui secara pasti. Sensus tahun 1930 (Tabel II.2) memang menyebutkan, bahwa jumlah orang Batak di Aceh adalah 7.368, dan orang Jawa sebanyak 60.236. Atau kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk wilayah Aceh seluruhnya ketika itu, maka masing-masing golongan penduduk tersebut memperlihatkan persentase sebesar 0,75 dan 6,17. Dilihat kepada jumlahnya, orang Jawa merupakan golongan kedua yang terbesar di Aceh pada waktu sensus itu dilakukan. Dewasa ini jumlah mereka tentu sudah mengalami perubahan, dan urutan proporsinya besar kemungkinan telah bergeser.

Tempat pemukiman orang Batak di Aceh antara lain adalah Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Singkil, yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Utara. Kelompok ethis ini kerap kali dibedakan pula, baik berdasarkan daerah asalnya maupun asal-usul keturunannya (marga), seperti : Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Suatu penelitian di Tanah Alas, berdasarkan angka tahun 1974, menghasilkan data mengenai jumlah penduduk menurut kelompok ethisnya. Ternyata penduduk asli Alas meliputi 45% (41.086 orang), orang Batak 35% (31.956 orang), dan kelompok ethis lain 20% (18.261 orang) (Ismani, 1975: halaman 2).

Dilihat dari segi mata pencaharian hidup, kebanyakan orang Batak yang bermukim di Aceh bekerja sebagai petani dan usahawan. Dalam kehidupan ekonomi mereka tampaknya lebih rajin,

tahan menderita, dan hemat, sehingga tidak jarang terlihat keberhasilan mereka mencapai status sosial ekonomi yang relatif tinggi, dibandingkan dengan apa yang bisa dicapai penduduk asli. Pada beberapa tempat pemukiman sebagian mereka telah menguasai daerah pertanian yang subur dan strategis, dan juga telah mampu memainkan peranan penting dalam beberapa mata rantai jalur pemasaran barang. Keberhasilan di dalam dua bidang yang baru disebutkan ini, memungkinkan mereka untuk mencapai kemajuan di bidang lain, seperti pendidikan. Perkembangan pendidikan semakin dipercepat, antara lain karena adanya lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh misi Kristen, di tempat pemukiman mereka.

Tempat pemukiman orang Jawa, atau mereka yang datang dari Pulau Jawa, dijumpai hampir pada tiap wilayah tingkat dua, lebih-lebih di Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Utara. Pada beberapa tempat pemukiman mereka bahkan merupakan golongan penduduk mayoritas. Suatu penelitian di Pemukiman Sarse—Aceh Besar, memperlihatkan perbandingan jumlah penduduk antara orang Jawa dan Aceh, yaitu masing-masing 875 dan 439 (Adnan Abdullah, 1976: halaman 18). Kebanyakan mereka, pada mulanya didatangkan sebagai buruh perkebunan di Aceh pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu, tidak mengherankan perkebunan atau di sekitarnya. Kehidupan mereka umumnya masih amat terikat pada tanah pertanian. Jarang ditemui sebagai pedagang atau usahawan yang berhasil. Namun, sikap mereka yang rajin bekerja dan hemat tampaknya cukup memungkinkannya menjadi golongan penduduk yang relatif lebih baik status sosial ekonominya.

Jumlah pendatang yang didaftarkan sebagai penduduk kota pada waktu sensus tahun 1971 adalah 31,02%, dan umumnya terdiri atas pendatang dari Sumatera Barat dan luar negeri. Kebanyakan pendatang dari Sumatera Barat berasal-usul dari kelompok etnis Minangkabau. Di wilayah Aceh, mereka lebih dikenal dengan sebutan orang Padang, dan bagian terbesar bermata pencaharian hidup sebagai pedagang, pengrajin, dan pegawai, sebagian mereka terlihat melibatkan diri dalam kegiatan kemasjidan. Dalam kegiatan keagamaan, kebanyakan mereka lebih cenderung menjadi pengikut Muhammadiyah.

Sebuah penelitian tahun 1974 menunjukkan perbandingan jumlah kepala keluarga penduduk Kotamadya Banda Aceh, berdasarkan etnisnya, yaitu Aceh 6.458, Cina 1.157, Minangkabau 406, suku-suku lain 1.397 kepala keluarga (Syamsuddin, 1974: halaman 5).

Orang Cina merupakan pendatang lainnya yang terdaftar sebagai penduduk kota di wilayah Aceh pada waktu sensus tahun 1971. Bagian terbesar berasal dari suku bangsa Hakka (Khek). Yang lainnya terdiri atas suku bangsa Hokkien dan Kanton. Mereka umumnya dikenal sebagai usahawan atau pedagang. Keberhasilan dalam bidang perdagangan tampak amat menonjol meliputi hampir semua jenis mata rantai jalur perdagangan, peranan mereka amat berarti. Karena itu, tidak mengherankan kalau keadaan kehidupan ekonomi kebanyakan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk asli.

Keempat kelompok etnis yang disebutkan di atas, selain jumlahnya banyak dan sifat pemukimannya sudah lebih menetap, juga relatif lebih banyak yang menimbulkan riak pengaruh pada segi-segi sosial budaya penduduk asli. Pendatang lainnya adalah golongan-golongan penduduk minoritas, dan bagian terbesar merupakan pegawai negeri atau anggota angkatan bersenjata. Interaksi sosial antara penduduk setempat dengan berbagai golongan pendatang lainnya tidak menimbulkan pengaruh yang cukup berarti.

C. JENIS-JENIS MIGRASI

Alasan perpindahan yang berbeda biasanya menimbulkan pula perbedaan pada pola migrasinya. Ada di antara yang datang dengan tujuan untuk menetap, selain ada pula dengan maksud merantau, atau ada lagi yang datang dengan tujuan menunggu kesempatan untuk bisa pindah ke wilayah lain. Ada yang datang secara sukarela (spontan) di samping ada yang dipindahkan melalui program-program pemindahan yang berencana. Kecorak-ragaman pola migrasi ini terutama dijumpai pada pemindahan orang Jawa. Sebagian mereka datang ke Aceh melalui program kolonisasi di masa Pemerintahan Hindia Belanda. Yang lainnya datang di bawah program transmigrasi, transmigrasi pramuka, tenaga AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), atau melalui mutasi kepegawaian.

Pemindahan orang Jawa ke Aceh dalam hubungan dengan program kolonisasi dimulai ketika orang Belanda atau Eropa lainnya membuka perkebunan karet, kelapa sawit, dan damar. Pembukaan perkebunan itu diperkirakan sudah dimulai sejak dasawarsa kedua abad ke-20 ini. Pada mulanya, mereka tinggal di perkebunan, seperti di daerah Kuala Simpang (Aceh Timur), di Bandar Janarata (Aceh Tengah) di Semayam dan Seunagan (Aceh Barat). Di antara mereka, ada yang langsung didatangkan dari Pulau Jawa, dan ada pula yang didatangkan dari perkebunan karet dan tembakau di daerah Sumatera Utara. Mereka merupakan tenaga buruh yang terikat dengan kontrak kerja untuk jangka waktu selama lebih kurang tiga tahun. Namun, kebanyakan mereka terpaksa memperpanjang kontraknya, karena biaya untuk pulang dihabiskan di bandar perjudian.

Pada permulaan tahun 60-an Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mulai memikirkan kemungkinan penempatan transmigran. Untuk itu telah dirumuskan semacam kebijaksanaan yang berintikan kepada tiga persoalan. Pertama, untuk pengisian kekurangan penduduk, diutamakan penempatan transmigrasi lokal dengan memberikan layanan yang sama dengan transmigrasi umum (antar pulau/antar daerah). Kedua, pengurusan dan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan kepada perbaikan tingkat hidup yang layak dan kepada kepentingan pembangunan daerah. Ketiga penempatan transmigrasi antar pulau harus memperhatikan faktor-faktor psikologis, agama, dan adat-istiadat daerah (Aceh, n.d. : halaman 36).

Pada tahun 1962, pemerintah mendatangkan 100 keluarga transmigran untuk ditempatkan di Proyek Transmigrasi Blang Peututek — Kabupaten Pidie, yang telah mulai dipersiapkan sejak tahun 1960. Proyek transmigrasi ini meliputi areal lebih kurang 500 hektar, yang terletak di kanan-kiri jalan raya Banda Aceh Medan, kira-kira 91 kilometer di sebelah tenggara Banda Aceh. Akan tetapi proyek transmigrasi ini tampaknya belum berhasil, kalaulah tidak akan dikatakan gagal sama sekali. Keadaan air yang tidak sehat, dan penyakit malaria, merupakan faktor penyebab utama kegagalan rencana ini. Selain itu, sebahagian besar para transmigrasi di tuduh ikut terlibat dalam kegiatan politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika terjadi peristiwa G-30S/

tahun 1965, mereka pergi meninggalkan Blang Puetek, kecuali satu keluarga yang bertahan.

Sampai dengan tahun 1973, jumlah transmigran yang didatangkan ke Aceh 695 orang (Daldjoeni, 1976 : halaman 6). Pindahan orang Jawa ke Aceh lebih meningkat, terutama sejak daerah ini mulai membangun beberapa proyek yang memerlukan tenaga kerja terlatih. Perpindahan itu ada yang langsung dari pulau Jawa, dan pula migrasi lokal orang Jawa dari Sumatera Utara. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pabrik Gula Cot Girek telah dan akan mendatangkan sejumlah tenaga transmigrasi Pramuka dan tenaga AKAD dari Pulau Jawa. Mereka terikat dengan suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu lima tahun. Selama tahun anggaran 1976/1977, Direktorat Jenderal Transmigrasi telah menetapkan 800 kepala keluarga transmigrasi 300 kepala keluarga (1.417 jiwa) di Cot Girek, dan 500 kepala keluarga (2.253 jiwa) di Bukit Hagu (kanwil Dit. Jen. Transmigrasi, 1977 : halaman 30). Selain itu, dewasa ini juga giat dilakukan survei untuk menentukan lokasi baru untuk proyek transmigrasi, seperti di Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Tengah.

Migrasi spontan terutama dilakukan oleh orang Batak, Minangkabau, dan Cina. Perpindahan orang Batak ke Aceh diperkirakan berlangsung sejak dasawarsa kedua abad ke-20, terutama ke Tanah Alas. Pada mulanya, mereka pindah secara perorangan. Tetapi sejak dua dasawarsa terakhir ini, perpindahan itu berlangsung secara kelompok. Kesuburan tanah dan kekayaan alam merupakan daya tarik utama untuk pindah ke Alas, Singkil, dan Aceh Timur. Mereka meninggalkan kampung halamannya dengan tekad benar-benar untuk memeras keringat. Pada yang muda dipupuk semangat *marjajo*, yaitu penyaluran nafsu merantau, dengan harapan bahwa anggota marganya akan senantiasa membantunya kalau mereka berada dalam kesulitan (Ismani, 1975: halaman 3).

Pola migrasi orang Minangkabau lazim dikenal dengan sebutan merantau. Bagi mereka, merantau merupakan suatu gejala yang sudah melembaga sejak berabad-abad yang lalu (Syamsuddin, 1974: halaman 1). Menurut Dr. A. Maude (1976: halaman 2), perpindahan orang Minangkabau ke Aceh dapat digolongkan sebagai pola merantau tipe kedua, karena wilayah yang dituju

cukup jauh, dan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari negeri Sulit Air. Menurut penelitian Maude, alasan terpenting perantauan mereka adalah untuk mencari perbaikan ekonomi. Alasan lainnya adalah ingin memperoleh pengalaman baru, karena tradisi, persoalan adat, ketidakpuasan dengan kehidupan desa dan ingin mengikuti jejak perantau lainnya. Arus kepergian mereka ke luar daerah, tidak selamanya berlangsung secara serentak. Begitu pula perpindahan mereka ke Aceh. Perpindahan pertama, diduga erat kaitannya dengan pembukaan jaringan jalan kereta api Banda Aceh — Medan, dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan sekuler. Pada waktu itu, mereka datang untuk bekerja pada jawatan kereta api dan guru sekolah rakyat.

Hampir bersamaan dengan pola migrasi orang Minangkabau, perpindahan orang Cina tampaknya juga cenderung untuk memilih daerah kota. Kecenderungan demikian tidak hanya terlihat di Aceh, tetapi juga ditempat-tempat lain.

Ini antara lain dilatar-belakangi oleh tujuan utama untuk memupuk kekayaan. Kebanyakan mereka memilih bidang perdagangan dan industri sebagai sumber mata pencaharian hidup (Zaenal Kling, 1978: halaman 8). Karena kedua bidang sumber mata pencaharian hidup itu lebih terpusat di perkotaan, maka tempat pemukiman mereka juga banyak dijumpai disana. Pendapat demikian diperkuat pula oleh penelitian lain mengenai kembalinya pengusaha Cina di Banda Aceh (Pasifikus Ahok, 1976: halaman 3). Menurut penelitian yang terakhir disebutkan ini, pengusaha Cina tersebut tetap berkecenderungan untuk kembali ke Banda Aceh, walaupun prosedur yang harus mereka lalui cukup berbelit. Alasannya antara lain karena di Aceh mereka telah terbiasa menjalankan usaha dagangnya, dan persaingan dengan anggota etnis setempat relatif kecil.

D. MIGRASI LOKAL

Selain jenis migrasi pendatang yang telah disebutkan itu, di Aceh juga ditemui perpindahan tempat pemukiman di dalam lingkungan wilayah yang relatif sama. Di kalangan penduduk asli, pola perpindahan demikian juga dikenal sebagai merantau, konsep perantauan di kalangan orang Aceh masih dibedakan lagi

berdasarkan tujuan rantau. Perantauan dengan maksud berdagang disebut *jak naniaga* (pergi berniaga) atau *bercarok* (pada orang Gayo), dan kalau untuk bersekolah dikatakan *jak meudagang* (pergi bermagang) atau *menuntut* (mencari ilmu, pada orang Gayo). Sedangkan perantauan dengan tujuan bertani disebut *jak seumuga* (pergi bertanam) atau *murukah* (membuka tanah pertanian, pada orang Gayo). Sebutan lain lagi untuk perantauan adalah *bungka*.

Bagi orang Aceh, perantauan mengandung makna pergi mencari penghidupan ke negeri lain. Perantau berjalan, berlayar, atau mengembara, di sepanjang pesisir sebuah daratan yang dibatasi oleh dua sungai. Pengertian demikian terutama lazim digunakan pada masa lampau, ketika orang Aceh Besar pergi ke daerah pesisir Barat Aceh untuk menanam lada. Ketika itu dikenal adanya rantau barat dan rantau Timur, yang berarti pantai barat dan pantai timur Aceh. Ke dua pantai tersebut, ketika itu boleh dikatakan merupakan daerah asing bagi mereka yang datang dari Aceh Besar. Alamnya masih di liputi semak belukar, dan letaknya jauh terpencil dari pusat pemukiman penduduk setempat. Sebab itu, mereka yang hidup di rantau mengalami bermacam penderitaan, baik karena kesepian maupun karena harus berjuang melawan semak belukar.

Berbagai penderitaan yang dialami mereka yang tinggal di rantau secara amat jelas dilukiskan Teungku Bambi, seorang penulis Hikayat Aceh, dalam karya puitisnya yang berjudul "Hikayat Ranto" (Snouk, 1906: halaman 120 - 1). Menurut hikayat itu, berdasarkan pengamatan penulisnya, tak seorangpun di antara mereka yang pergi menanam lada di pantai barat yang bisa kembali dalam keadaan tidak bercacat sedikit jua pun, baik rokhani maupun jasmani. Banyak kesenangan hidup hilang tanpa kesan, dan demam malaria amat menyita kesehatan mereka. Keadaan moral mereka di rantau amat merosot, karena tidak seorangpun di antaranya yang mampu memboyong anak-isternya. Judi, madat, dan tuak merupakan hiburan utama sebagai pengisi waktu luang. Bila bekal untuk kembali madat dan tuak sudah habis, mereka tidak segan-segan membunuh dan merampok. Pertengkaran di antara sesama perantau kerap kali menimbulkan pertumpahan darah. Kehidupan keagamaan amat diabaikan.

Akan tetapi, dewasa ini gambaran perantauan seperti dilukiskan itu sudah berubah. Perubahan tersebut secara berangsur-angsur terjadi sejak munculnya berbagai jenis pekerjaan ketika kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda mulai kuat tertanam di Aceh. Adanya perubahan tersebut telah menjadikan daerah rantau bukan lagi sebagai tempat yang asing dan sepi untuk dihuni. Yang merantau bukan pula terbatas kepada penduduk desa yang miskin, tetapi telah meluas kepada kaum pedagang dan anak bangsawan. Tujuan perantauan tidak hanya terbatas kepada mencari penghidupan, tetapi pula untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai status ekonomi yang lebih memuaskan. Perubahan pandangan tersebut semakin menonjol, ketika dari kalangan perantau muncul sekelompok pedagang dan cendekiawan. Peranan mereka menonjol, lebih-lebih ketika Indonesia mencapai kemerdekaan.

Perantau orang Aceh, pada dasarnya dapat dipahami dari dua segi latar belakang kehidupan. Pertama, perantauan merupakan tahapan lanjutan dari ketidak akrab hubungan dalam keluarga. Ini sudah dimulai sejak mereka memasuki usia peralihan. Sejak itu, anak laki-laki sudah mulai hidup terpisah dari lingkungan rumah-tangga orang tuanya. Sikap hormat dan sopan santun dalam keluarga dibina dengan membatasi sekecil mungkin hubungan akrab dan sikap ramah-tamah dengan sesama anggota keluarga. Dengan demikian, kaum laki-laki umumnya lebih banyak berada di luar lingkungan rumah-tangga, dan baru kembali ke rumah bila ada sesuatu yang perlu dikerjakan.

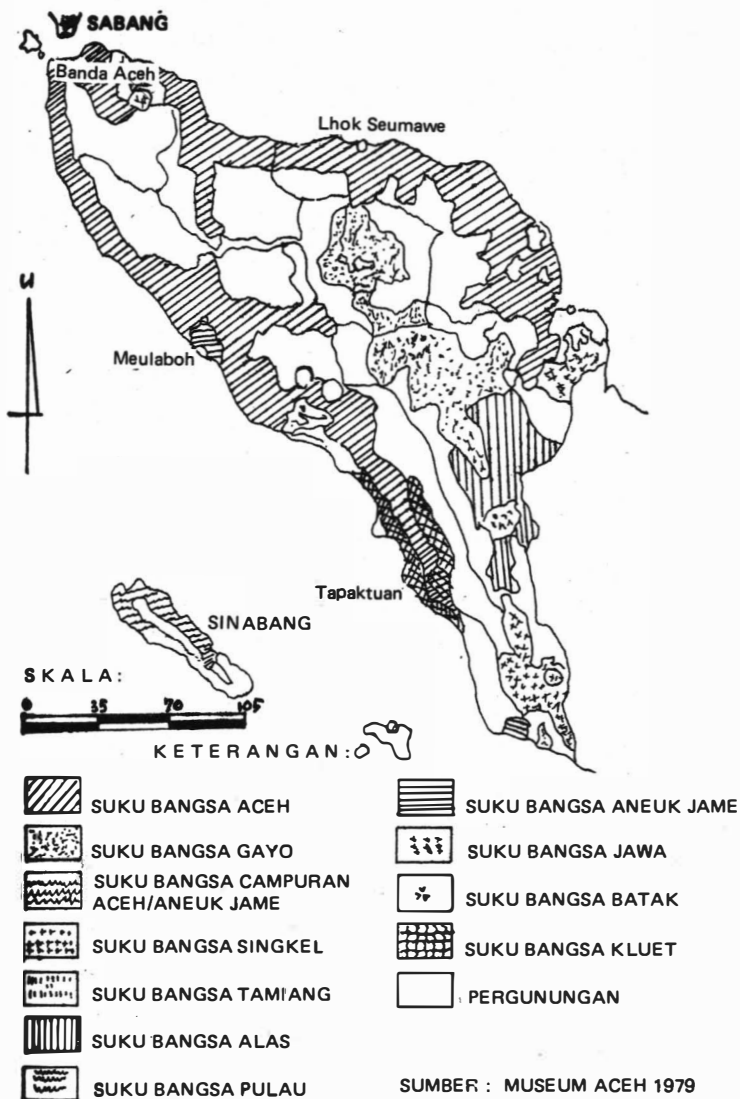
Kedua, perantau merupakan upaya untuk menghindari berbagai ketidak sesuaian diri dengan bermacam tuntutan atau pola pandangan masyarakat di sekelilingnya. Ketidak sesuaian ini antara lain terlihat pada pandangan yang menilai tinggi kehidupan dalam bentuk keluarga besar (*extended family*). Ketidak sesuaian lain terdapat pada pandangan yang tidak memandang terhormat kehidupan sebagai petani, sedangkan kesempatan kerja pada bidang lain sangat terbatas. Ketidak sesuaian lain lagi bersumber pada kewajiban untuk menyantuni sanak keluarga yang kurang mampu. Dengan merantau, berbagai ketidak sesuaian itu bisa diselaraskan, atau paling kurang dapat diperkecil. Di rantau, mereka dapat hidup senang beserta anak istri, tidak lagi dibebani

oleh berbagai pola pandangan dan kewajiban (Adnan Abdullah, *Perantauan, Perubahan Status Sosial Ekonomi, dan Tingkat Fertilitas : Satu Studi di Pidie, Aceh*, Darussalam 1978: halaman 114 - 5).

BAB IV

PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN

A. SUKU BANGSA DAN KEBUDAYAAN



**Peta 4. Daerah kediaman asli suku-suku
Bangsa Daerah Istimewa Aceh.**

1. Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup

Sensus tahun 1971 menyebutkan, bahwa diantara penduduk daerah Aceh yang tergolong sebagai angkatan kerja 74,66 persen merupakan angkatan kerja dalam hidup pertanian, 3,31 persen angkatan kerja dalam bidang perdagangan, restoran dan perhotelan, serta 15,68 persen angkatan kerja dalam bidang-bidang yang lain. Ini berarti, bahwa sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup penduduk di Aceh, umumnya pada bidang pertanian, yaitu dalam kehidupan mereka sebagai petani dan nelayan. Jenis tanaman pertanian penduduk yang terpenting adalah padi.

Tanaman lain adalah karet, kelapa, kopi, cengkeh, pala, pinang, tebu, tembakau, nilam, randu, dan lada.

Jumlah penduduk yang bekerja pada bidang-bidang mata pencaharian hidup tertentu, berdasarkan asal usul etnisnya, sukar diputuskan. Secara sepintas, pada bagian yang lalu memang pernah dikemukakan mengenai keadaan status sosial ekonomi kelompok etnis yang bermukim di Aceh dewasa ini.

Sistem penanaman padi di Aceh pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua corak, yaitu penanaman padi di tanah yang tidak di airi (*umong*). Sistem penanaman padi yang terakhir disebutkan, dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu sawah/tadah hujan (*unong ujeuen/raleue*), dan sawah yang diairi (*umong ie peuneuk*). Sawah, yang diairi umumnya terdapat di Pidie, dan Aceh Utara. Sejak dahulu kala usaha persawahan di kedua kabupaten itu telah menggunakan sistem irigasi yang berfungsi baik. Dengan sistem irigasi, air dialirkan melalui saluran-saluran kecil (*lueng*) ke sawah-sawah yang diairi.

Adanya perbedaan dalam sistem penanaman padi, memperlihatkan pula perbedaan jenis padi yang bisa ditanam. Pada tanah yang tidak diairi ditanam padi dari jenis : *pade rhee*, *manyanu*, *jarum mudo*, *bungkuh*, dan *sicantek meneh*. Pada tanah yang diairi di tanam padi jenis : *pade idang*, *pade cut*, *pade santan keudah*, *pade sicantek*, dan *pade sireundah*. Sebelum perang, *Landhouwvoorlichtingsdienst* menyarankan supaya ditanam padi Cina. Sejak permulaan tahun-tahun tujuh puluhan secara meluas telah dikembangkan jenis-jenis padi yang tergolong bibit unggul.

Selama limabelas tahun terakhir, 1959 - 1974, terlihat perkembangan luas sawah/ladang yang ditanami yaitu dari 186.000 ha pada tahun 1959 menjadi 227.166 pada tahun 1974 (Aceh dalam Angka, 1975: halaman 59). Ini berarti adanya pertambahan sebesar 22,13%.

Penanaman padi di sawah meliputi mata rantai kegiatan sejak dari *peugleh lueng* (membersihkan salurang air), *meu'ue* (membajak sawah), *tabu bijeh* (pembibitan), *seumula* (menanam), *teumuweh* (menyiangi rumput), *koh on* (memotong padi), *jaga tulo* (menghalau pipit), *keumeukoh* (mengetam padi) *peuteungoh bleuet* Menyangkut butir padi), *seumephue* (menumbuk butir padi), *ceumeulho* (menggirik padi), *krue pade* (menganginkan padi), baru kemudian hasilnya bisa dibawa pulang ke rumah. Berbagai mata rantai kegiatan yang disebutkan itu lazimnya diiringi pula dengan berbagai macam upacara kenduri, seperti kenduri *tron blang* (ketika memulai ke sawah) *kenduri bijeh* (ketika menabur bibit), *kenduri alen* (ketika menanam), *kenduri tob blang* (ketika semuanya telah selesai ditanam), *kenduri keumaweuh* (setelah padi mulai membunting), *kenduri tueng pade* (kira-kira tujuh hari sebelum panen), dan *kenduri alen pade* (setelah padi diirik).

Kegiatan kerja bersawah untuk masing-masing *gampong* berada dibawah pimpinan *Keujreuen Blang*, yang bertugas mengatur cara-cara bercocok tanam, pembagian air, penyelesaian perselisihan, dan bagi hasil, ketentuan umum mengenai pembagian air untuk pengairan di sawah dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, petak sawah yang terletak pada lokasi persawahan (*blang*) bagian bawah akan mendapat pembagian air pada malam hari, petak sawah yang terletak ditengah-tengah lokasi persawahan akan mendapat pembagian air pada siang hari. Ketiga, petak sawah yang terletak pada bagian atas lokasi persawahan akan mendapat pembagian air pada pagi hari. Penentuan letak lokasi persawahan seperti yang disebutkan itu, ditentukan berdasarkan jarak dekatnya masing-masing petak sawah (*umong*) dengan *babah lueng* (muara saluran air).

Sistem penanaman padi di sawah yang berpengairan mengenal adanya tiga jenis kerja antara pemilik sawah dan petani, yaitu *mawah*, *siwa*, dan *upah*. Pada sistem *mawah*, biaya produksi

dan hasil padi dibagi sama antara pemilik sawah dan petani, kecuali biaya membajak dan menyiangi menjadi tanggungan petani. Pada sistim *siwa*, pemilik tanah menerima hasil padi sebanyak 16 *naleh* untuk setiap *naleh* sawah, tanpa menanggung biaya apapun. Pada sistem *upah*, petani hanya menerima upah kerja dari pemilik tanah, sedangkan hasilnya seluruhnya diterima oleh pemilik tanah. Namun demikian, apa yang disebutkan itu kadangkala bervariasi berdasarkan keadaan kesuburan sawah, dan keadaan kelangkaan tenaga yang tersedia. Perjanjian yang demikian sebetulnya terdapat juga dalam pemeliharaan ternak. Kalau perjanjian kerja didasarkan kepada sistem *mawah*, maka hasil (kenaikan harga atau anak) dari induknya akan dibagi dua, sedangkan hasil pertama akan dibagi tiga, yaitu satu bagian untuk pemiliknya dan dua bagian untuk peternak.

Pada daerah tertentu, seperti di Pidie misalnya, rata-rata tiap satu *naleh* sawah bisa mendatangkan hasil sebanyak delapan *gunca* padi. Untuk itu diperlukan biaya produksi paling kurang dua *gunca* padi, yaitu satu *gunca* untuk biaya membajak, dua *naleh* untuk biaya menanam dua *naleh* untuk biaya menyiangi rumput, tiga *naleh* untuk biaya mengetam padi, dan tiga *naleh biaya* mengirik. Kedalam perhitungan ini belum termasuk biaya mengangkut butir padi, (*nibai*), biaya menganginkan padi, dan biaya mengangkut padi. Walaupun hasil yang bisa diperoleh dari pekerjaan bersawah boleh dikatakan relatif kecil, namun dalam pandangan orang Aceh, bertani itu merupakan pekerjaan yang utama. Ini antara lain mereka nyatakan dalam ungkapan : *Pangule hareukat meugoe* (keutamaan bekerja adalah bertani). Ungkapan yang lain : *Kaya nauh hanmeusampe, kaya pada meusamporeuna*, artinya : kaya emas tidak mencukupi, kaya padi yang sempurna.

Di atas baru saja disebutkan beberapa ukuran sukatan, seperti *naleh* dan *gunca*. Selain itu, dalam masyarakat Aceh sebetulnya dikenal jenis-jenis ukuran sukatan yang lain. Secara berturut-turut masing-masing ukuran sukatan itu dapat disebutkan mulai dari ukuran terkecil, yaitu : *put* = $1/8$ *kai*, *ndie* = $1/4$ *kai*, *cupak* = 2 *kai*, *ara* = 4 *kai*, *gantang* = 2 *are*, *naleh* = 16 *are*, *gunca* = 10 *naleh*, *kuyan* = 10 *gunca*. Ukuran sebutan yang disebutkan itu, pada beberapa daerah digunakan untuk menunjukkan luas sawah, yaitu berdasarkan banyaknya bibit padi yang digunakan

untuk menanam sawah tersebut.

Persoalan lainnya yang juga erat kaitannya dengan kegiatan pertanian, yaitu mengenai perjanjian gadai. Dalam bahasa Aceh perjanjian gadai ini disebut *gala*, dalam bahasa Gayo disebut *garal*. Dalam hal ini dibedakan antara *peugala* dan *peugala ateueng*. Pada *peugala*, perjanjian didasarkan kepada tanah/sawah tertentu. Dalam hal ini hak untuk mengusahakan tanah/sawah beralih kepada yang menerima gadai. Atau bisa juga pengusahaan tanah itu tetap berada pada orang yang menggadaikan, tetapi pada setiap musim panen itu berkewajiban membayar sewa kepada yang menerima gadai. Pada *peugale ateung*, perjanjian tidak didasarkan kepada tanah/sawah tertentu, atau mungkin hanya didasarkan kepada tanah/sawah yang masih dalam ikatan *gala* dengan orang lain. Pada setiap panen yang menggadaikan berkewajiban untuk membayar sewa kepada yang menerima gadai. Dalam hal yang demikian muncul istilah *pade inggreh* (padi Inggris), *cok sigunca bayeue peuet blan maleh* (terima satu gunca bayar 14 naleh). Untuk perjanjian yang terakhir ini berarti tingkat bunga 40%.

Penduduk yang berdiam di daerah pesisir umumnya mengusahakan *tambak*, tempat mereka memelihara ikan payau, seperti bandang, udang dan blanak. Disamping itu, sebagian mereka menjadi nelayan di perairan Selat Samudera atau Samudera Indonesia. Usaha pertambakan banyak dijumpai di pesisir Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Timur. Penangkapan ikan laut terpusat pada beberapa tempat. Untuk daerah Aceh Besar perikanan laut banyak diusahakan di daerah Krueng Raya, Lam Bada, Lam Teungoh, dan Leupeung. Untuk daerah Pidie penangkapan ikan laut diusahakan di daerah Ie Leubeue, Laweueng, dan Meureudu. Di Aceh Utara pusat penangkapan Ikan laut terdapat di Lhok S Seumawe, Pusong, dan Ujong Blang. Usaha perikanan laut di Aceh Timur di Teulaga Tujoh, Kuala Bugak, dan Leungien. Untuk Aceh Barat penangkapan ikan laut diusahakan di daerah Kuala Tuha, Padang Seurahot, Tadu, dan Kuala Buban. Di Aceh Selatan perikanan laut berpusat di Susoh, Teupin Timah, Tangan-Tangan, Bakongan, Kuala Baro, Pusong Telaga, dan Singkil. Alat penangkapan ikan yang terpenting adalah *pukat*, *jaring nilon*, *jala*, *gisahupm sawok*, *angkok*, *jermal*, dan *pancing*.

Hasil perikanan laut itu antara lain ialah tuna, cakalang,

tongkol, kembang, layang-layang, tenggiri, karengidal, bawal, udang, ikan kuning, dan kerapu. Bagian terbesar hasil perikanan dipasarkan secara lokal.

Mereka yang bermata pencaharian hidup sebagai nelayan di bedakan mejadi tiga golongan, yaitu *aneuk pukat* (buruh nelayan) pawang, dan pemilik *jalo* dan *pukat*. Di antara mereka terdapat perjanjian bagi hasil sebagai berikut. Pertama, 5% dari hasil seluruhnya dibagikan kepada penjaga perahu dan pukat. Sisanya dibagikan kepada pemilik perahu dan pukat, serta pawang dan aneuk pukat. Pawang dan aneuk pukat, masing-masing mendapat bagian yang sama. Selain itu, pawang masih menerima lagi sebesar 25% dari bagian pemilik perahu dan pemilik pukat, sebagai hadiah. Pada sistem penangkapan ikan dengan perahu jaring berlaku pembagian : 60% buat pemilik perahu dan pemilik jaring, dan 40% untuk para pekerja.

Kegiatan penangkapan ikan di laut berada di bawah pimpinan *panglima laot*. Paling kurang ada empat tugas pokok *panglima laot*. Pertama, mengawasi dan memelihara pelaksanaan *adat laot*. Kedua, mengatur penangkapan ikan. Ketiga, menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi dalam hubungan dengan penangkapan ikan di laut. Keempat, menyelenggarakan upacara *adat laot*, kecelakaan di laut, gotong-royong dan masalah sosial lainnya.

Kesempatan berekonomi bagi penduduk yang boleh dikatakan terbatas kepada pertanian dan perikanan, sebagai mata pencaharian pokok, telah membuka peluang bagi daerah Aceh untuk menjadi daerah yang surplus padi, paling kurang berdasarkan catatan resmi pemerintah daerah. Jumlah produksi padi dalam tahun 1976 adalah 777.056 ton, sedangkan jumlah yang dikonsumsi sendiri adalah 586.231 ton gabah kering (Sekretariat wilayah 1977: halaman 33). Ini berarti adanya kelebihan produksi sebanyak 189.825 ton gabah kering. Daerah yang surplus padi adalah Pidie, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Barat, dan Aceh Timur.

Pada daerah surplus padi, hampir pada setiap kemungkinan ditemui sebuah "huller", untuk mengolah padi. Pada setiap musim panen, para petani pemilik sawah biasanya menitipkan padi mereka pada perusahaan huller, menunggu tercapainya ting-

kat harga yang dipandang menguntungkan untuk menjual padi itu. Selama masa titipan itu, para pengusaha huller mendapat peluang untuk memproses padi yang dititipkan itu menjadi beras, untuk kemudian di jual kepada para pedagang. Ini sebetulnya suatu kesempatan yang cukup baik bagi pengusaha huller untuk menjalankan usahanya, tanpa terlalu banyak memerlukan modal.

Kesempatan kerja yang terbatas pada pertanian di sawah, dan luas areal persawahan yang relatif kecil bagi masing-masing petani serta tingkat harga padi yang acapkali dianggap kurang menguntungkan bagi petani, mengundang banyak problema dalam bidang kesempatan kerja. Sebagian penduduk terdorong untuk mencoba mencari kerja dalam bidang yang lain, seperti menjadi pedagang, pengrajin, tukang, atau buruh, dan pergi mencari kerja di daerah lain (merantau), baik yang bersifat musiman (temporary Migration), maupun yang bersifat menetap (permanent migration). Mereka yang berdagang, ada yang berkedai tetap, dan ada pula yang menjadi penjaja, atau *muge* (pedagang perantara).

Pekerjaan sebagai *muge* meliputi berbagai jenis barang hasil pertanian dan barang kebutuhan sehari-hari. Jaringan kegiatannya meluas sampai jauh ke pelopok desa. Sebagian mereka memperjual-belikan barang dagangannya pada pasar harian (*Uroe gantoe*) yang diadakan secara bergilir di antara ibukota kecamatan. Sebagai contoh, *uroe gantoe* di Pidie hari Minggu di Bandar Baru, hari Senen di Mura Tiga, di Sakti, dan di Trieng Gadeng, hari Selasa di Padang Tiji dan di Bandar Dua, hari Rabu di Kuala dan Glumpang Munyeuk, hari Kamis di Keubang Tanjong dan di Tiro/Trusep, hari Jum'at di Batee dan di Tangse, dan hari Sabtu di Mutiara.

Hubungan antara penjual dan pembeli di pedesaan pada umumnya berlangsung lewat sistem kredit, saling percaya-mempercayai. Artinya, pembeli baru membayar harga barang yang dibelinya setelah suatu jangka waktu yang relatif lama berlalu, atau dengan cara berhutang. Begitu juga dengan *muge*, mereka baru membayar kepada petani setelah barang-barang yang dibelinya terjual dan harganya mereka terima. Bahkan di beberapa tempat terlihat hubungan jual-beli yang didasarkan kepada sistem *ijon*. Artinya, hasil pertanian telah terjual sebelum tiba waktu panen.

Paling kurang ada dua kondisi yang menyebabkan hubungan jual-beli berlangsung melalui sistim kredit. Pertama, tempat tinggal yang boleh dikatakan berdekatan, sehingga mereka saling kenal-mengenal, untuk kemudian bisa ditetapkan dapat tidaknya itu dipercaya. Kedua, arus uang di pedesaan yang amat terbatas, sehingga boleh dikatakan jarang ada orang yang mempunyai uang tunai pada setiap saat. Kalaupun ada uang tunai yang mereka terima, lazimnya mereka alirkan kembali ke kota, misalnya untuk membeli perhiasan.

Mereka yang pergi merantau, umumnya bekerja sebagai pedagang kecil, petani, nelayan, dan buruh. Dewasa ini, mereka yang bekerja sebagai pedagang banyak ditemui di berbagai ibukota kecamatan dan kabupaten. Mereka yang bekerja sebagai petani umumnya ditemui di kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Timur. Kebanyakan dari mereka yang bekerja sebagai nelayan umumnya ditemui di perkampungan-perkampungan pesisir di Aceh Timur, seperti di Teulaga Tujoh, Bugak, dan Bayeuen. Yang bekerja sebagai buruh tani umumnya terdiri atas perantau musiman. Pada musim-musim tertentu mereka, terutama yang berasal dari kabupaten Pidie, pergi ke Aceh Utara untuk mengetam padi, atau ke Aceh Besar untuk memetik Cengkeh, atau ke Aceh Tengah untuk memetik kopi, atau ke Aceh Timur untuk menjadi buruh nelayan, atau bekerja di warung nasi/kopi, yang umumnya diusahakan oleh orang yang berasal dari daerah mereka sendiri.

Bekerja sebagai pedagang tampaknya lebih menarik bagi kebanyakan mereka yang merantau, antara lain terlihat dari kata-kata yang mereka ungkapkan : *tameukat pruet troe peukayan gleh*, artinya berdagang perut kenyang pakaian bersih.

Walaupun ada resiko dalam berdagang, belum selalu merupakan kerugian. Kalau barang tidak laku dijual, paling kurang barang itu dapat dipergunakan sendiri. Bila pembeli mungkir untuk membayar utangnya, mereka dapat untuk tidak memenuhi kewajiban membayar utang mereka kepada para pedagang yang menguntungkan. Jalan pikiran mereka tampak amat sederhana, antara lain karena walaupun resiko itu memang harus dihadapi, mereka dapat segera meninggalkan daerah perantauan dan kembali ke kampung, ke daerah asal mereka.

2. Sistem ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional

Dilihat dari sumbernya, sistem pengetahuan pada masyarakat Aceh bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pengetahuan tradisional, pengetahuan yang bersumber pada ajaran Islam, dan pengetahuan yang berasal dari kebudayaan barat.

Pengetahuan tradisional didasarkan kepada hal-hal yang bersifat supernatural, karena jenis pengetahuan ini bisa dikelompokkan sebagai pengetahuan primitif. Melalui kepercayaan animisme dan dinamisme pada masyarakat terbentuk konsep tentang makhluk halus yang menimbulkan kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut berwujud dalam bentuk daya tahan fisik ataupun mental secara luar biasa. Pada masyarakat Aceh, kekuatan gaib demikian lazim disebut *aleumee* (ilmu), dan diperoleh dengan cara *meuamae* (mengamalkan ilmu). *Eleumee* tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *elemuee donya* (ilmu dunia) dan *elemuee akhrat* (ilmu akhirat).

Eleumee donya lazimnya diperoleh lewat bentuk-bentuk hubungan tertentu dengan makhluk halus, seperti jin, syitan, hantu, atau roh nenek moyang. *Eleumee donya* bisa digunakan untuk maksud yang baik maupun jahat.

Contohnya antara lain bisa ditemukan dalam hubungan dengan kesehatan dan pengobatannya. Kalau dipergunakan untuk tujuan yang baik, menurut pandangan masyarakat akan bisa mengobati orang sakit, memperkuat daya tahan fisik dan mental. Yang termasuk kedalam golongan *eleumee donya* ini, antara lain *eleumi pari*, *eleumee sandrung*, dan *eleumee daboh*. Sebaliknya, kalau digunakan untuk tujuan-tujuan yang jahat, *eleumee donya* tersebut dinamakan *eleumee jeuheut* (ilmu hitam) seperti *eleumee burong*, dan *eleumee tuba*. Dinamakan demikian, karena bisa digunakan untuk menyakiti orang lain secara gaib.

Eleumee akherat didasarkan kepada kekuatan gaib yang berasal dari Tuhan. Karena berasal dari Tuhan, *eleumee akherat* tersebut hanya bisa dipakai untuk maksud-maksud yang baik semata-mata.

Orang yang cukup berhasil mengamalkan *eleumee akherat* ini sadar sepenuhnya, bahwa apa yang dimilikinya itu tidak lain dari anugerah Tuhan kepadanya. Dalam masyarakat, mereka akan dipandang sebagai orang keramat. Orang yang demikian akan

selalu mendapat perlindungan dari Tuhan. Kalaupun ada orang lain yang bermaksud jahat terhadap dirinya, maka kejahatan itu akan berubah menjadi bumerang bagi yang jahat itu sendiri. Dongeng-dongeng lama banyak mengungkapkan tentang jasa yang berguna bagi masyarakat yang diberikan oleh orang-orang yang dipandang keramat tersebut. Dalam salah satu dongeng diceriterakan, bahwa Teungku Lam Peuneu'eun, seorang keramat dari Mim IX Aceh Barat, cukup berjasa atas terwujudnya lada dan benih sejenis kapuk (piekaar, 1977: halaman 18). Dongeng lain lagi menceritakan bahwa terjadinya beberapa sungai di Aceh adalah karena tarikan tongkat orang keramat, yang bermaksud membuat saluran air bagi tanah pertanian. Sejauh mana kebenaran dongeng itu bisa dipercayai belum pernah diteliti.

Sumber pengetahuan masyarakat yang lain di daerah Aceh adalah *ajaran Islam*. Pengetahuan ini diperkirakan berkembang secara meluas sejak abad ke - 14, yaitu pada masa Kerajaan Pasai mencapai puncak kejayaannya. Ketika itu, Pasai menjadi pusat studi agama Islam yang terpenting, dan menjadi tempat berkumpul para ulama dari berbagai negeri Islam, untuk mendiskusikan soal-soal agama Islam. Pada masa-masa berikutnya, di ibukota kerajaan Aceh berkembang sebuah sistem pendidikan agama Islam yang disebut Dayah Manyang Baiturrachman. Berdasarkan sebuah sumber (Hasjmy, 1969: halaman 9), kalau kebenarannya dapat diterima, sistem pendidikan pada Dayah Manyang tersebut menggunakan pengkhususan (spesialisasi) yang lebih jauh. Beberapa bidang spesialisasi yang dikembangkannya adalah ilmu tafsir dan hadis, ilmu ketabiban, ilmu kimia, tarikh, ilmu hisab, ilmu siyasah, ilmu pertanian, ilmu hukum, falsafah, ilmu kalam, ilmu pemerintahan dan keuangan negara, ilmu pertambangan, bahasa Arab, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu peperangan. Dewasa ini pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam masih berlangsung pada dayah dan madrasah, serta institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jamiah Ar-Raniry.

Perkenalan masyarakat Aceh dengan sistem pengetahuan yang berlatar belakang *kebudayaan Barat* baru terjadi pada permulaan abad ke-20 ini, melalui sistem pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sistem pengetahuan Barat tersebut untuk tahap-tahap pertama perkembangan-

nya terbatas kepada putera-putera elite penguasa tradisional (*Uleebalang*). Akan tetapi, dewasa ini sistem pengetahuan tersebut sudah menyebar dan dikembangkan melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah, sejak dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kecuali itu, ketrampilan meneliti dalam bidang kehidupan masyarakat dibina melalui Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh.

Pusat latihan ini dimulai sejak tahun 1974 dan dewasa ini telah menghasilkan 59 orang lulusan dari berbagai lembaga pendidikan tinggi dan instansi di Indonesia. Sedangkan untuk mengawetkan berbagai dokumen dan informasi mengenai daerah dan masyarakat Aceh, pada tahun 1977 dibuka Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Kedua lembaga ilmu pengetahuan tersebut, masing-masing berlokasi di Darussalam dan Banda Aceh, kiranya menjadi pelengkap terpenting dari sistem pendidikan tinggi yang dikembangkan pada Universitas Syah Kuala.

Sistem teknologi tradisional yang berkembang di Aceh di Warnai oleh latar belakang kehidupan penduduknya sebagai masyarakat petani, dan lebih bersifat padat karya. Pada sistem penanaman padi di Sawah dipergunakan berbagai peralatan kerja, seperti *langai*, *yoi*, *creuh*, *catok*, *iham*, *parang*, *sadeuep*. Peralatan yang lazim dipakai untuk menangkap ikan antara lain terdiri atas perahu, *jalo*, *pukat*, *jaring*, *jala*, *pancing*, *blat*, *bubee*, *jäng*, *jeureumai*. Untuk menghasilkan bahan pakaian digunakan peralatan *tupeuen*. Pengolahan padi untuk menghasilkan beras atau tepung dikerjakan dengan menggunakan sejenis alat penumbuk yang disebut *leusong* dan *jeungki*. Minyak kelapa dihasilkan dengan menggunakan *peumeurah*. Berbagai peralatan tradisional yang disebutkan itu umumnya terdiri atas kayu da besi, serta benang. Menderasnya arus modernisasi melanda desa selama dasawarsa terakhir ini, menyebabkan sebagian peralatan tersebut terdesak, digantikan oleh peralatan teknologi modern.

3. Sistem religi dan kepercayaan

Walaupun persentase tertinggi (97,00%) penduduk di daerah Aceh beragama Islam, namun pemeluk agama Protestan, Katholik, Budha dan agama lainnya juga dijumpai, terutama di kalangan orang Batak, Cina dan Menado. Bahkan di hulu sungai Singkil, Aceh Selatan, dijumpai pemeluk agama PAMBI, dianut oleh

mereka yang berasal dari Dairi, Sumatera Utara. Penduduk asli boleh dikatakan amat terlibat dengan agama Islam. Ini mungkin merupakan pengaruh logis dari kejayaan masa-masa pemerintahan kesultanan dahulu. Ketika itu Islam menempati kedudukan sebagai agama kerajaan yang dianut oleh seluruh penduduknya. Pada penghujung tahun lima puluhan abad ke-20 ini, daerah Aceh mendapat otonomi dalam arti yang lebih luas, dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh (Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. X 1/Missi/1959, tanggal 26 Mei 1959). Keistimewaannya terutama dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Sistem religi dan kepercayaan yang berkembang di Aceh pada dasarnya dapat dipahami dari segi pranata-pranata keagamaan, seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan dan sosial keagamaan, tradisi keagamaan, dan peranan pemimpin agama. Mesjid dan *meunasah* merupakan struktur pranata keagamaan yang terpenting bagi pemeluk Islam. Sedangkan bagi pemeluk agama Protestan, Katholik, dan Budha, struktur pranata keagamaannya masing-masing terpusatkan pada gereja dan kuil/kelenteng. Dewasa ini dijumpai tidak kurang dari 1.671 buah mesjid, 6.204 *meusanah*, 1.917 musalla, 91 gereja Protestan, 19 gereja Katholik, dan 8 Kuil/Kelenteng (Memorandum, 1978; halaman 440).

Bangunan mesjid umumnya dijumpai pada tingkat pemukiman, dan merupakan tempat orang melakukan salat Jum'at secara berjamaah pada setiap hari Jum'at sedangkan *meusanah* (Gayo: Mersah) dijumpai pada setiap *gampong* (Gayo: kampung) yang berfungsi tidak hanya untuk tempat orang melakukan salat pada setiap waktu, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan kampung, seperti tempat bermusyawarah, tempat pendidikan, tempat berkumpul di kala hendak melaksanakan gotong-royong, bahkan juga merupakan tempat bagi kaum laki-laki menghabiskan waktu luangnya, serta berbagai tempat menginap bagi laki-laki bujangan, Ibadah sembahyang di mesjid dipimpin oleh seorang imam (Gayo: imem) yang disebut *imuem meuseujid*, setelah khatib menyampaikan khutbah Jum'atnya.

Pendidikan agama Islam umumnya berlangsung pada madrasah, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Idrasah Tsanawiyah, Madrasah 'Aliyah, serta perguruan Tinggi Agama IAIN.

Kecuali itu, lembaga pendidikan agama tradisional – pesantren – masih tetap berfungsi, dan lebih dikenal dengan sebutan *dayah*, yang diduga berasal dari bahasa Arab *zawiyah*. Yang diduga berasal dari bahasa Arab *zawiyah*. Paling kurang ada tiga jenjang pendidikan yang terdapat di dalam sistem pesantren, yaitu tingkatan pendidikan *meusanah*, tingkatan pendidikan *rangrang*, dan tingkat pendidikan *bale*. Pada masa kerajaan Aceh juga dikenal sebagai jenjang pendidikan yang paling tinggi, yang disebut dengan *dayah manyang*, terdapat di ibukota kerajaan, yang dinamakan *Dayah Manyang Baiturrahman*. Perbedaan sistem pendidikan tersebut ke dalam tiga golongan pada umumnya didasarkan kepada struktur atau tingkatan kerumitan dari keragaman materi pengajaran. Masa belajar pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut tidak terikat dengan batasan waktu tertentu, tetapi ditentukan oleh kemampuan murid yang bersangkutan untuk menguasai materi pengajaran yang diberikan.

Tradisi keagamaan pada masyarakat Aceh umumnya berbentuk kenduri selamatan. Begitu melekatnya upacara kenduri ini pada penghayatan keagamaan orang Aceh, sehingga nama bulan pun kerap kali disebutkan nama upacara kenduri tertentu, seperti bulan Jumadil Akhir disebut *buleuen kanduri boh kayee* (bulan kenduri buah-buahan), bulan Rajab disebut *bulan kenduri boh kayee* (bulan kenduri buah-buahan), bulan Rajab disebut *buleuen kenduri apam* (bulan kenduri kue apem), dan bulan Syaban disebut *buleuen kanduri bu* (bulan kenduri nasi). Jenis kenduri lain, adalah kenduri maulud, kematian, *ba bu*, *laot*, *blang*, perkawinan, kelahiran, akikah, sunatan, *tulak bala*, dan lain-lain.

Elite kepemimpinan agama di Aceh kerap kali dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ulama tua dan ulama muda. Ulama muda bisa dibedakan lagi menjadi dua golongan yaitu PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dan Muhammadiyah. Gerakan PUSA mulai muncul sejak tahun-tahun terakhir dasawarsa tiga-puluhan, dengan kegiatannya yang terpenting adalah membangun madrasah. Golongan Muhammadiyah mulai tampak pengaruhnya sejak masa-masa setelah peristiwa Gerakan Tiga puluh September (G.30.S), tahun enam puluhan, walaupun pemunculannya di Aceh sudah dimulai sejak penghujung tahun dua puluhan. Golongan Muhammadiyah ini kerap kali dinamakan dengan golongan

Wahabi, terutama karena sikap radikalnya dalam menerangkan idea mereka. Namun begitu, pengaruh Ulama Tua terlihat masih tetap menonjol, terutama di kalangan masyarakat desa. Mereka berusaha mempertahankan ideanya melalui sistem pendidikan *dayah*.

4. Sistem kemasyarakatan dan kekerabatan

Dalam struktur administrasi pemerintahan di daerah Aceh dikenal beberapa jenjang pembahagian, dimulai dengan tingkatan propinsi, menurun ke tingkat kabupaten/kotamadya, tingkat kecamatan, tingkat kemukiman, dan tingkat *gampong* kampung). Daerah Aceh dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh, merupakan suatu daerah yang meliputi 8 kabupaten, 2 kotamadya, 129 kecamatan, 594 kemukiman, dan 5.642 *gampong* (universitas Syiah Kuala, 1972: halaman 49 - 51). Dengan begitu, tingkatan propinsi merupakan tingkat administrasi pemerintahan yang tertinggi, dan tingkat *gampong* merupakan tingkat administrasi pemerintahan yang terendah. Jumlah *gampong*, kemukiman dan kecamatan pada masing-masing wilayah kabupaten berbeda-beda. Kabupaten Pidie dan Aceh Utara tergolong sebagai wilayah yang terbanyak kecamatannya, masing-masing 23 buah. Tetapi jumlah kemukiman yang terdapat di Pidie lebih banyak dibandingkan dengan Aceh Utara, masing-masing 127 dan 90. Tetapi sebaliknya, jumlah *gampong* yang terdapat di Aceh Utara melebihi jumlah *gampong* yang ada di Pidie, yaitu masing-masing 1.422 dan 948.

Pemerintahan *gampong* mempunyai beberapa tugas, seperti melaksanakan instruksi pemerintah kecamatan, membantu pemungutan pajak dan Ipeda (iuran Pembangunan Daerah) melakukan pemeliharaan sarana umum wilayahnya, dan memberikan layanan serta bimbingan bagi warga desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala kampung (*geuchik*) dibantu oleh sekretaris, *tuha peuet*, *imuem meusanah*, dan *keujreun*. Pada masyarakat Gyo dikenal konsep *sarak opat*. Konsep ini mulanya berasal dari sistem pemerintahan yang pernah berlaku di dalam *belah*. Lembaga *sarak opak* dibentuk untuk membeir pertimbangan kepada *geuchik* ketika akan mengambil tindakan penting. Pemerintahan *kegeuchikan* di Gayo pada dasarnya berlandaskan kepada semboyan *genap mupakat*, yaitu yang berhubungan dengan ikut sertanya

masyarakat dalam kegiatan pemerintahan *kegecikan*.

Kelompok kesatuan hidup *belah* pada masyarakat Gayo, merupakan salah satu bentuk variasi yang ditemui dalam kesatuan teritorial sistem kemasyarakatan dan kekerabatan di Aceh. Persekutuan hidup *belah* sebetulnya tidak lain dari gabungan sejumlah keluarga luas (*kuru*). Berdasarkan sebuah inventarisasi (Mukhlis, 1977: halaman 43), di Tanah Gayo ditemui tidak kurang dari 81 nama *belah* (Daftar IV.1). Garis keturunan mereka mengikuti hukum partilineal. Variasi lain dijumpai pada masyarakat Alas. Pada mereka terdapat sistem kemasyarakatan berdasarkan *merga* (marga). Yang tergolong besar jumlahnya adalah *merga-merga* Desky, Sekedang, Beruh, dan Selian. Sedangkan *merga-merga* yang kecil antara lain *merga* Kling, Monte, Pinim, Pagan, Pelis, Sinage, Bangko, Aceh, Kare, dan Cibro (Hikayat Zaenal Mutakin, 1977: halaman 8).

Variasi lain lagi, ditemukan pada masyarakat Simeulu. Sistem kekerabatan pada mereka dibedakan menjadi tiga satuan, yaitu keluarga, *walli*, dan suku. Paling kurang ada empat suku yang terkenal pada mereka, yaitu Lasali, Dainang, Lanteng, Dakwat. Keempat suku itu memecah dan bercampur dengan pendatang sehingga timbul suku-suku baru. Suku-suku lain adalah Dainang Dlok, Dainang Lamba, Pamuncak atau Aceh Pidir, Pamuncak 26, Pamuncak 24, Pamuncak Mudo, Manjungan, Bihawo, Ballawa, Bangawan, Abesi, Kabu, Bangulu, dan Aceh. Garis keturunan mereka mengikuti hukum patrilineal (Nani Tuloli, 1976: halaman 2 - 3).

Suatu hal yang menarik mengenai garis keturunan dijumpai pada masyarakat Gayo, karena di samping berlaku prinsip partri-lineal, pada mereka juga ditemui praktek matrilenial. Sementara itu, sejak tahun laimapuluhan muncul prinsip bilateral, sebagai bentuk baru (Mukhlis, 1977: halaman 7). Pada masyarakat Gayo dikenal tiga macam bentuk perkawinan, yaitu *juelen*, *kerja angkap*, dan *kerje kuso kini*. Pada sistem perkawinan *juelen* (*kerje anggo*) isteri dan anak-anaknya masuk *belah* suaminya. Sebaliknya, pada sistem *kerja angkap* suami ke dalam *belah* isterinya. Pada sistem perkawinan *kerje kuso kini* terdapat kebebasan untuk memilih tempat menetap yang diinginkan setelah menikah.

Sistem perkawinan pada masyarakat Aceh umumnya berbentuk matrilineal, suami tinggal di rumah isteri. Masa tinggal di rumah orang tua isteri berlangsung sampai dengan tersedianya tempat tinggal lain yang khusus buat mereka, atau orang tua isteri pindah ke tempat tinggal yang lain. Pemisahan tempat tinggal tersebut dalam adat perkawinan masyarakat Aceh disebut *peumeukleh* (pemisahan). Hubungan kekerabatan dalam sistem kekeluargaan mereka dibedakan menjadi dua, yaitu *wali* dan *karong*. Hubungan *wali* didasarkan kepada tali kekerabatan dari pihak ayah, dan *karong* berdasarkan tali kekerabatan dari pihak ibu (Zainuddin, 1961: halaman 340 - 358).

5. Sistem bahasa dan ceritera rakyat

Latar belakang ethnis di kalangan penduduk setempat, menimbulkan perbedaan dalam sistem bahasa mereka. Paling kurang ada tujuh bahasa yang dipergunakan oleh kalangan yang relatif cukup luas, yaitu bahasa-bahasa Aceh, Gayo, Alas, Simeulu, Tamiang, Aneuk Jamee, dan Singkil. Namun kesemuanya itu pada dasarnya masih tetap tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Tamiang banyak memperlihatkan persamaan dengan bahasa Melayu, terutama kalau dilihat dari kosa katanya. Bahasa Aneuk Jamee lebih mendekati bahasa Minang. Sedangkan bahasa Simeulu lazim dibedakan menjadi dua jenis, bahasa Sigulai dan bahasa Defayan. Kedua-duanya disebut dengan bahasa Ulu (Pulau). Bahasa Sigulai dipergunakan oleh penduduk setempat di Simeulu Barat dan Salang. Sedangkan bahasa Defayan dijumpai di Simeulu Timur, Simeulu Tengah dan Tepang Selatan. Di antara kedua bahasa pulau tersebut terdapat perbedaan, baik dalam kosa kata maupun bentuk suku kata. Dilihat dari bentuk suku kata, bahasa Sigulai lebih mendekati bahasa Nias (Nani Tuloli, 1976: halaman 4).

Kecuali bahasa, di kalangan masyarakat setempat di Aceh terdapat pula bermacam ceritera rakyat. Ceritera rakyat pada masyarakat Aceh lazim dibedakan menjadi dua jenis, yaitu apa yang disebut hikayat dan *haba jameun* (ceritera dahulu). Hikayat adalah sejenis ceritera rakyat yang dikisahkan dalam bahasa puisi syair-syair. Biasanya hikayat itu dinikmati lewat alunan suara di pembawa hikayat, terutama di *meunasah-meunasah* (surau

atau langgar). Sedangkan *heba jameun* (Gayo : kekerabatan) biasanya dikisahkan dalam bahasa prosa. Pada masa dahulu para orang tua kerap kali menceritakan *haba jameun* itu kepada anak-anak mereka, sebagai ceritera mengantarkan tidur. Baik hikayat maupun *haba jameun*, biasanya mengungkapkan kembali berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa yang lampau, yang telah amat jauh berlalu.

Adakalanya kisah itu berlatar belakang sejarah yang nyata, yang telah dibumbui dengan berbagai macam ramuan fantasi supaya ceriteranya lebih menarik. Tetapi tidak jarang, bahwa sebagian besar kisah itu hanya dongeng melulu. Pada umumnya semua kisah baik yang mempunyai latar belakang sejarah yang nyata maupun yang hanya berupa dongeng saja, bertemakan kepada apa-apa yang dipandang baik ketika itu. Begitu sering kisah itu diceritakan berulang kali, sehingga anak-anak menjadi hafal, dan tetap berkesan sampai ia mencapai usia dewasa. Di antara berbagai macam judul hikayat yang pernah dikenal secara meluas pada masyarakat Aceh, tertera pada Daftar IV.2.

Selain hikayat dan *haba jameun*, di daerah Aceh juga berkembang jenis-jenis seni tari tertentu, baik tari asli Aceh, tari karya baru, tari daerah lain, ataupun tari nasional, seperti tercantum pada Daftar IV.3. Alat kesenian yang terpenting pada masyarakat Aceh antara lain *geundrang*, *rapai*, *geudeumbak*, biola, Aceh *bansi*, dan *salueng*. Permainan rakyat yang cukup digemari di daerah ini antara lain *guedeu-guedeu*, *seulayang tunang*, *ayon Aceh*, *pupok leumo*, *peulot manok*, dan *pupok keubiri*.

B. PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN

Kebanyakan orang beranggapan, bahwa tahun tujuh puluhan abad ke-20 ini merupakan dasawarsa pembangunan bagi daerah Aceh. Lebih-lebih kalau yang dimaksudkan itu terbatas kepada pembangunan fisik. Selama dasawarsa ini sejumlah program pembangunan telah menyebar sampai jauh ke pelosok desa. Di antara berbagai jenis program pembangunan yang tampak amat populer di kalangan masyarakat desa, adalah program Bimas/Inmas, SD Inpres, BUUD/KUD, Puskesmas, KB, dan Tabanas/Taska. Selain itu, muncul pula berbagai jenis proyek pembangunan, seperti proyek prasarana produksi, proyek prasarana perhubungan, pro-

yek prasarana pemasaran, dan proyek prasarana sosial. Dewasa ini, juga terlihat mulai tumbuh industri dengan peralatan teknologi mutakhir.

Semua itu, sebetulnya bukan tidak ada artinya bagi perkembangan kebudayaan. Bersamaan dengan munculnya bermacam jenis program dan proyek itu, muncul pula bermacam kesempatan dan kebutuhan. Dalam hal ini antara lain terlihat kesempatan pendidikan yang tambah beragam, kesempatan kerja yang semakin berjenis, keterampilan yang diperlukan semakin tambah meninggi, dan komunikasi dengan dunia luar yang semakin tambah terbuka. Bersamaan dengan itu pula, cakrawala kebutuhan konsumtif tambah meluas. Berbagai kemajuan dan keterbukaan itu menumbuhkan rona baru dalam pola pemikiran dan tingkah laku sebagian anggota masyarakat. Mereka semakin menyadari dan merasa tidak puas dengan apa-apa yang mereka miliki dan banggakan selama ini. Kesederhanaan hidup menjadi semakin luntur, dan keakraban hubungan sosial menjadi semakin pudar.

Salah satu bentuk perubahan yang terjadi secara menonjol selama dasawarsa ini, adalah perubahan pada segi isolasi sikap, yaitu dari sikap mental yang bersifat agak tertutup kepada yang lebih terbuka. Hal ini erat hubungannya dengan semakin berperannya golongan teknokrat, terutama yang muncul lewat Universitas Syiah Kuala. Tampaknya, mereka cukup berhasil menjalin kerja sama dengan golongan pedagang, ulama, militer, dan pejabat pemerintahan umumnya. Golongan teknokrat tersebut mulai muncul di kalangan masyarakat Aceh sejak tahun 1961, ketika Universitas Syiah Kuala mulai dibangun. Mereka ada yang berasal dari kalangan masyarakat setempat, dan ada pula pendatang dari luar. Ada yang memperoleh pendidikan tinggi di daerahnya sendiri, ada pula yang di daerah lain dan luar negeri. Keberadaan dan peranan mereka tampak mulai melembaga terutama dalam bidang pemerintahan (Ibrahim Abdullah, 1977: halaman 13).

Akan tetapi, kalau ditelusuri agak lebih jauh, jalur sejarah kontak kebudayaan di Aceh, maka akan diketahui bahwa perubahan-perubahan terpenting sebetulnya sudah dimulai sejak tahun-tahun pertama abad ke-20 ini. Sejak saat itu masyarakat Aceh mulai berkenalan dengan sistem pendidikan sekuler, jaringan komunikasi dan transportasi yang lebih modern, jenis tanaman

pertanian yang lebih beragam, dan sistem ekonomi yang lebih bercorak. Pada tahun-tahun empatpuluhan pimpinan kekuasaan formal di Aceh mulai bergeser, dari elite tradisional kepada elite agama. Pemunculan golongan elite agama mulai dirintis pada awal tahun tigapuluhan, dan bersamaan dengan itu muncul sebuah sistem pendidikan baru untuk pengajaran agama, yang berlangsung melalui lembaga pendidikan madrasah. Dalam masa pergerakan nasional, orang Aceh juga ikut melibatkan diri ke dalam organisasi modern, seperti Serikat Islam, Sarekat Aceh Muda Setia (1916), Volksonderwijzensbond Aceh (1918), Kongsi Aceh Sumatera (1920), dan Muhammadiyah. Gerakan Kepanduan juga dikembangkan, seperti Kasjafatul Islam (dari PUSA) dan Hizbulwathan (dari Muhammadiyah). Dalam gerakan kesusasteraan Indonesia Baru, Aceh juga diwakili oleh beberapa tokohnya, seperti Ali Hasymi dan H.M. Zainuddin (Ibrahim Alfian, n.d.: halaman 126).

C. PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Sebagai suatu totalitas aneka ragam pikiran, karya, dan hasil karya manusia, kebudayaan akan bisa berkembang secara lebih terarah dan berkesinambungan, apabila ada usaha yang sengaja untuk membinanya. Usaha pembinaan tersebut ada yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, ada pula oleh organisasi swasta. Dalam bidang kesenian misalnya, sampai dengan tahun 1976 terdapat enam organisasi seni lukis, 137 organisasi senitari, 57 organisasi seni drama, dan 49 organisasi band/orkes. Kecuali itu, selama Pelita II telah dibangun sebuah Gedung Art Gellery seluas 133 meter persegi, dan sebuah Gedung Teater Terbuka di Banda Aceh. Kegiatan yang lain dalam bidang kesenian meliputi penelitian tentang jenis kesenian daerah, penyelamatan dan dokumentasi seni tradisional, pengembangan organisasi dan tenaga kesenian, apresiasi dan ketrampilan seni, serta pengadaan alat-alat kesenian

Kegiatan yang amat bersengaja dalam rangka pembinaan kebudayaan antara lain melalui penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh yang telah berlangsung dua kali di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh, masing-masing tahun 1958 dan 1972. Pekan Kebudayaan Aceh yang pertama merupakan perintis jalan ke arah penggalan masa lampau dan penyusunan masa depan yang

gemilang. Sebab itu, kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai upaya yang bertujuan untuk mengawetkan karya budaya yang ada dan mengembangkannya supaya menjadi lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan demikian, apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan akan lebih berkembang, dan seluruh masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengalaman-pengalaman budaya yang berkualitas.

Ketika Pekan Kebudayaan Aceh yang pertama itu berlangsung, para pesertanya yang berasal dari berbagai pelosok wilayah Aceh bersepakat untuk membuat piagam bersama, yang mereka beri nama *Piagam Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiahkuala*. Salah satu isi dari piagam tersebut adalah cetusan kesadaran, bahwa untuk menuju zaman pembangunan, baik rohaniyah maupun jasmaniah, kepribadian sebagai bangsa yang telah sejak lama mempunyai budaya dan sejarah yang diwarisi dari seluruhnya merupakan syarat mutlak. Piagam tersebut ditandatangani di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pada malam penutupan Pekan Kebudayaan Aceh pertama, tanggal 23 Agustus 1958 oleh T. Hamzah (selaku Ketua Umum LPAPPPKA), T.R. Mahmud (Aceh Besar), A. Wahab Dahlawi (Aceh Utara), Hassan Samosir (Aceh Tengah), Dj. Kamil (Aceh Selatan), T. Muhammad Syah (Pidie), A. Hasan (Aceh Timur), dan Iskandar (Aceh Barat).

Setahun sebelum Pekan Kebudayaan Aceh Pertama itu berlangsung tepatnya tanggal 6 September 1957, telah dibentuk Lembaga Kebudayaan Aceh, yang bertugas sebagai badan penyelidikan dan pemufakatan kebudayaan Aceh dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk membangun daerah Aceh dalam segala bidang, baik rohani maupun jasmani, supaya terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pada tahun 1958 dibentuk sebuah Yayasan, yang bernama *Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh*. Sebagai langkah pertama dari Yayasan tersebut adalah mendirikan perkampungan pelajar/mahasiswa di ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan ibukota-ibukota kabupaten, serta mengusahakan berdirinya sebuah universitas untuk daerah Aceh. Langkah selanjutnya meliputi berbagai usaha di bidang-bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi Ketua pertama badan Pengurus tersebut adalah Muhammad Husin, ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Kantor Gubernur Aceh.

Daftar IV.1.

NAMA-NAMA *BELAH* DI TANAH GAYO

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Belah bale | 2. Belah baluhen |
| 3. Belah Beno | 4. Belah Bugak |
| 5. Belah Bujang | 6. Belah Bukit Bersah |
| 7. Belah Bukit Iwih | 8. Belah Bukit Lah |
| 9. Belah Cebero | 10. Belah Cebero Cik |
| 11. Belah Cebero Kabet | 12. Belah Cebero Serule |
| 13. Belah Cebero Toa | 14. Belah Cik |
| 15. Belah Gading | 16. Belah Genting |
| 17. Belah Gerpa | 18. Belah Gewat |
| 19. Belah Gunung | 20. Belah Gunung Baluen |
| 21. Belah Hakim | 22. Belah Imen |
| 23. Belah Imen Bale | 24. Belah Jalil |
| 25. Belah Jamat | 26. Belah Jongok Batin |
| 27. Belah Jongok Meleum | 28. Belah Kala |
| 29. Belah Kejurun | 30. Belah Kerlang |
| 31. Belah Kute Baru | 32. Belah Kute Koramil |
| 33. Belah Kute Rayang | 34. Belah Kute Robel |
| 35. Belah Lane | 36. Belah Lenang |
| 37. Belah Linge | 38. Belah Linge Kaya |
| 39. Belah Loyang | 40. Belah Lot |
| 41. Belah Lumut | 42. Belah Melala |
| 43. Belah Melala Cik | 44. Belah Melala Kemili |
| 45. Belah Melala Segi | 46. Belah Melala Toa |
| 47. Belah Mude | 48. Belah Mude Baru |
| 49. Belah Mude Tue | 50. Belah Mulik |
| 51. Belah Mungkur | 52. Belah Munte |
| 53. Belah Munte Enam Puluh | 54. Belah Munte Gayo |
| 55. Belah Munte Kaya | 56. Belah Munte Lot |
| 57. Belah Munte Padang | 58. Belah Nalum |
| 59. Belah Nasuh | 60. Belah Owaq |
| 61. Belah Pantang Nangka | 62. Belah Pasir Putih |
| 63. Belah Payung | 64. Belah Penarun |
| 65. Belah Penghulu Bukit | 66. Belah Pertik |
| 67. Belah Riem | 68. Belah Sekinel |
| 69. Belah Setia Reje | 70. Belah Suku |

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 71. Belah Tebe | 72. Belah Tebe Toa |
| 73. Belah Tebe Uken | 74. Belah Tengku Guru |
| 75. Belah Timangan | 76. Belah Tukik |
| 77. Belah Ujung | 78. Belah Uning |

Sumber : Disusun kembali berdasarkan Inventarisasi *Belah* oleh Mahmud Mahrejo, Syaifudin Kadir, dan A.S. Kobat, seperti yang terdapat dalam Mukhlis, *Belah di Masyarakat Gayo : Studi Kasus di Kebayakan*, kertas hasil penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Darussalam, Banda Aceh, 1977, halaman 42 - 3.

JUDUL—JUDUL CERITERA RAKYAT DI ACEH

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Hikayat Pocut Muhammad | 2. Hikayat Malem Dagang |
| 3. Hikayat Prang Sabi | 4. Hikayat Nuo Parisi |
| 5. Hikayat Putroe Gumbak Meuh | 6. Hikayat Bungong Jeumpa |
| 7. Hikayat Banta Beurantah | 8. Hikayat Lahuda Neukom |
| 9. Hikayat Kariman Budi | 10. Hikayat Malem Diwa |
| 11. Hikayat Budiman Asyek | 12. Hikayat Johan Budiman |
| 13. Hikayat Lela Johari | 14. Hikayat Raja Kabarsah |
| 15. Hikayat Kamaruzzaman | 16. Hikayat Jarij |
| 17. Hikayat Rsang Manyang | 18. Hikayat Subab Teukeubo |
| 19. Hikayat Silindong Geulima | 20. Hikayat Putroe Peukeurison |
| 21. Hikayat Kancamara | 22. Kisah Prang Kompeuni |
| 23. Kisah Raja Siujud | 24. Prang Bakongan |
| 25. Kisah Prang Cumpok | 26. Kisah Prang Pandrah |
| 27. Bungong Mawo Deah Baro | 28. Kisah Ie Mbon Cot Uroe |
| 29. Nasib Abeudoraman dan Abeudokade | 30. Keuhendak Illahi |
| 31. Seudeh Derita | 32. Baginda Yahya |
| 33. Abu Nawah | 34. Banta Ali |
| 35. Banta Bakna | 36. Batee Meutangkop |
| 37. Beukeumeunan | 38. Budak Meuseukin |
| 39. Beuseutaman | 40. Kamid Usman |
| 41. Diwa 'Akah | 42. Diwa Sang Syareh |
| 43. Jeumpa Gadeng | 44. Johan Manikam |
| 45. Johan Meusafi | 46. Jugi Tapa |
| 47. Olia Tujoh | 48. Gajah Tujoh Ulee |
| 49. Gumtala Syah | 50. Haba Guda |
| 51. Haba Lahuda Seukeuem | 52. Haba Pak Pande |
| 53. Haba Peudeueng | 54. Haba Peulandok |
| 55. Haba Raja Bajeuén | 56. Haba Ranto |
| 57. Hikayat Diyu Palinggam | 58. Hikayat Jawa |
| 59. Hikayat Leumbe | 60. Hikayat Marakeureuma |
| 61. Hikayat Meudeuhak | 62. Hikayat Pade |
| 63. Hikayat Pha Suasa | 64. Hikayat Pawon |

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 65. Hikayat Peureuleng | 66. Hikayat Peulantasina |
| 67. Hikayat Rubek | 68. Hikayat Symangun |
| 69. Hikayat Simeuseukin | 70. Hikayat Indra Bangsawan |
| 71. Indra Nu'Ade | 72. Indra Nu 'Alam |
| 73. Indra Patra | 74. Masa Jeuet Donya |
| 75. Milon Indra Patra | 76. Hikayat Muhammad 'Adam |
| 77. Hikayat Muhammad .
Hanafiah | 78. Hikayat Nabi Usuh |
| 79. Nalam Syeh Marzuki | 80. Peulandok Pamce |
| 81. Prang Keumala | 82. Prang Kibe |
| 83. Prang Meukek | 84. Prang Raja Bandar |
| 85. Po Jumbhoe | 86. Po di Ahmad |
| 87. Putroe Baren | 88. Hikayat Raja Budak |
| 89. Hikayat Raja Jumjumah | 90. Hikayat Saidina Hamzah |
| 91. Hikayat Seuri Rama | 92. Hikayat Siti Zubaedah |
| 93. Sya'e Adat | 94. Syah Kubat |
| 95. Syam Ngadiman | 96. Baginda Ali |
| 97. Tameh Tujoh Blah | 98. Tameh Hafilin |
| 99. Tambihon Ensan | 100. Tamin Ansa |
| 101. Cita Buhan | 102. Cipe 'Alam |
| 103. Tujoh Kisah | 104. Hikayat Indra Budiman |
| 105. Hikayat Raja Jeumpa | |

Sumber : Disusun antara lain berdasarkan UU Hamidy, *Anzib Lam Nyong : Gudang Karya Sastra Aceh*, Kertas Karya No. 5, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial; Aceh, Darussalam, Banda Aceh, 1974, halaman 18 - 20.

Daftar IV.3.

JENIS-JENIS SENI TARI DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Seni Tari Spesifik Daerah Aceh

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Seudati | 2. Aloe Top Aneuk |
| 3. Grimheng/Pulot | 4. Didong |
| 5. Ratoh Duek | 6. Nasib |
| 7. Ratoh Meuseukat | 8. Kesenian Simeulu |
| 9. Kesenian Singkil | 10. Kesenian Kuacane |
| 11. Tari Pho | 12. Bines Blang |
| 13. Kesenian Leungkop | 14. Rapai Daboh |
| 15. Kesenian Tamiang | 16. Saman |
| 17. Tari Endang | 18. Tari Edok |
| 19. Tari Bungkus | 20. Tari Sinadung |
| 21. Tari Rantah Kudo | 22. Tari Damping |
| 23. Tari Sikambang | 24. Tari Alee Tunjang |
| 25. Tari Siram-Siram | 26. Tari Ranub Lam Puan |

Seni Tari Karya Baru

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Resam Berume | 2. Meusare-sare |
| 3. Panca Utama | 4. Panyot Kulot |
| 5. Bunggong Seulanga | 6. Putri Pukes |
| 7. Kesek-Kesek Uwi | 8. Tari Kesatuan Bangsa |
| 9. Tari Andalas | 10. Tari Putro Ijo |
| 11. Tari Anyung | 12. Tari Belang |
| 13. Tari Bungong Jeumpa | |

Tari Daerah Lain

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Tari Serampang 12 | 2. Tari piring |
| 3. Tari Ketoprak | 4. dan lain-lain. |

Tari Nasional

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Tari Lenso | 2. Tari Pakarena |
|---------------|------------------|

Sumber : *Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*,
Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh,
1972, halaman 25 - 6.

BAB V

HUBUNGAN MIGRASI DAN KEBUDAYAAN

A. ANALISA SAMPLE

1. Identitas responden

a. Asal-usul ethis

Responden dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penduduk setempat (asli) dan pendatang, masing-masing terdiri atas 150 orang, dengan perbandingan yang sama antara yang tinggal di desa (saree) dan kota (Sukaramai). Kelompok penduduk setempat hampir seluruhnya terdiri atas orang Aceh (98,67%), kecuali yang tinggal di kota terdapat orang Gayo dan Aneuk Jamee, masing-masing satu orang. Sedangkan kelompok pendatang terdiri atas orang Jawa (76,67%), Batak (10,67%), Minangkabau (10,00%), serta Bengkulu, Betawi, Ambon, dan Dayak (masing-masing satu orang). Pendatang yang tinggal di Saree, yang menjadi responden dari penelitian ini, seluruhnya terdiri atas orang Jawa. Keragaman asal-usul ethis hanya dijumpai pada responden Sukaramai, namun mayoritasnya juga terdiri atas orang Jawa (53,33%), Batak (21,33%), dan Minangkabau (20,00%), sedangkan lainnya masing-masing hanya terdiri atas satu orang. Penyebaran lebih jelas terlihat pada tabel V.1.

b. Jenis kelamin, umur, dan status perkawinan

Bagian terbesar responden terdiri atas jenis kelamin laki-laki, kecuali 3,67% yang perempuan.

Responden wanita ini terdiri atas empat orang penduduk setempat, dan selebihnya pendatang. Responden wanita yang dijumpai di kota sebanyak enam orang, dan lainnya ada di desa.

Pada tabel V.2. terlihat susunan responden berdasarkan tingkat umur dan status perkawinan. Semua responden berusia 20 tahun ke atas. Namun frekuensi tertinggi terdapat pada kelompok umur 30 - 39 tahun (31,67%). Identitas umur ini terlihat baik pada pendatang maupun penduduk setempat. Jumlah responden yang berusia 60 tahun ke atas relatif kecil (6,33%). Penyebaran lebih terperinci mengenai persentase, jumlah responden

berdasarkan tingkat umur, adalah 21,67% berada pada tingkat umur 20 - 29 tahun, 21,00% pada tingkat umur 40 - 49 tahun, dan 19,33% pada tingkat umur 50 - 59 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata mereka berumur 39,6 tahun (untuk penduduk setempat), 41,8 tahun (untuk penduduk pendatang), dan 40,7 tahun (untuk seluruh responden).

Bagian terbesar (94,67%) dari responden berada dalam status perkawinan. Kebetulan saja, jumlah mereka yang tidak berstatus kawin adalah sama, baik pada penduduk setempat maupun pendatang, yaitu masing-masing delapan orang (5,33%). Kebanyakan mereka yang berstatus tidak kawin berada pada tingkat umur 20 - 29 tahun, yaitu sebanyak 3,67%.

c. Agama dan perkawinan campuran

Ciri umum penyebaran jumlah pemeluk agama di daerah Aceh, kiranya juga terlihat pada identitas responden. Bagian terbesar mereka termasuk pengikut ajaran Islam. Yang tergolong sebagai penganut agama Kristen sebanyak (3,33%), dan semuanya berasal dari kelompok etnis Batak.

Walaupun persentasenya kecil, tetapi pendapat kelompok responden Kristen ini mempunyai arti tersendiri bagi penelitian ini, terutama untuk mempelajari kehidupan beragama di daerah Aceh.

Hal lain yang menarik adalah terdapatnya anggota sample yang berada dalam ikatan perkawinan (13,33%). Di antaranya 9,67% dijumpai di kota, dan selebihnya di desa. Perkawinan campuran yang ditemui di kota umumnya terjadi antara wanita setempat dan laki-laki pendatang. Sebaliknya, di pedesaan perkawinan campuran itu berlangsung antara laki-laki setempat dengan wanita pendatang. Kecuali itu, perkawinan campuran di antara sesama pendatang yang berbeda asal usul etnisnya, juga dijumpai di dalam penelitian ini.

d. Tingkat pendidikan

Penentuan tingkat pendidikan dalam studi ini didasarkan kepada jenis pendidikan formal yang pernah ditempuh/diterima responden. Dalam hal ini tingkat pendidikan tersebut dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu tidak pernah bersekolah, tidak tamat pendidikan dasar, tamat pendidikan dasar, tamat pendidik-

an menengah pertama, tamat pendidikan menengah atas, dan tamat akademi atau pendidikan tinggi lainnya. Bagian terbesar responden, paling tinggi hanya pernah menempuh sampai dengan pendidikan dasar. Yang sempat menempuh pendidikan akademi hanya 4,00%, dan umumnya berasal dari kalangan penduduk setempat (Tabel V.4).

Tingkat pendidikan responden tersebut juga memperlihatkan variasi berdasarkan lokasi penelitiannya. Frekuensi tertinggi dari responden kota pernah menamatkan pendidikan dasar. Sementara itu kebanyakan responden desa hanya pernah menempuh pendidikan dasar, tetapi tidak sampai tamat, dan tingkat buta huruf relatif cukup tinggi (36,65%). Tingkat buta huruf di kota hanya 6,00%. Semua mereka yang pernah menempuh pendidikan akademi atau perguruan tinggi dijumpai di kota.

e. Mata pencaharian hidup

Persentase tertinggi dari responden desa bermata pencaharian hidup sebagai petani, sedangkan responden kota bekerja sebagai pegawai negeri. Jenis mata pencaharian hidup lainnya yang juga tanpa tentara pada responden desa adalah sebagai pedagang. Kenyataan yang hampir sama juga terlihat pada responden kota. Akan tetapi jumlah responden kota yang bekerja pada berbagai bidang mata pencaharian hidup tersebut tampak agak lebih menyebar, di bandingkan dengan responden desa. Perincian yang lebih jelas terlihat pada tabel V.5. Ciri umum dalam mata pencaharian hidup seperti yang disebutkan itu boleh dikatakan dijumpai baik pada penduduk setempat, maupun pendatang.

f. Tempat pemukiman sebelumnya

Responden pendatang, baik yang dijumpai di Saree maupun di Sukaramai, ada yang langsung dari daerah asal-usul ethisnya, dan ada pula yang sudah pernah bermukim di daerah lain. Ini terlihat pada tabel V.6. Berdasarkan tabel itu diketahui, bahwa bagian terbesar (62,67%) responden pendatang di Saree sudah pernah bermukim di daerah lain di Aceh. Kebanyakan mereka adalah bekas-bekas buruh kontrak di masa penjajahan Belanda, yang didatangkan dari pulau Jawa untuk dipekerjakan pada perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan damar di Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Selatan. Pemindahan mereka ke Saree untuk

pertama kali terjadi pada zaman Jepang, tahun 1943 yang terdiri atas mereka yang dijadikan *romusha* (pekerja paksa), dengan tugas untuk menyiapkan kubu-kubu pertahanan dan menanam sayur-sayuran untuk keperluan serdadu Jepang yang tinggal di Seulimeun dan Banda Aceh.

Pemindahan orang Jawa ke Saree yang berikutnya adalah pada masa Agresi Belanda Pertama dan Kedua, yaitu yang terdiri atas mereka yang hidup terlunta-lunta dalam keadaan miskin, lapar, dan penyakitan di beberapa tempat di daerah Aceh. Pemindahan tersebut dilakukan karena mereka dikhawatirkan akan menjadi mata-mata musuh, jika Belanda kembali mendarat di daerah Aceh.

Pemindahan orang Jawa ke Saree yang berikutnya lagi adalah pada permulaan tahun limapuluhan. Kekurangan penduduk pada masa itu merupakan salah satu masalah yang dirasa perlu untuk dipecahkan, bila daerah Saree yang subur itu ingin dimanfaatkan.

Keucik (Kepala Kampung) Saree bersama-sama dengan beberapa orang Jawa di sana ketika itu berusaha mengajak orang Jawa dari tempat lain untuk mau tinggal di Saree. Dalam tahun-tahun tersebut datang orang Jawa dari Lamtamot, Lambaro, dan Seulimeun (Aceh Besar), Padangtiji (Pidie), dan Lhoksukon (Aceh Utara). Kemudian sejak dari tahun 1962, datang pula orang Jawa dari Kisaran (Sumatera Utara), Blang peutek (Pidie), Seumayam dan Seunagan (Aceh Barat), Lhoksukon dan dari Pulau Jawa. Kesuburan tanah dan letak Saree yang relatif mudah dihubungkan dengan tempat-tempat lain, merupakan dua penyebab utama yang menarik baik orang Jawa dari tempat lain untuk pindah ke Saree.

Apa yang dikemukakan di atas kiranya dapat menjadi salah satu alasan, mengapa persentase tertinggi (38,67%) responden pendatang, terutama yang tinggal di desa (62,67%), sudah pernah menetap di tempat lain di Aceh, dan umumnya dari kelompok etnis Jawa. Sedangkan responden kota (38,67%) sebelumnya pernah bermukim di Sumatera Utara. Masa pemukiman mereka di tempat sebelumnya rata-rata 14,50 tahun, dan ini terlihat saling berbeda antara responden kota dan desa, yaitu masing-masing 17,08 tahun dan 11,52 tahun. Dari satu segi, masa pemukiman rata-rata yang paling berbeda tersebut bisa bermakna,

bahwa sifat menetap pada tempat-tempat pemukiman tertentu relatif lebih tinggi pada responden kota.

Tabel V.1.
ASAL USUL ETHIS RESPONDEN
(dalam persentase)

Asal Usul Ethis	Kota	Desa	T o t a l	
			%	N
Penduduk Setempat				
Orang Aceh	48,67	50,00	98,67	148
Orang Gayo	0,67	0,00	0,67	1
Orang Aneuk Jamee	0,66	0,00	0,66	1
T o t a l	50,00	10,00	100,00	150
Penduduk Pendaatang				
Orang Jawa	26,66	50,00	76,66	115
Orang Batak	10,66	0,00	10,66	16
Orang Minangkabau	10,00	0,00	10,00	15
Orang Bengkulu	0,67	0,00	0,67	1
Orang Betawi	0,67	0,00	0,67	1
Orang Ambon	0,67	0,00	0,67	1
Orang Dayak	0,67	0,00	0,67	1
T o t a l	50,00	50,00	100,00	150

Tabel V.2.
TINGKAT UMUR DAN STATUS PERKAWINAN RESPONDEN
 (dalam persentase)

U M U R	Penduduk Asli		Pendatang		T o t a l	
	Kawin	Tidak	Kawin	Tidak	Kawin	Tidak
20 - 29	21,83	87,50	16,80	50,00	19,01	68,75
30 - 39	33,10	12,50	30,99	37,50	32,04	25,00
40 - 49	21,13	0,00	22,54	12,50	21,83	6,25
50 - 59	17,60	0,00	23,24	0,00	20,42	0,00
59	6,34	0,00	7,03	0,00	6,70	0,00
T o t a l %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	(142)	(8)	(142)	(8)	(124)	(16)

Tabel V.3.
JUMLAH ANAK RESPONDEN

Jumlah Anak	Penduduk Asli		Pendatang		T o t a l	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Tidak ada	6,66	4,00	5,33	5,33	6,00	4,67
1 - 2 orang	50,67	24,00	24,34	29,34	37,33	24,66
3 - 4 orang	14,67	25,33	22,67	24,00	18,67	24,67
5 - 6 orang	14,67	26,67	20,00	25,33	17,33	26,00
6 orang	13,33	20,00	28,00	16,00	20,67	18,00
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
T o t a l	75	75	75	75	75	75
M e o n	3,08	4,21	4,35	3,87	3,72	4,04

Tabel V.4.
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN
(dalam persentase)

Tingkat Pendidikan	Penduduk Asli	Pendatang	Total
Tidak pernah sekolah	20,67	22,00	21,33
Tidak tamat SD/Sederajat	14,67	29,33	22,00
Tamat SD/ sederajat	26,67	20,00	23,33
Tamat SMP/ sederajat	12,67	6,67	9,67
Tamat SMA/ sederajat	18,67	20,67	19,67
Tamat Akademi/ Fakultas	6,65	1,33	4,00
T o t a l %	100,00	100,00	100,00
N	150	150	300

Tabel V.5.
MATA PENCAHARIAN HIDUP RESPONDEN
(dalam persentase)

Mata Pencaharian Hidup	Penduduk Asli		Pendatang		T o t a l	
Petani	1,33	70,67	0,00	92,00	0,67	81,33
Pegawai Negeri	48,00	4,00	37,33	1,33	42,67	2,67
Pegawai Swasta	6,67	0,00	5,33	0,00	6,00	0,00
Tukang	6,67	5,33	12,00	1,33	9,33	3,33
Pedagang	20,00	18,67	13,33	2,67	16,67	10,67
Buruh	2,67	0,00	6,67	1,33	4,67	0,67
Anggota ABRI	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
Lain-lain	13,33	1,33	24,01	1,34	18,66	1,33
T o t a l %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	75	75	75	75	150	150

Tabel V.6.

**TEMPAT PEMUKIMAN TERAKHIR RESPONDEN
PENDATANG SEBELUM DI SUKARAMAI
DAN SAREE SERTA LAMA RATA-RATA
MEREKA TINGGAL DI SANA
(dalam persentase)**

Tempat Pemukiman Sebelumnya	Responden Pendatang		Total
	Kota	Desa	
Tempat lain di Aceh	22,55 (n = 11)	8,89 (n = 47)	11,48 (n = 58)
Sumatera Utara	14,14 (n = 29)	11,88 (n = 8)	13,65 (n = 37)
Sumatera Barat	15,44 (n = 9)	0	15,44 (n = 9)
Jawa Barat	13,00 (n = 6)	0	13,00 (n = 6)
Jawa Tengah	21,31 (n = 13)	17,88 (n = 16)	19,42 (n = 29)
Jawa Timur	30,00 (n = 3)	16,25 (n = 4)	22,14 (n = 7)
Maluku	3,00 (n = 1)	0	3,00 (n = 1)
Sumatera Selatan	16,50 (n = 2)	0	16,50 (n = 2)
Irian Jaya	3,00 (n = 1)	0	3,00 (n = 1)
Sample Lama Pemukiman Rata-rata	75 17,08	75 11,52	150 14,50

2. Proses migrasi dan motivasi

a. Sumber informasi

Sumber informasi yang terpenting tentang daerah Aceh buat pertama kali bagi bagian terbesar (72, 67%) responden pendatang adalah kawan terdekat atau famili. Ini terutama berlaku bagi responden yang dijumpai di desa (81, 33%).

Hal ini kiranya sudah dimengerti, antara lain karena tingkat pendidikan kebanyakan mereka relatif rendah. Sedangkan bagi sebagian responden pendatang di kota, guru geografi dan sejarah merupakan sumber informasi pertama (36%). Tak seorangpun dari responden pendatang di desa yang menyebutkan guru geografi dan sejarah sebagai sumber informasi pertama. Namun, bagi sebagian responden pendatang di desa lainnya, petugas pemerintah dan kontraktor merupakan sumber informasi pertamanya (Tabel V.7). Hal ini memberi pertanda, bahwa media massa yang lebih modern, seperti surat kabar dan radio, masih belum berfungsi bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang daerah Aceh, sebelum mereka bermigrasi ke daerah ini.

Tabel V.7.

SUMBER INFORMASI PERTAMA TENTANG DAERAH ACEH BAGI RESPONDEN PENDATANG

Sumber informasi	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Kawan/famili	48	64,00	61	81,33	109	72,67
Guru pelajaran geografi/sejarah	27	36,00	0	0	27	18,00
Pejabat pemerintah	0	0	11	14,67	11	7,33
Kontraktor	0	0	3	4,00	3	2,00
T o t a l	75	100,00	75	100,00	150	100,00

b. Motivasi migrasi

Ketika ditanyakan mengapa mereka bermigrasi ke Aceh, jawabannya tidak banyak menyimpang dari apa yang sudah di-

duga sebelumnya dan dilaporkan oleh banyak peneliti terdahulu, yaitu karena motif ekonomi. Motif ini terutama terdapat pada 46,00% responden pendatang (desa dan kota). Bila dilihat berdasarkan perbedaan daerah penelitiannya, maka motif ekonomi ini relatif banyak ditemui pada responden pendatang di desa dibandingkan dengan kota, yaitu masing-masing 48,00 dan 44,00% (Tabel V.8).

Tabel V.8.

ALASAN RESPONDEN BERMIGRASI KE ACEH

Alasan bermigrasi	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Alasan ekonomi	33	44,00	36	48,00	69	46,00
Ikut orangtua/suami	8	10,67	29	38,67	37	24,67
Dipindahkan oleh Kantor/instansi	28	37,33	1	1,33	29	19,33
Keadaan yang tak menguntungkan di daerah asal	4	5,33	6	8,00	10	6,67
Alasan lainnya	2	2,67	3	4,00	5	3,33
T o t a l	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Alasan lain yang agak menonjol juga pada responden pendatang di kota, adalah karena dipindahkan oleh kantor tempat mereka bekerja. (37,33%). Sedangkan alasan lain yang dikemukakan responden pendatang di desa adalah karena ikut suami/orang tua (38,67%). Ini berarti, bahwa migrasi yang mereka lakukan itu bersifat spontan, bukan lewat program transmigrasi. Mereka yang bermigrasi bersama keluarga sebanyak 50,00% responden pendatang seluruhnya.

Sedangkan transmigrasi biasanya dilakukan secara berkelompok atau berombongan dan mendapatkan biaya serta bimbingan dari pemerintah. Meskipun begitu, dari penelitian ini juga dijumpai sebanyak 12,67% responden yang datang secara berkelompok, namun mereka bukanlah termasuk transmigrasi, seperti yang ditegaskan oleh Pak Kanan, seorang pemuka masyarakat Saree. Sedangkan jumlah mereka yang datang secara perorangan ada

sebanyak 37,33% dari seluruh responden pendatang di Saree (Tabel V.9).

Tabel V.9.

CARA RESPONDEN DATANG KE ACEH

Cara bermigrasi	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Perorangan	46	61,33	10	13,33	56	37,33
Dengan keluarga	26	34,67	49	65,34	75	50,00
Berkelompok	3	4,00	16	21,33	19	12,67
T o t a l	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Bantuan yang mudah diperoleh dari keluarga atau famili yang sudah lebih dahulu bermukim di Aceh merupakan salah satu faktor yang mempermudah atau menarik para pendatang untuk bermigrasi. Faktor ini terutama tampak cukup berpengaruh pada migrasi orang Batak. Ini antara lain dimungkinkan karena hubungan antara migran dengan keluarga yang makin tinggal di daerah asalnya terlihat cukup kuat, seperti yang dijumpai pada sebagian besar (65,33%) responden pendatang (Tabel V.10).

Tabel V.10.

HUBUNGAN RESPONDEN PENDATANG DENGAN KELUARGA DI DAERAH ASAL

Hubungan dengan keluarga	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Masih berhubungan	53	70,67	45	60,00	98	65,33
Tidak lagi berhubungan	22	29,33	30	40,00	52	34,67
T o t a l	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Hubungan yang demikian terutama dijumpai pada responden pendatang di kota. Hal ini mudah dimengerti, karena orang-orang kota relatif lebih banyak yang berpendidikan, sehingga komunikasi melalui surat-menyurat dengan sanak keluarga di daerah asalnya mudah dilaksanakan. Kenyataan lain lagi, adalah lebih dua pertiga (67,33%) responden pendatang pernah membantu anggota keluarga yang datang ke tempat mereka (Tabel. V.11).

Tabel V.11

**KECENDERUNGAN RESPONDEN PENDATANG
UNTUK MEMBANTU MIGRAN LAIN DI ACEH**

Ada / tidak memberi bantuan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ada memberi bantuan	46	61,33	55	73,33	101	67,33
Tidak memberi bantuan	29	38,67	20	26,67	49	32,67
T o t a l	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Adanya bantuan yang demikian, memberikan jaminan untuk bermigrasi ke Aceh. Bantuan yang diberikan biasanya berbentuk penampungan sementara selama masa permulaan mereka bermukim di daerah ini. Bahkan kadang kala bantuan tampungan itu berlangsung sampai mereka berhasil mendapatkan pekerjaan tertentu dan mampu menyewa rumah tempat tinggal sendiri (hasil wawancara dengan seorang informan pangkal di Sukaramai).

Walaupun motif utama bermigrasi ke Aceh adalah bersifat ekonomi, namun ada pula sebagian dari responden pendatang (31,33%) yang ketika penelitian ini dilakukan mengatakan bahwa keadaan status ekonomi tidak mengalami perubahan, dibandingkan dengan ketika masih berada di daerah asalnya. Malah dijumpai pula sebanyak 3,33% keadaan ekonominya menjadi merosot. Namun persentase tertinggi (68,67%) responden pendatang telah berada dalam keadaan status ekonomi yang lebih memuaskan,

dibandingkan dengan keadaan ketika mereka masih berada di daerah asalnya.

Di antara mereka yang mengatakan bahwa keadaan status ekonominya tidak mengalami perubahan, 33,33% masih mengharapkan untuk bisa pindah lagi ke daerah lain (Tabel V.12).

Tabel V.12.

**KEADAAN KEHIDUPAN SEKARANG RESPONDEN
PENDATANG DIBANDINGKAN DENGAN SEBELUMNYA
DAN KECENDERUNGAN MENETAP**

Keadaan kehidupan	Kecenderungan Menetap/Sementara					
	Menetap			Sementara		
	N	%	N	%	N	%
Lebih baik	89	59,33	14	9,33	103	68,66
Sama saja	28	18,67	14	9,33	42	28,00
Lebih jelek	4	2,67	1	0,67	5	3,35
T o t a l	121	80,67	29	19,33	150	100,00

Kalau ditelusuri dari segi jenis pekerjaannya, mereka yang ingin pindah ini umumnya terdiri atas pegawai negeri, dan kebetulan kemungkinan untuk dipindahkan bagi golongan ini adalah relatif besar. Sebaliknya, tidak kurang dari 50,67% responden pendatang yang berkeinginan untuk terus menetap di Aceh, walaupun ketika penelitian ini dilakukan mereka belum memiliki rumah dan tanah pertanian (Tabel V.13). Banyak alasan yang dikemukakan sehu-

Tabel V.13.

**JENIS KEKAYAAN TETAP YANG DIMILIKI
RESPONDEN PENDATANG**

Jenis kekayaan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Rumah	17	22,67	10	13,33	27	18,00
Rumah dan tanah pertanian	15	20,00	32	42,67	47	31,33

Tidak memiliki kekayaan tetap	43	57,33	33	44,00	76	50,67
T o t a l	75	100,00	75	100,00	150	100,00

bungan dengan kecenderungan tersebut. Di antaranya adalah karena mereka telah memperisterikan wanita Aceh, dan sanak famili sudah tidak ada lagi di tempat lain, dan semua keluarga dekatnya sudah menetap di Aceh. Alasan lain, adalah karena untuk menghadapi hari tua kehidupan di Aceh relatif lebih memuaskan, keadaan masyarakatnya relatif baik, dan temannya juga sudah banyak, serta keadaan tanahnya juga cukup subur untuk jenis-jenis tanaman tertentu.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh mereka yang tidak bermaksud untuk terus menetap di daerah Aceh, antara lain adalah karena kemungkinan mendapat tugas baru di tempat lain, ingin mencapai status ekonomi yang lebih tinggi, atau karena ingin kembali ke kampung asalnya di kala masa tuanya.

3. Sikap dan interaksi

Salah satu cara yang bisa dipakai untuk menggambarkan sikap dan interaksi sosial antara penduduk setempat dengan pendatang, adalah dengan jalan membatasi ruang lingkup permasalahannya kepada lingkaran-lingkaran hubungan sosial tertentu. Hubungan sosial demikian lazimnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah hubungan sosial yang mementingkan kebutuhan kehidupan kekerabatan, dan hubungan sosial yang mementingkan kebutuhan hidup setempat Adnan Abdullah, 1976: halaman 20. Melalui hubungan-hubungan sosial demikian akan bisa dipelajari kecenderungan masing-masing pihak untuk saling menerima pihak lainnya, baik sebagai anggota keluarga, teman sekerja, atau tetangga. Kecenderungan itu antara lain meliputi sifat-sifat apa yang dipandang terpuji, sifat apa pula yang tercela, dan bagaimana pola interaksi yang lazim berlangsung dalam hubungan sosial.

Sebagian hasil penelitian ini kiranya bisa mengungkapkan berbagai persoalan yang disebutkan di atas. Tabel V.14. dapat diketahui bahwa hampir seluruh jumlah responden (47,33%) memberikan jawaban, mereka akan bersifat saling menerima pihak lainnya dalam bentuk hubungan apapun. Hanya sebagian kecil

saja (6,67%) dari mereka yang tidak bersedia sama sekali untuk saling menerima pihak lainnya dalam bentuk suami atau isteri, menantu, anggota keluarga, teman sekerja, dan tetangga. Sedangkan jumlah mereka yang dapat menerima pihak lainnya khusus hanya dalam hubungan teman sekerja sebanyak 14,00%, sebagai menantu 11,00% dan sebagai tetangga 10,33%.

Tabel V.14 juga mengungkapkan adanya variasi kecenderungan responden untuk saling menerima anggota kelompok etnis lainnya, berdasarkan perbedaan asal usul dan tempat tinggal mereka. Kecenderungan umum memang terlihat pada setiap kelompok responden untuk menerima pihak lainnya dalam bentuk hubungan apa saja. Namun, kemungkinan menerima dalam bentuk-bentuk hubungan sosial lainnya terlihat ada perbedaan. Baik di kota maupun di desa, kecenderungan menerima anggota kelompok etnis lainnya sebagai tetangga terbatas pada sebagian kecil responden setempat. Sedangkan di kalangan responden pendatang kecenderungan demikian menempati urutan kedua di dalam kategori jawaban mereka, yaitu 24,00% responden pendatang di kota dan 17,33% responden pendatang di desa. Sebaliknya, amat terbatas jumlah responden pendatang yang memperlihatkan kecenderungan menerima penduduk setempat sebagai anggota kerabat mereka.

Tabel V.14.

**KECENDERUNGAN RESPONDEN UNTUK SALING
MENERIMA ANGGOTA KELOMPOK LAINNYA
(dalam persentase)**

Saling menerima sebagai	Penduduk Setempat		Pendatang		Total
	Kota	Desa	Kota	Desa	
Suami/Isteri	1,33	2,67	1,33	2,67	2,00
Menantu	12,00	12,00	9,33	10,67	11,00
Anggota kerabat lainnya	18,67	10,67	2,67	2,67	8,67
Tetangga	0	0	24,00	17,33	10,33
Teman sekerja	12,00	26,67	6,67	10,67	14,00
Apa saja	50,67	34,67	54,67	49,32	47,33

Tidak bersedia sama sekali	5,33	13,32	1,33	6,67	6,67
T o t a l % N	100,00 75	100,00 75	100,00 75	100,00 75	100,00 75

Ketika kepada mereka ditanyakan, bagaimana sikapnya kalau terjadi perkawinan campuran, antara anaknya dengan suku lain, ternyata bahwa sebagian besar (84,33%) dari total responden menyatakan setuju. Hanya 15,67% saja dari mereka yang menginginkan kemurnian sukunya, dan menolak perkawinan campuran bagi anaknya. Sikap menolak terhadap perkawinan campuran demikian relatif lebih banyak terjadi pada penduduk setempat (26,67% di kota dan 21,33% di desa), dibandingkan dengan pendatang (6,67% di kota dan 8,00% di desa). Hal ini terlihat pada Tabel V.15.

Tabel V.15.

**SIKAP RESPONDEN TERHADAP PERKAWINAN
CAMPURAN ANTARA ANAKNYA DENGAN SUKU LAIN
(dalam persentase)**

S i k a p	Penduduk Setempat		Pendatang		Total
	Kota	Desa	Kota	Desa	
Setuju	73,33	78,67	93,33	92,00	84,33
Tidak setuju	26,67	21,33	6,67	8,00	15,67
T o t a l % N	100,00 75	100,00 75	100,00 75	100,00 75	100,00 300

Kecuali itu, dari Tabel V.15 dapat diketahui, bahwa kecenderungan untuk menerima perkawinan campuran di kalangan responden setempat tampak lebih tinggi persentasenya pada mereka yang tinggal di desa dibandingkan dengan yang di kota. Sedangkan dikalangan responden pendatang perbedaan kecenderungan demikian tidak begitu kentara. Ini kiranya cukup menarik

untuk dipelajari secara lebih mendalam, antara lain karena ada hubungannya dengan keadaan keterbukaan sikap. Lazimnya mereka yang tinggal di kota relatif lebih terbuka sikapnya dibandingkan dengan yang tinggal di desa. Kiranya hal ini bisa dipahami kalau dihubungkan dengan hasil penelitian lain yang pernah dilakukan di Saree (Adnan Abdullah, 1976: halaman 21). Salah satu faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap kecenderungan responden setempat untuk menerima perkawinan campuran adalah keadaan status sosial ekonomi orang Jawa (satu-satunya kelompok pendatang di Saree).

Semula diduga, bahwa ada hubungan negatif antara sikap menerima/menolak perkawinan campuran tersebut dengan tingkat pendidikan responden. Tetapi setelah faktor pendidikan dijadikan sebagai variabel kontrak, maka ternyata amat sulit untuk bisa dibuktikan adanya hubungan yang demikian. Sebab, sebagian besar (74,50%) dari responden yang tidak setuju dengan perkawinan campuran itu justru berpendidikan relatif lebih rendah dari sekolah lanjutan tingkat atas.

Perkembangan kebudayaan sesuatu kelompok masyarakat biasanya amat sulit untuk bisa dilepaskan dari berbagai bentuk saling hubungan, baik di antara sesama anggota kelompok maupun dengan anggota kelompok lainnya. Kuatnya saling hubungan di antara sesama anggota kelompok lazimnya akan berkecenderungan untuk mempersulit terjadinya pergeseran dalam pola kebudayaannya. Namun demikian, saling hubungan yang kuat di antara berbagai kelompok, juga belum tentu selamanya bisa merupakan jaminan bagi terjadinya pergeseran tersebut. Akan tetapi, dengan adanya hubungan demikian paling kurang kemungkinan untuk terjadinya pergeseran menjadi lebih terbuka, (Ismael Hussein, 1972: halaman 3).

Terlepas dari bentuk hubungan yang dilakukan dan ada/tidaknya pengaruh terhadap kebudayaan masing-masing kelompok, melalui studi ini diketahui, bahwa antara pendatang dengan penduduk setempat seringkali terjadi hubungan rasial, seperti yang dikemukakan oleh 95,00% responden. Hubungan yang demikian biasanya lebih banyak terdapat pada pendatang (98,67% di kota dan 94,67% di desa) dibandingkan dengan penduduk setempat (97,33% di kota dan 89,33% di desa). Lihat tabel V.18.

Tabel V.18.

**PERGAULAN RESPONDEN DENGAN ANGGOTA
KELOMPOK LAINNYA**
(dalam persentase)

Keadaan Pergaulan	Penduduk Setempat		Pendatang		Total
	Kota	Desa	Kota	Desa	
Sering bergaul	97,33	89,33	98,67	94,67	95,00
Tidak sering bergaul	2,67	10,67	1,33	5,33	5,00
T o t a l %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	75	75	75	75	300

Salah satu akibat keakraban hubungan seperti yang diungkapkan di atas, ialah bahwa pendatang relatif lebih banyak memilih penduduk setempat sebagai teman yang paling akrab di dalam bergaul (45,33% di kota dan 18,67% di desa) dibandingkan dengan pilihan pada sesama pendatang (14,67% di kota dan 18,67% di desa). Sebaliknya, penduduk setempat hampir separoh (45,33% di kota dan 37,33% di desa) memilih teman yang paling akrab untuk bergaul dari kalangannya sendiri. Walaupun demikian, penduduk setempat yang tidak membedakan asal usul kelompok untuk dijadikan teman bergaul, juga relatif tinggi (50,67% di kota dan 54,67% di desa). Ini terlihat dari pilihan mereka terhadap alternatif jawaban terakhir, yaitu lain-lain (Tabel V.19).

Hubungan yang terjadi di dalam pergaulan sehari-hari, baik yang dialami oleh penduduk setempat maupun pendatang, adakalanya menyenangkan mereka, ataupun biasa saja, di samping cukup menjengkelkan. Yang menyatakan bahwa saling hubungan mereka cukup menyenangkan ada sebanyak 27,00% responden. Perasaan demikian terutama terdapat pada pendatang, baik di kota maupun di desa, dan penduduk setempat yang tinggal di desa (Tabel V.16). Penduduk setempat yang bermukim di kota, yaitu sebanyak 86,67%, menganggap bahwa pengalaman hubungan

sosial mereka dengan pendatang adalah biasa saja. Perasaan demikian agak berkurang pada mereka yang tinggal di desa, begitu pula dengan pendatang, baik di kota maupun di desa. Ini kiranya dapat menjadi salah satu alasan mengapa ketegangan, (konflik) sosial di antara mereka tidak sampai terjadi, walaupun unsur-unsur kebudayaannya jelas saling berbeda. Ketiadaan konflik sosial antara pendatang dan penduduk setempat sebetulnya juga sudah seringkali dilaporkan oleh penelitian sebelumnya (Adnan Abdullah, 1976: halaman 59 - 9; dan T. Syamsuddin, 1974: halaman 4).

Tabel V.16.

**KEADAAN HUBUNGAN RESPONDEN DENGAN
ANGGOTA KELOMPOK LAINNYA**
(dalam persentase)

S i k a p	Penduduk Setempat		Pendatang		Total
	Kota	Desa	Kota	Desa	
Menyenangkan	12,00	30,67	34,67	30,67	27,00
Biasa saja	86,67	66,67	65,33	68,00	71,67
Tidak menyenangkan	1,33	2,66	0	1,33	1,33
T o t a l	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
% N	75	75	75	75	300

Baik pendatang maupun penduduk setempat, merupakan pendukung adat-istiadat tertentu. Apabila dua kelompok masyarakat yang mempunyai adat-istiadat yang saling berbeda hidup berdampingan di dalam suatu lokasi yang relatif sama, maka biasanya terhadap adat istiadat yang saling berbeda itu akan terlihat sikap yang berbeda pula. Di satu pihak ada yang tetap ingin mempertahankan adat Istiadatnya sendiri, tanpa mempertimbangkan keadaan lingkungan di mana mereka berada. Di pihak lain, ada pula yang berpendapat, bahwa terhadap adat istiadat yang saling berbeda itu perlu diadakan penyesuaian, sesuai dengan keadaan

lingkungannya. Dari penelitian ini terlihat saling bertolak belakang pendapat antara penduduk setempat dengan pendatang. Pada umumnya responden pendatang cenderung kepada perlunya menyesuaikan adat istiadat tersebut dengan keadaan lingkungan setempat (93,33% di kota dan 77,33% di desa). Menurut mereka, kecenderungan demikian adalah sesuai dengan petuah orang tua-tua dahulu, yaitu "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung", atau "masuk ke kandang kerbau kita menguak, masuk ke kandang kambing kita mengembik".

Namun begitu, di kalangan pendatang terlihat pula kecenderungan untuk tetap mempertahankan adat-istiadatnya sendiri (6,67% di kota dan 22,67% di desa). Sebaliknya, penduduk setempat amat menginginkan agar pendatang perlu menyesuaikan diri dengan adat-istiadat yang berlaku di tempat tinggal bermukim. Dalam hal ini adalah daerah dan adat-istiadat Aceh. Ini merupakan pendapat yang dilahirkan oleh 63,33% responden penduduk setempat. Yang lainnya 36,67% tampaknya tidak memusingkan ada tidaknya penyesuaian adat-istiadat tersebut. Alasan yang mereka kemukakan, adalah unsur-unsur adat-istiadat yang berasal dari pendatang adakalanya juga baik diserap oleh masyarakat setempat, baik secara langsung maupun melalui kontak kebudayaan yang tidak langsung (Tabel V.17).

Tabel V.17.

**SIKAP RESPONDEN TENTANG KEHIDUPAN
ADAT ISTIADAT DALAM HUBUNGAN KEHIDUPAN
BERSAMA SUKU LAIN
(dalam persentase)**

S i k a p	Penduduk setempat		Pendatang		Total
	Kota	Desa	Kota	Desa	
Tetap berpegang dengan adat sendiri	66,67	60,00	6,67	22,67	39,00
Perlu disesuaikan	33,33	40,00	93,33	77,33	61,00
T o t a l %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N	75	75	75	75	300

Dengan sering terjadinya hubungan antara pendatang dan penduduk setempat, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, maka dari masing-masing pihak tentu bisa diharapkan penilaian-penilaian tertentu tentang sifat-sifat khusus yang dimiliki kelompok lainnya, apakah sifat tersebut dipandang baik, atautkah tercela. Salah satu sifat penduduk setempat yang dipandang baik oleh pendatang, seperti yang seringkali muncul dalam jawaban mereka, adalah sopan dan berani. Dalam pandangan penduduk setempat, sifat dan sopan tersebut juga sebetulnya dimiliki sebagian pendatang. Kecuali itu, pada pendatang juga dijumpai sifat-sifat lain, seperti rajin, ramah-tamah, suka membantu, dan jujur, serta suka bergaul. Sifat rajin bekerja, ramah-tamah, suka membantu, dan jujur adalah dimiliki oleh orang Jawa. Sifat yang baik pada orang Batak adalah suka membantu. Sifat baik pada orang Minangkabau jujur adalah dimiliki oleh orang Jawa. Sifat yang baik pada orang Batak adalah suka membantu. Sifat baik pada orang Minangkabau adalah sopan dan pandai bergaul.

Sebaliknya, sifat-sifat yang kurang berkenan menurut pandangan pendatang, yang terdapat pada penduduk setempat, adalah malas bekerja, cepat marah, dan pendendam. Sedangkan sifat yang dipandang kurang baik oleh penduduk setempat, yang terdapat pada orang Batak antara lain kasar, malas, dan cepat marah. Pada orang Minangkabau terdapat sifat yang kurang di senangi, yaitu sulit bisa dipercayai. Sedangkan pada orang Jawa terdapat sifat hemat dan terbatas pergaulannya.

TEMAN RESPONDEN YANG PALING ERAT DALAM PERGAULAN (dalam persentase)

Teman yang paling erat bergaul	Penduduk Setempat		Pendatang		Total
	Kota	Desa	Kota	Desa	
Pendatang	4,00	8,00	14,67	20,00	36,67
Penduduk setempat	45,33	37,33	45,33	18,67	11,67
Lain-lain	50,67	54,67	40,00	61,33	51,67
T o t a l % N	100,00 75	100,00 75	100,00 75	100,00 75	100,00 300

B. PENGARUH MIGRASI TERHADAP KEBUDAYAAN SETEMPAT

Untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh migrasi terhadap kebudayaan setempat, uraian berikut ini akan diarahkan kepada unsur-unsur kebudayaan tertentu, seperti *bahasa, ceritera rakyat peralatan, kesenian, upacara dan adat-kebiasaan*.

1. B a h a s a

Sebagai salah satu unsur kebudayaan, bahasa merupakan peralatan komunikasi terpenting dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Karena itu, di perkirakan unsur kebudayaan ini kerap kali menerima sentuhan unsur-unsur kebudayaan lain. Namun kecenderungan orang unsur kebudayaan lain. Namun kecenderungan orang untuk bertahan dengan bahasa sendiri tetap kuat. Pernyataan tersebut kiranya terlihat pula hasil penelitian ini. Di kalangan penduduk setempat, bahasa Aceh tetap masih memainkan peranan utama, atau dilingkungan sesama kelompok kesukumannya. Yang menggunakan bahasa Aceh dalam pembicaraan dengan sesama anggota keluarga tidak kurang dari 84,00% responden penduduk setempat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam hubungan yang demikian, boleh dikatakan hanya 16,00% (22,67% di kota dan 9,33% di desa). Kecenderungan demikian terlihat nyata pada responden di desa (Tabel V.20). Bisa diduga, bahwa penggunaan bahasa Indonesia di kalangan penduduk setempat lebih terbatas kepada keluarga campuran, walaupun tidak seluruhnya demikian.

Tabel V.20

BAHASA YANG DIPAKAI RESPONDEN SETEMPAT DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

B a h a s a	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Bahasa Aceh	58	77,33	68	90,67	126	84,00
Bahasa Indonesia	17	22,67	7	9,33	24	16,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Pemakaian bahasa Indonesia tampak cukup menonjol kalau mereka berbicara dengan anggota masyarakat dari kelompok etnis lain. Ini berlaku, baik pada responden setempat yang bermukim di desa, maupun di kota. Hanya dalam persentase yang sangat kecil (7,33%) terlihat mereka yang mempergunakan bahasa Aceh. Sebaliknya, di desa terdapat 9,33% responden setempat yang memakai bahasa pendatang, ketidak berbicara dengan mereka (Tabel V.21). Akan tetapi, tidak ada responden setempat yang menggunakan bahasa pendatang kalau berbicara dengan sesama anggota keluarga, walaupun keluarga mereka itu terbentuk atas dasar perkawinan campuran.

Tabel V.21.

**BAHASA YANG DIPAKAI RESPONDEN SETEMPAT
DALAM BERHUBUNGAN DENGAN PENDATANG**

B a h a s a	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Bahasa Aceh	5	6,67	6	8,00	11	7,33
Bahasa Indonesia	70	93,33	62	82,67	132	88,00
Bahasa Pendatang	0	0	7	9,33	7	4,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Sebagian responden setempat (34,00%) menyatakan mampu berbicara dengan salah satu bahasa pendatang, seperti bahasa Minangkabau, Batak, atau Jawa. Kemampuan demikian tampak lebih kentara pada mereka yang bermukim di Barea (Tabel V.22). Kemampuan berbahasa dengan bahasa pendatang pada responden desa terbatas pada bahasa Jawa. Tempat tinggal yang saling berdekatan, dan hubungan sosial sehari-hari yang cukup intensif, kiranya merupakan dua faktor terpenting yang memungkinkan penguasaan bahasa pendatang tersebut.

Tabel V.22.

**KEMAMPUAN RESPONDEN SETEMPAT UNTUK
MEMAKAI BAHASA PENDUDUK PENDATANG**

B a h a s a	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mampu berbahasa penduduk penda- tang	21	28,00	30	40,00	51	34,00
Tidak mampu ber- bahasa penduduk pendatang	54	72,00	45	60,00	99	66,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

2. Ceritera rakyat

Kecuali bahasa, responden setempat juga mengenal bebe-
rapa jenis ceritera rakyat yang berasal dari penduduk pendatang
(12%). Sebagian mereka yang menceritakan kembali kepada
keluarganya (Tabel V.23). Ceritera rakyat yang amat berkesan
pada mereka adalah Sampuraga (Tapanuli), Malinkundang (Mi-
nangkabau), dan Sangkuriang (Jawa Barat). Namun, pengetahuan
tentang ceritera rakyat tersebut masih terbatas pada responden
setempat yang bermukim di kota. Sedangkan responden setempat
yang tinggal di desa, boleh dikatakan tidak mengenal ceritera
tersebut.

Tabel V.23.

**PENGETAHUAN RESPONDEN SETEMPAT TENTANG
CERITERA RAKYAT DARI PENDUDUK PENDATANG**

Pengetahuan tentang Ceritera Rakyat	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Kenal	18	24,00	0	0	18	12,00
Tidak kenal	57	76,00	75	100,00	132	88,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

3. Kesenian

Hal lain lagi yang dikenal responden setempat adalah kesenian rakyat yang berasal dari penduduk pendatang. Tidak kurang dari 32,00% responden setempat kenal kepada kesenian rakyat penduduk pendatang, seperti tari piring, tarik tanduk, kuda kepang, ketoprak, wayang kulit, dan ludruk. Kecuali itu, mereka juga kenal beberapa alat kesenian yang berasal dari penduduk pendatang, seperti salung dan angklung. Kalau dilihat kepada perbedaan lokasi penelitian, pengetahuan mengenai kesenian rakyat penduduk pendatang tersebut terlihat lebih menonjol pada responden setempat yang bermukim di kota (44,00%), dibandingkan dengan di desa (20,00%), seperti yang terlihat pada Tabel V.25.

Tabel V.25.

PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG KESENIAN PENDUDUK PENDATANG

Pengetahuan tentang kesenian Daerah	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Kenal	33	44,00	15	20,00	48	32,00
Tidak kenal	42	56,00	60	80,00	102	68,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Ketimpangan persentase, antara responden setempat di kota dan di desa, antara lain disebabkan pengetahuan mereka tentang kesenian pada umumnya, termasuk kesenian daerah mereka sendiri, saling berbeda. Jumlah responden setempat di desa yang mengenal kesenian rakyat daerahnya sendiri adalah 37,33%, sedangkan di kota 58,67% (Tabel V.24). Itupun terbatas kepada dua jenis kesenian tertentu saja, yaitu *seudati* dan *rapai*. Keragaman pengetahuan mengenai jenis-jenis kesenian daerah tersebut tampak lebih kentara pada responden setempat di kota. Kecuali dua jenis kesenian yang sudah disebutkan itu, responden setempat di kota juga mengenal jenis-jenis kesenian daerah yang lain, seperti *laweuwet*, *daboh*, *seurune kalee*, *ratoh*, dan *alee tunyang*.

Tabel V.24.

**PENGETAHUAN RESPONDEN SETEMPAT TENTANG
KESENIAN DAERAH SENDIRI**

Pengetahuan tentang Kesenian Daerah	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Kenal	44	58,67	28	37,33	72	48,00
Tidak kenal	31	41,33	47	62,67	78	52,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

4. Upacara adat

Pengaruh migrasi yang lain ditemukan juga pada upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan, kelahiran, kematian, kebiasaan dalam bertani, peralatan, dan makanan. Berbagai upacara adat atau kebiasaan tersebut umumnya masih dilaksanakan mengikuti kebiasaan yang berlaku sejak dahulu. Namun, dalam hal-hal tertentu perubahan mulai juga tampak terlihat. Unsur baru yang berkembang pada upacara perkawinan, antara lain terdapat pada pakaian pengantin dan hiasan, ruangan. Kalau dahulu untuk pengantin dikenakan pakaian adat Aceh, dewasa ini ada kalanya dipergunakan jenis-jenis pakaian lain, seperti jas dan sloyor. Untuk menghias ruang pengantin, penggunaan *janur* tampak semakin meluas.

Pada upacara kelahiran, unsur baru yang mulai membudaya pada responden setempat antara lain adalah *marhaban* (semacam zikir) ketika berlangsung upacara turun tanah. Sedangkan pada upacara kematian, pada responden setempat di kota sudah tidak lagi terlihat tahlilan dan kenduri kematian. Menghilangnya unsur kebudayaan tersebut, besar kemungkinan karena daerah sample penelitian ini terpusatkan di wilayah, dimana pengikut aliran Muhammadiyah merupakan mayoritas. Akan tetapi pada responden setempat di desa kedua upacara tersebut masih terlihat, walaupun mulai lemah.

5. Peralatan

Unsur baru lainnya yang juga meluas dipakai dikalangan responden setempat, adalah peralatan rumah tangga, dan makanan. Kebiasaan duduk bersila di tikar sudah banyak ditinggalkan, dan mulai ditukar dengan kursi tamu. Untuk keperluan memasak di dapur orang sudah memakai kompor. Jenis-jenis makanan tertentu, seperti sayur asam, sayur lodeh, sanibal terasi, rendang padang, dan gado-gado, sudah tidak asing pada selera sebagian besar responden setempat (Tabel V.26).

Tabel V.26.

PENGUNAAN PERALATAN ASAL PENDATANG OLEH RESPONDEN SETEMPAT

Keadaan penggunaan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, menggunakan Tidak menggunakan	17	22,67	15	20,00	32	21,33
	58	77,33	60	80,00	118	78,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

6. Kegiatan kemasyarakatan

Pengikut sertaan penduduk pendatang pada upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh responden setempat, atau sebaliknya ikut sertanya responden setempat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh penduduk pendatang, pada dasarnya amat ditentukan oleh hubungan dekat karena tempat tinggal. Tempat tinggal yang saling berdekatan menimbulkan hubungan kerja sama di antara mereka. Di desa sample penelitian misalnya, tanah sawah yang terletak di dalam satu komplek daerah persawahan memberi peluang bagi mereka untuk saling membantu. Bila ada tetangga, walaupun berlainan suku, yang mendapat kemalangan (musibah), mereka datang mengunjunginya untuk melihat atau memberikan bantuan, baik berupa bahan

makanan ataupun uang. Bila ada tetangga yang meresmikan perkawinan atau melahirkan, mereka datang ikut meramaikannya. Hubungan tetangga demikian tampak lebih kentara pada responden di desa, dibandingkan dengan di kota, lebih-lebih di kalangan para wanita. Memang, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan terbatas di kalangan keluarga sendiri, atau tetangga dan kerabat dekat. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan secara lebih luas, penduduk pendatang juga diikuti sertakan (Tabel V.27).

Tabel V.27.

**KEADAAN IKUT SERTA RESPONDEN SETEMPAT
DALAM ORGANISASI BERSAMA DENGAN PENDATANG**

Keadaan ikut serta	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, ikut serta	44	58,67	45	60,00	89	59,33
Tidak ikut serta	31	41,33	30	40,00	61	40,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.28.

**PENGIKUT SERTAAN PENDUDUK PENDATANG
DALAM KEGIATAN RESPONDEN SETEMPAT**

Pengikut sertaan penduduk pendatang	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, ikut serta	55	73,33	67	89,33	122	81,33
Tidak ikut serta	20	26,67	8	10,67	28	18,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.29.
IKUT SERTA RESPONDEN SETEMPAT DALAM
KEGIATAN PENDUDUK PENDATANG

Keadaan ikut serta Tidak ikut serta	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, ikut serta	60	80,00	66	80,00	126	84,00
Tidak ikut serta	15	20,00	9	20,00	24	16,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.30.
UPACARA YANG MASIH DILAKUKAN
RESPONDEN SETEMPAT
(dalam persentase)

Jenis Upacara	Responden yang dilakukan		Total
	Kota	Desa	
Upacara Silkus Hidup	97,33	98,67	98,00
Upacara Siklus Pertanian	0	100,00	50,00
Upacara Bersih Desa	0	0	0
Total Sample	75	75	150

Tabel V.31.

**PENGARUH UNSUR–UNSUR KEBUDAYAAN
PENDATANG PADA UPACARA RESPONDEN SETEMPAT**

Keadaan Pengaruh	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ada pengaruh	67	89,33	8	10,67	75	50,00
Tidak ada pengaruh	8	10,67	67	89,33	75	50,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.32.

**LINGKUNGAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT
OLEH RESPONDEN SETEMPAT**

Lingkungan upacara	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dilingkungan keluarga saja	0	0	7	9,33	7	0
Dilingkungan tetangga dan kerabat dekat	43	57,33	49	65,33	92	61,33
Ikut juga penduduk pendatang	32	42,67	19	52,33	51	34,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

C. ADAPTASI MIGRAN DENGAN KEBUDAYAAN SETEMPAT

Ada keragaman pendapat di kalangan para ahli ilmu-ilmu sosial mengenai proses perubahan yang terjadi pada para migran, akibat kecenderungan mereka untuk bermigrasi. Banyak konsep yang mereka pergunakan untuk menunjukkan proses perubahan yang terjadi itu, seperti adaptasi, "adjustment", akulturasi, asimilasi, dan integrasi. Sebaliknya terlihat pula, bahwa pada konsep yang sama dikaitkan makna yang saling berbeda. Suatu pertemuan yang berlangsung di Havana menghasilkan salah satu rumusan, yaitu bahwa apapun konsep yang dipakai, namun perubahan terpenting terlihat pada proses penyesuaian ekonomi, sosial, dan kebudayaan (Borrie, 1959: halaman 89). Kecuali itu, pertemuan di Havana tersebut juga berkesimpulan, bahwa proses penyesuaian itu perlulah dilihat sebagai sesuatu yang diterima oleh sub-sub kelompok yang telah mengakomodasikan diri, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, dengan pola-pola sosial yang berlaku di kalangan masyarakat setempat (Borrie, 1959: halaman 94), seperti yang terdapat dalam Penporn Tirasawat, 1977: halaman 20).

Seperti apa yang menjadi asumsi studi ini bahwa para migran datang ke suatu wilayah pemukiman dengan disertai pola tingkah laku dan sikap tertentu. Di tempat pemukiman yang baru itu mereka bertemu dengan hal-hal yang baru. Dalam situasi yang demikian para migran umumnya akan sampai kepada pilihan, apakah pola-pola sosial yang mereka miliki akan terus dipertahankan, ataukah akan mengadaptasikan diri dengan pola-pola sosial masyarakat setempat. Bila migran bersifat lebih terbuka terhadap pola-pola sosial setempat, maka proses adaptasi relatif lebih cepat terjadi. Sebaliknya, kalau masyarakat setempat bersikap lebih terbuka, maka pola-pola sosial yang berasal dari migran akan sudah terserap pada mereka. Keterbukaan sikap ini biasanya dipengaruhi oleh pandangan tentang tinggi rendahnya kualitas pola-pola sosial yang saling berbeda itu. Akan tetapi, yang kerap kali terlihat kalau terjadi kontak di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, adalah peminjaman unsur-unsur kebudayaan (Penporn Tirasawat, 1977: halaman 21; Suyatno, 1974: halaman 35).

Kecenderungan untuk meminjam unsur-unsur kebudayaan pendatang oleh penduduk setempat sudah diungkapkan pada uraian sebelumnya. Pada bagian ini akan dikemukakan uraian mengenai adaptasi migran dengan unsur-unsur kebudayaan setempat. Dalam hal ini, proses adaptasi tersebut dibatasi kepada beberapa unsur kebudayaan, seperti *pemakaian bahasa*, pengetahuan mengenai *ceritera rakyat* setempat, *pemakaian peralatan*, *keanggotaan organisasi*, *seni tari*, dan *alat-alat kesenian*, *kegiatan kemasyarakatan*, dan *upacara-upacara adat*. Karena bagian terbesar sample penelitian ini terdiri atas orang Aceh, maka unsur-unsur kebudayaan penduduk setempat yang akan diuraikan berikut ini juga terbatas kepada unsur-unsur kebudayaan Aceh.

1. B a h a s a

Dalam segi kemampuan berbahasa, sebagian (44,67%) responden pendatang masih belum bisa berbahasa Aceh. Kekurang mampuan ini terutama terlihat pada responden pendatang yang bermukim di desa (50,67%). Persentase responden pendatang di kota yang mampu berbahasa Aceh relatif tinggi, yaitu 61,33% (Tabel V.33). Paling kurang ada dua faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dengan bahasa lain. Pertama, intensitas keterlibatan hubungan sosial dengan anggota masyarakat yang saling berlainan bahasa itu. Kedua, melemahnya keterikatan dengan bahasa sendiri. Kalau kedua hal tersebut benar, maka perbedaan di dalam persentase jumlah responden yang mampu berbahasa Aceh, antara kota dan desa, bisa dihubungkan dengan data lain yang akan diungkapkan berikut ini.

Tabel V.33.

KEMAMPUAN RESPONDEN PENDATANG DALAM BERBAHASA ACEH

Keadaan kemam- puan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Bisa berbahasa Aceh	46	61,33	37	49,33	83	55,33

Tidak bisa	29	38,67	38	50,67	67	44,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.34. menunjukkan kecenderungan responden pendatang memakai jenis-jenis bahasa tertentu di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Dari tabel itu terungkap bahwa keadaan keterikatan dengan bahasa sendiri relatif lebih besar pada responden pendatang di desa. Ini ditunjukkan oleh 78,67% responden pendatang di Saree. Sedangkan responden pendatang di kota yang memakai bahasa sendiri di lingkungan keluarganya hanya 9,33%. Persentase tertinggi (88,00%) responden pendatang di kota cenderung memakai bahasa Indonesia. Walaupun jumlah responden pendatang yang berbahasa Aceh dilingkungan keluarga amat terbatas, yaitu 2% untuk total responden, namun kenyataan ini cukup menarik, karena yang berbuat demikian terlihat lebih menonjol pada responden pendatang di kota. Besar kemungkinan hal itu disebabkan karena perkawinan campuran antara perempuan Aceh dengan laki-laki pendatang lebih tinggi di Sukaramai, dibandingkan dengan di Daree.

Tabel V.34

**BAHASA YANG DIPAKAI RESPONDEN PENDATANG
DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**

Bahasa yang dipakai	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Bahasa pendatang	7	9,33	58	78,67	66	44,00
Bahasa Indonesia	66	88,00	15	20,00	81	54,00
Bahasa Aceh	2	2,67	1	1,33	3	2,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Dalam hubungan dengan masyarakat setempat, penggunaan bahasa Indonesia tampak sangat menonjol, baik di kota maupun di desa. Pada kesempatan hubungan demikian, bahasa pendatang hampir tidak berfungsi sama sekali. Bahasa setempat juga dipakai oleh kalangan yang terbatas (6,67% di kota dan 13,33% di desa). Hal ini secara jelas tampak pada tabel V.35. Namun, di desa juga terdapat satu orang responden pendatang yang tetap memakai bahasa sendiri, walaupun ketika sedang berbicara dengan penduduk setempat. Ini dimungkinkan antara lain karena sebagian penduduk setempat ada yang sudah mampu memakai bahasa pendatang. Tetapi jelas, keintiman hubungan sosial orang yang demikian dengan penduduk setempat menjadi amat dibatasi.

Tabel V.35.

**BAHASA YANG DIPAKAI RESPONDEN PENDATANG
DALAM HUBUNGAN DENGAN PENDUDUK SETEMPAT**

Bahasa yang dipakai	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Bahasa pendatang	0	0	1	1,34	1	0,67
Bahasa Indonesia	70	93,33	64	85,33	134	89,33
Bahasa Aceh	5	6,67	10	13,33	15	10,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

2. Ceritera Rakyat

Kemampuan berbicara dengan bahasa lain dapat memperluas cakrawala pengetahuannya. Dengan menguasai bahasa setempat, pendatang akan bisa mengetahui tentang sesuatu ceritera rakyat, misalnya. Akan tetapi, data yang tertera pada Tabel V.36. memperlihatkan bahwa hanya ada 14,67% pendatang yang mengetahui salah satu ceritera rakyat di Aceh, dan pernah menceriterakannya kembali kepada anggota keluarganya. Yang mengetahui dan berbuat demikian, terbatas pada responden pendatang di kota.

Tabel V.36.

**PENGETAHUAN RESPONDEN PENDATANG TENTANG
CERITERA RAKYAT DAERAH SETEMPAT**

Kesenian penge- tahuan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mengetahui dan menceriterakan kepada anggota keluarga	11	14,67	0	0	11	7,33
Tidak mengetahui	64	85,33	75	100,00	139	92,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

3. Peralatan

Keadaan keterikatan dengan apa-apa yang dipunyainya, tampak lebih kuat pada responden di desa. Kecuali dalam pemakaian bahasa dan ceritera rakyat, penggunaan peralatan yang berasal dari masyarakat setempat juga lebih terbatas pada mereka. Responden pendatang di kota yang pernah menggunakan peralatan yang berasal dari latar belakang unsur budaya masyarakat adalah 42,67%, sedangkan di desa 30,67% (Tabel V.37). Jenis peralatan masyarakat setempat yang sering mereka gunakan, antara lain makanan dan alat-alat produksi, terutama dalam bidang pertanian.

Tabel V.37.

**PENGUNAAN PERALATAN MASYARAKAT SETEMPAT
OLEH RESPONDEN PENDATANG**

Keadaan peng- gunaan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mempergunakan	32	52,67	23	30,67	55	36,67
Tidak memper- gunakan	43	57,33	52	69,33	95	63,33
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

4. Kegiatan Organisasi

Akan tetapi, keadaan keterlibatan responden pendatang di Saree dengan masyarakat setempat agak menonjol pada kegiatan yang berbentuk organisasi. Kegiatan organisasi bersama tersebut ada yang berbentuk arisan, gotong-royong, lembaga sosial, pertemuan-pertemuan keagamaan di langgar atau mesjid, ataupun organisasi perkampungan lainnya. Tabel V.38. menunjukkan jumlah responden pendatang, baik di kota maupun di desa, yang ikut terlibat dengan kegiatan organisasi demikian, yaitu masing-masing 66,67 dan 69,33%. Namun, jumlah mereka yang tidak ikut serta di dalam berbagai kegiatan kesatuan hidup bersama itu relatif masih cukup tinggi, yaitu 33,33% di kota dan 30,67% di desa.

Tabel V.38.

IKUT SERTA RESPONDEN PENDATANG DALAM ORGANISASI BERSAMA MASYARAKAT SETEMPAT

Keadaan ikut serta dalam organisasi	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, ikut serta Tidak	50	66,67	52	69,33	102	68,00
	25	33,33	23	30,67	48	32,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

5. Kesenian

Kesenian merupakan salah satu pranata sosial yang bisa memenuhi kebutuhan akan keindahan. Pranata sosial tersebut antara lain berbentuk seni tari dan alat kesenian.

Akan tetapi, bagian terbesar responden pendatang tidak mampu memainkan salah satu bentuk tari yang berasal dari unsur kebudayaan mereka sendiri. Ketidakmampuan itu amat menonjol pada responden pendatang di desa (80,00%), dibandingkan dengan yang di kota (56,00%). Kenyataan yang lebih menonjol lagi adalah pada kemampuan untuk memainkan sesuatu alat kesenian

tertentu, seperti gamelan dan gitar. Tidak kurang dari 88,00% responden pendatang di kota, dan 86,67% di desa, yang mengatakan ketidak mampuannya di dalam bidang kesenian tersebut. Kedua kenyataan itu terlihat pada Tabel V.39 dan V.40. Sebab itu, tidak mengherankan kiranya kalau diantara responden pendatang tersebut yang mampu memainkan kesenian setempat, seperti *rapai*, *seudati*, *tari rahub lampuan*, dan *bungong jeumpa*, tidak lebih dari 8,67%, yaitu 9,33% di kota, dan 8,00% di desa (Tabel V.41).

Tabel V.39.

**KEMAMPUAN RESPONDEN PENDATANG UNTUK
MEMBAWAKAN SENI TARI PENDATANG**

Keadaan kemam- puan dalam seni tari	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, bisa menari	33	44,00	15	20,00	48	32,00
Tidak bisa	42	56,00	60	80,00	102	68,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.40.

**KEMAMPUAN RESPONDEN PENDATANG UNTUK
MEMAINKAN ALAT KESENIAN PENDATANG**

Keadaan kemam- puan dalam alat kesenian	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, bisa memain- kan	9	12,00	10	13,33	19	12,67
Tidak bisa	66	88,00	65	86,67	131	87,33
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.41.

**KEMAMPUAN RESPONDEN PENDATANG UNTUK
MEMBAWAKAN SENI TARI PENDUDUK SETEMPAT**

Ikut sertanya penduduk setempat	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, bisa menari	7	9,33	6	8,00	13	8,67
Tidak bisa	68	90,67	69	92,00	137	91,33
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

6. Kegiatan kemasyarakatan

Walaupun kebanyakan responden pendatang yang menjadi sample penelitian ini tidak mampu memainkan seni tari penduduk setempat, namun penduduk setempat tidak dilupakan apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu. Responden pendatang yang memberikan jawaban demikian adalah sebanyak 27,67%, yaitu 68,00% di kota dan 77,33% di desa (Tabel V.42.). Sebaliknya, 88,00% responden pendatang mengatakan pernah diikuti-sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat setempat (Tabel V.43). Ikut sertanya responden pendatang pada kegiatan masyarakat setempat tersebut tampak lebih menonjol pada mereka yang tinggal di kota (93,33%), dibandingkan dengan di desa (82,67%). Di antara berbagai kegiatan yang dilakukan itu, baik yang diselenggarakan oleh penduduk setempat maupun pendatang, dapat disebutkan seperti upacara perkawinan, kelahiran, khitanan, kematian, dan gotong-royong.

Tabel V.42.

**PENGIKUT SERTAAN PENDUDUK SETEMPAT DALAM
KEGIATAN RESPONDEN PENDATANG**

Ikut sertanya penduduk setempat	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%

Ya, ikut serta	51	68,00	58	77,33	109	72,67
Tidak	24	32,00	17	22,67	41	27,33
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.43.

**IKUT SERTANYA RESPONDEN PENDATANG DALAM
KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT SETEMPAT**

Ikut serta dalam kegiatan penduduk setempat	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ya, ikut serta	70	93,33	62	82,67	132	88,00
Tidak	5	6,67	13	17,33	18	12,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

7. Upacara

Kehidupan manusia pada umumnya amat sulit untuk bisa dipisahkan dari upacara-upacara tertentu, dalam hubungan dengan lingkaran-lingkaran hidup tertentu pula seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kecuali itu, dikenal pula jenis-jenis upacara tertentu dalam kehidupan bertani dan bersih desa. Sebagian upacara itu tampaknya masih tetap dijalankan oleh responden pendatang, terutama yang bermukim di desa (Tabel V.44.). Sesuai dengan lingkungan hidupnya, tak seorang pun responden pendatang di kota yang menyelenggarakan upacara siklus pertanian dan bersih desa. Upacara yang mereka selenggarakan umumnya berkenaan dengan siklus hidup. Tetapi ini berbeda dengan responden pendatang di desa. Pada mereka, yang lebih menonjol bahkan upacara bersih desa dan siklus pertanian. Besar kemungkinan, karena upacara tersebut dilakukan secara bersama-sama berbeda dengan upacara siklus hidup yang diselenggarakan oleh masing-masing pribadi.

Tabel V.44.

**UPACARA YANG MASIH DILAKUKAN
RESPONDEN PENDATANG**
(dalam persentase)

Jenis upacara	Responden yang melaksanakan		Total
	Kota	Desa	
Upacara siklus hidup	92,00	50,67	71,33
Upacara siklus pertanian	0	92,00	40,00
Upacara bersih desa	0	100,00	50,00
Total Sample	75	75	150

Sebagian mereka menganggap bahwa upacara yang diselenggarakan itu, sedikit banyak, sudah menampakkan perubahan, tidak lagi sepenuhnya mengikuti tata cara upacara adat yang sesungguhnya. Ini merupakan pendapat dari 57,33% responden pendatang, baik di kota maupun di desa (Tabel V.45). Namun, hanya 23,33% saja responden pendatang yang berpendapat bahwa perubahan tata cara upacara adat tersebut dikarenakan pengaruh tata cara setempat (Tabel V.46). Yang berpendapat demikian, terutama terdiri atas mereka yang bermukim di kota (33,33%). Namun, tidak kurang dari 72,00% responden pendatang yang mengatakan bahwa pada upacara yang mereka selenggarakan itu masyarakat setempat juga diikuti sertakan, walaupun hanya sebagai tamu atau tetangga (Tabel V.47). Hanya 6,67% saja responden pendatang yang menyelenggarakan upacara adat itu dilingkungan keluarganya saja, dan 21,33% dilingkungan sesama pendatang. Ketika akan menyelenggarakan sesuatu upacara tertentu, sebagian mereka ada yang mendasarkan penetapan harinya menurut perhitungan penanggalan tertentu. Ada yang menggunakan perhitungan (penanggalan yang berasal dari unsur kebudayaan mereka sendiri, ataupun yang berasal dari masyarakat setempat. Kecenderungan untuk menggunakan perhitungan penanggalan ketika hendak menyelenggarakan sesuatu upacara tertentu, tampak masih cukup menonjol pada responden pendatang di desa (86,67%),

dan umumnya (46,67%) menggunakan perhitungan penanggalan mereka sendiri (Tabel V.48). Sedangkan responden pendatang di kota sudah banyak (50,67%) yang meninggalkan sistem penanggalan tersebut, bila hendak menyelenggarakan sesuatu upacara.

Tabel V.45.

KEADAAN PERUBAHAN PADA TATA CARA PELAKSANAAN UPACARA OLEH RESPONDEN PENDATANG

Tata cara pelaksanaan upacara	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Tetap seperti tata cara pendatang Ada perubahan-perubahan tertentu	32	42,67	32	42,67	64	42,67
	43	57,33	43	57,33	86	57,33
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.46.

PENDAPAT RESPONDEN PENDATANG TENTANG ADAT TIDAKNYA PENGARUH SETEMPAT PADA UPACARA ADAT MEREKA

Keadaan pengaruh	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Ada pengaruh	25	33,33	10	13,33	35	23,33
Tidak ada	50	66,67	65	86,67	115	76,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.47.

**LINKUNGAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT OLEH
RESPONDEN PENDATANG**

Lingkungan upacara	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Di lingkungan keluarga saja	3	4,00	7	9,33	10	6,67
Di lingkungan sesama pendatang	21	28,00	11	14,67	32	21,33
Ikut juga anggota masyarakat setempat	51	68,00	57	76,00	108	72,00
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

Tabel V.48.

**PERHITUNGAN PENANGGALAN YANG DIPAKAI
RESPONDEN PENDATANG DALAM MENENTUKAN
HARI BAIK UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA**

Jenis penanggalan	Kota		Desa		Total	
	N	%	N	%	N	%
Tidak memakai penanggalan	38	50,67	12	16,00	50	33,33
Pananggalan pendatang	19	25,33	35	46,67	54	36,00
Penanggalan setempat	3	4,00	18	24,00	21	14,00
Penanggalan setempat/atau pendatang	15	20,00	10	13,33	25	16,67
Total Sample	75	100,00	75	100,00	150	100,00

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada bagian-bagian terdahulu telah dikemukakan berbagai uraian berkenaan dengan sumber daya alam dan manusia, migrasi, perkembangan kebudayaan, dan hubungan migrasi dengan kebudayaan. Dari berbagai uraian itu bisa diperoleh suatu gambaran mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh migrasi terhadap perkembangan kebudayaan daerah di Aceh. Keseluruhan gambaran tersebut pada dasarnya dilandasi oleh asumsi, bahwa setiap migrasi selalu di sertai oleh saling pengaruh di antara berbagai unsur kebudayaan para pendukungnya yang bertemu. Unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran pembahasan studi ini umumnya terbatas kepada apa-apa yang terlihat menonjol pada sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan dan teknologi tradisional, sistem religi dan kepercayaan, sistem kemasyarakatan dan kekerabatan, serta bahasa dan cerita rakyat.

Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup bagian terbesar penduduk di Aceh umumnya ada dalam bidang pertanian, yaitu sebagai petani dan nelayan. Hasil bidang pertanian ini, antara lain adalah padi, kelapa, karet, cengkeh, pala, pinang, tebu, tembakau nilam, randu, dan lada. Sistem penanaman padi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis; penanaman padi di ladang dan penanaman padi di sawah. Sistem penanaman padi di sawah bisa dibedakan lagi menjadi sawah tadah hujan dan sawah yang diairi. Selanjutnya hasil pertanian lainnya terdapat dari usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Berdasarkan sumbernya, sistem pengetahuan pada masyarakat Aceh umumnya dapat dibedakan menjadi pengetahuan tradisional, pengetahuan yang bersumber pada ajaran agama Islam, dan pengetahuan yang berasal dari kebudayaan barat. Pola pengembangan masing-masing jenis sistem pengetahuan tersebut memperlihatkan perbedaan. Sistem pengetahuan tradisional pada dasarnya berkembang melalui cara-cara pengalaman tertentu. Sistem pengetahuan yang berasal dari ajaran agama Islam umumnya berkembang melalui lembaga-lembaga pendidikan dayah dan

madrasah. Sedangkan sistem pengetahuan yang berasal dari kebudayaan barat berkembang melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Dalam bidang teknologi, sistem peralatan mereka amat diwarnai oleh latar belakang kehidupan sebagai petani, dan umumnya lebih bersifat padat karya.

Identitas Aceh terutama dikenal karena keterlibatan bagian terbesar anggota masyarakatnya dengan agama Islam. Keadaan keterlibatan yang demikian, antara lain bersumber pada masa-masa kejayaan pemerintahan kesultanan dahulu. Ketika itu agama Islam menempati kedudukan sebagai agama kerajaan yang dianut secara meluas oleh penduduknya. Namun begitu, desa ini penganut-penganut agama lainnya, seperti Protestan, Katholik, dan Budha, juga di jumpai di daerah Aceh, walaupun penyebarannya hanya terbatas di kalangan penduduk pendatang. Kecuali itu, di hulu sungai Singkil, Aceh Selatan, dijumpai menganut Agama Pambi, umumnya terdiri atas mereka yang berasal dari Dairi Sumatera Utara.

Sistem kemasyarakatan dan kekerabatan yang berkembang di Aceh memperlihatkan variasi berdasarkan asal usul ethisnya. Kesatuan hidup berupa *gampong* dan *mukim* memang dijumpai pada setiap wilayah kemukiman di Aceh. Namun, pada masyarakat Gayo ditemui kesatuan hidup lainnya, yaitu *belah*, pada masyarakat Alas *merga*, dan pada masyarakat Simeulu *Suku*. Garis keturunan ada yang di dasarkan kepada prinsip patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral. Namun, garis keturunan pada masyarakat umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu *wali* dan *kareng*, masing-masing berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah dan garis keturunan dari pihak ibu.

Perbedaan asal-usul ethis juga memperlihatkan variasi dalam segi bahasa yang mereka pakai. Bahasa yang tergolong luas pemakaiannya di kalangan masyarakat setempat antara lain adalah bahasa Aceh, Gayo, Alas, Anuek Jamee, Tamiang, Singkil. Walaupun begitu, unsur-unsur yang paling bersamaan dengan bahasa lain, terutama mengenai bentuk suku kata dan kosa katanya, lazim dijumpai. Kecuali untuk keperluan saling berkomunikasi, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyebar-luaskan kisah-kisah tertentu dalam masyarakat (ceritera rakyat), baik dalam bahasa puisi maupun prosa. Sebab itu, ceritera rakyat di Aceh lazim di bedakan antara hikayat dan *haba jameun*.

Keragaman asal-usul ethis penduduk daerah Aceh erat hubungannya dengan proses migrasi yang pernah berlangsung di masa dahulu. Proses migrasi tersebut berkaitan erat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang pernah terjadi di daerah ini, seperti : pembukaan jaringan transportasi, perkebunan besar, pendidikan sekuler, dan pertambangan. Selama dasawarsa terakhir ini arus migrasi ke Aceh semakin kuat, antara lain karena pembukaan Pelabuhan Bebas Sabang dan Industri pencairan Gas Alam di Lhok Seumawe. Ethis migran yang tergolong tinggi jumlahnya adalah orang Jawa, Batak, Minangkabau, dan Cina. Sebagian mereka bermukim di pedesaan, dan lainnya di kota. Sumber kekayaan alam potensial yang relatif tinggi, persebaran penduduk yang masih jarang, dan tingkat ketrampilan yang masih rendah pada sebagian besar penduduk setempat, diperkirakan merupakan faktor-faktor yang cukup berpengaruh bagi berbagai pendatang tersebut untuk bermigrasi ke Aceh.

Walaupun sebagian migran tersebut relatif sudah cukup lama bermukim di Aceh, namun ciri-ciri khas berbagai unsur kebudayaan mereka masih tetap kentara. Masing-masing kelompok ethis boleh dikatakan tetap merupakan pendukung unsur-unsur kebudayaan mereka sendiri. Namun, perubahan-perubahan pada masing-masing unsur kebudayaan mereka bukan pula tidak terjadi. Perubahan terpenting yang terjadi pada masyarakat setempat, lebih-lebih selama dasawarsa terakhir, adalah pada segi isolasi sikap, yaitu dari sikap mental yang bersifat agak tertutup kepada yang lebih terbuka. Keterbukaan dalam sikap, membuka peluang bagi berbagai macam kesempatan, disamping juga mengundang banyak problema. Kesempatan terpenting, antara lain pengenalan yang lebih meluas terhadap unsur-unsur kebudayaan yang lebih modern, terutama dalam sistem pengetahuan dan teknologi.

Proses perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik pada penduduk setempat maupun pendatang, yang diakibatkan oleh migrasi, dalam segi-segi kehidupan budaya tertentu terlihat berbeda, antara kehidupan di kota dan di desa. Begitu pula, antara penduduk pendatang dan setempat. Saling meminjam unsur-unsur kebudayaan lain terlihat lebih meluas pada responden di kota, dibandingkan dengan di desa. Keadaan keterikatan dengan kelompok ethisnya masing-masing tampak lebih kuat pada responden pendatang di desa. Ini antara lain disebabkan oleh keada-

an tempat pemukiman. Tempat pemukiman responden di desa boleh dikatakan mengelompok berdasarkan asal-usul ethisnya, sehingga kesempatan untuk bertetangga dengan ethis lain menjadi agak terbatas. Sedangkan di kota, masing-masing responden bertetangga dengan berbagai ragam asal-usul ethis. Kecuali itu, keanggotaan organisasi-organisasi kesatuan hidup setempat di kota, lebih meluas, melampaui batas-batas kelompok ethis.

Namun, adanya migrasi jelas saling memperkaya unsur-unsur kebudayaan, baik penduduk setempat maupun pendatang. Sebaliknya, tentu akan ada pula unsur-unsur budaya yang akan menghilang. Salah satu di antaranya yang mulai amat dirisaukan, adalah rendahnya pengetahuan mereka, tentang unsur-unsur kebudayaan tertentu, baik yang berasal dari latar belakang kebudayaan mereka sendiri, apalagi dari latar belakang kebudayaan yang lain. Amat sedikit di antara mereka yang mengenal dan menguasai jenis-jenis kesenian tertentu, walaupun usaha membinanya relatif sudah banyak dilakukan. Usaha terpenting untuk melestarikan unsur-unsur budaya di daerah Aceh bolehlah kiranya disebutkan apa yang dilakukan lewat Pekan Kebudayaan Aceh. Kecuali bisa mengembangkan apresiasi seni budaya, Pekan Kebudayaan Aceh tampaknya juga cukup berhasil memberi peluang bagi pengembangan kultural yang berharga.

B. SARAN – SARAN

Dari sebuah karya penelitian lazimnya tidak hanya di harapkan kesimpulan-kesimpulan tertentu, tetapi juga dituntut kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan, baik untuk lebih mengikatkan perkembangan dan kualitas mengenai apa-apa yang sudah dimiliki, maupun untuk menghindari pengaruh-pengaruh jelek bagi kemungkinan-kemungkinan perkembangan di masa mendatang. Karena itu, adalah wajar kalau pada kesempatan yang terakhir ini akan dikemukakan beberapa saran, yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teoritis dan komparatif, diperkirakan akan bisa memenuhi tuntutan tersebut.

Dengan semakin terbukanya sikap terhadap berbagai perkembangan unsur-unsur budaya yang berasal dari luar, keharusan untuk membina unsur-unsur budaya sendiri semakin Lebih terasakan. Yang terasa amat mendesak dewasa ini adalah usaha untuk

mengadakan pengumpulan, inventarisasi, pemeliharaan, penelitian; penulisan, dan penerbitan berbagai karya budaya yang pernah dihasilkan di Aceh. Selama ini usaha demikian memang mulai dilakukan oleh berbagai lembaga atau organisasi, antara lain Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Namun kelanjutan dan keterarahan berbagai kegiatan tersebut untuk masa-masa mendatang tetap merupakan kebutuhan terpenting.

Keragaman asal-usul etnis kerap kali menimbulkan problema sosial budaya tertentu, walaupun di Aceh hal ini boleh dikatakan jarang terlihat. Namun usaha pembinaan keragaman asal-usul etnis yang sedini mungkin, sebelum problema sosial budaya muncul, tentu akan sangat berguna. Pembinaannya antara lain bisa dilakukan lewat pengembangan sejumlah pengetahuan dasar minimal yang diperlukan. Berdasarkan berbagai penelitian lain, pengetahuan dasar minimal tersebut meliputi pengetahuan tentang ideologi, sejarah nasional, dan sejarah lokal. Selain itu, pada masing-masing anggota kelompok etnis penting pula dikembangkan pengertian tentang bentuk dan susunan masyarakat, fungsi pemerintahan, pengertian tentang pajak dan pengeluaran negara, usaha-usaha sosial budaya yang ada, hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengertian tentang azas, tujuan, dan cara kerja organisasi-organisasi kesatuan hidup setempat.

Untuk lebih mengenal latar belakang kebudayaan masing-masing kelompok etnis di Aceh, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan intensif. Melalui penelitian yang demikian relatif akan lebih besar kemungkinan untuk bisa dihasilkan konsep-konsep tertentu yang berkembang dan dipunyai oleh masing-masing kelompok etnis. Kecuali itu, penelitian mengenai hubungan sosial di antara kelompok atau latar belakang kebudayaan, yang saling berbeda di Aceh. Sejauh mana arus modernisasi dari luar ikut berpengaruh terhadap unsur-unsur kebudayaan daerah di Aceh, merupakan persoalan penelitian lain lagi, yang juga cukup menarik untuk diadakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adnan Abdullah, *Transmigrasi dan Penduduk Setempat di Aceh Suatu Studi Mengenai Hubungan Sosial di antara Mereka*, Proyek Research Departement P & K, Darussalam, 1976.
- Alan Simon, et al, *Social Change and Internal Migration*, International Development Research Center, Attawa, 1977.
- Alfian (Ed.), *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh : Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode "Grounded Research"*, LP2ES, Jakarta, 1977.
- Atjeh *Dalam Angka*, Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1973.
- Atjeh *Membangun*, Pemerintah Daerah Istimewa – Aceh, Kuta-
raja, n.a. Biro Pusat Statistik Indonesia, *Sensus Penduduk 1971, Penduduk D.I. Aceh*, Seri E No. 01, Jakarta, 1974.
- Brody, E. *Behavior in New Environment Adaptation of Migrant Population*, Beverly Hills, Cal., Sage Publication, 1970.
- Castles, Lange, and Alizabeth C. Morris, "Pola Pembangunan Kota di Aceh", Kertas Kerja Prasaran Pada Seminar Pembangunan Wilayah III, Banda Aceh, 21 - 23 Januari 1976.
- Daldjoeni, N. "Pemindahan Penduduk ke Luar Jawa selama 70 tahun", *Kompas*, No. 103, tahun XII, Rabu, 27 Oktober 1976.
- Departemen Perhubungan, Dirjen Parawisata, *Pra-Survey Kepara-
wisataaan, D.I. Aceh*, Buku I dan II, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, 1977.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Ekonomi Pembangunan*, P.T. Pem-
bangunan, Jakarta, 1979.
- Erlich, P.R. and Anne H. *Population Ressources, en vironment
in Human Ecology*, San Fransisco (W.H. Freeman and Co),
1970.
- Germani, G. "Migration and acculturation" *"Handbook for
Social research in Urban Areas*, ed. Philip Hausser (France,
UNESCO 1964).

- Hasjmy, A., "10 tahun Darussalam/Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh" *Sinar Darussalam*, No. 17 September 1969, halaman 16 - 18.
- Hidayat Zaenal Mutakin, *Pembangunan Pertanian dan Masalahnya, Kasus Pada Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara*, Laporan Penelitian, PLPIIS, Aceh, Darussalam, 1977.
- Ibrahim Abdullah, "Pengkajian Singkat Kasus Aceh", Kompas, No. 92 Tahun XIII, 17 Oktober 1977, halaman 13.
- Ibrahim Alfian, Teuku, "Sebuah Studi Pendahuluan tentang Kontak Kebudayaan di ATJEH pada awal abad XX", photo copy, PLPIIS, Aceh, Banda Aceh, nd.
- , "Wijah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Kertas Prasaran pada Seminar Kebudayaan dalam Rangka PKA kedua dan Dies Natalis XI Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 21 - 25 Agustus 1972.
- Ismael Hussain "Hari Depan Kebudayaan Aceh", Bandingan pada Seminar.
- Ismani, "Migran Spontan Orang Batak Toba ke Daerah Kebudayaan Aceh Tenggara", Ringkasan Hasil Penelitian, PLPIIS, Aceh, Banda Aceh 1975.
- Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, *Memorandum Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, A. Muzakir Walah, 1968 - 1978*, Banda Aceh, 1978.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, P.T. Gramedia, Jakarta, 1974.
- Kosinki, L. A., et al., (editor), *People on the Move, Studies on Internal Migration*, Methuen & Co. Ltd. 11 New Fetterlane, London, 1975.
- Kuroda, Toshio, "Internal Migration; an Over New of Problems and Studies", *World Population Conference*, Vol. IV Migration, Urbanization and Economic Development, New York, 1967.
- Lee, Everett, "Internal Migration and Population Redistribution in the United States", in Ronald Preedman (Ed), *Population*

the *Vital Revolution*, Books, Doubleday, Co., Inc. New York, 1966, pp. 123 - 136.

Lembaga Demografi, *Masalah kependudukan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, 1976.

Mukhis, *Belah di Masyarakat Gayo (Studi Kasus di Kebanyakan)* Laporan Penelitian, LPIIS, Aceh, Darussalam, 1977.

Nani Tuloli, *Perubahan Adat Malabit (Perkawinan Levirate) di Pulau Simeulu*, Paloran Penelitian, PLPIIS, Aceh, Darussalam, 1978.

Nathan, K. dan Wijoyo, N., *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1959.

Pasifikus Ahok, "Kembalinya Pnegusaha Tionghoa di Banda Aceh" Ringkasan Hasil Penelitian, PLPIIS, Aceh, Banda Aceh, 1976.

Penporn Tirasawat, *Urbanization and Adjustment in Thailand*, SEAPRAP Research report No. 10, Singapore, 1977.

Piekar, A.J., *Pengetahuan dan Masyarakat*, Orasi Ilmiah, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 1977.

Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, *Seminar Hasil Penelitian Lapangan*, Aceh, Banda Aceh, 1974, 1975, 1976, 1977.

Said, Mohammad, *Djilid Pertama*, diterbitkan oleh pengarang sendiri, Medan, 1961.

Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh, *Beberapa Informasi Mengenai Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, 1977.

Siegel, James T., *The Rope of God*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1968.

Snouck Hurgronje, C., *The Achehnese*, Vol. II, Late E.J. Brill, Leiden, 1906.

Syamsuddin, T., "Orang Minangkabau di Banda Aceh", Ringkasan Hasil Penelitian, PLPIIS, Aceh, Banda Aceh, 1974.

Sunary S. Kanen, *Prospek Penerimaan Daerah Melalui Sektor Kehutanan dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Daerah Istimewa Aceh*, Skripsi, Banda Aceh, 1976.

- Suharso "Transmigrasi dan Latar Belakangnya" *Jurnal Penelitian Sosial*, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, U.I. No. 3 tahun I. Jakarta, 1976.
- Sauvy, Alfred., *General Theory of Population*, Methuen & Co. Ltd., 11 New Fetterlane, London, 1974.
- Thomas, D.S., *Research Memorandum on Migration Differentials*, Sosial Research Council, New York, 1938.
- Transmigrasi, Kanwil Dit. Jen. Prop. Dista, *Laporan Tahunan Tahun 1976/1977*, Banda Aceh, 1977.
- Toshio Kuroda, "Internal Migration : an Overview of Problems and Studies", *World Population Conference*, Vol. IV, Migration, urbanization and economic development New York, 1967.
- Universitas Syiah Kuala, *Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, 1972.
- , *Penelitian Sosial dan Kesehatan Aceh Utara*, Banda Aceh, 1976.
- United Nations, *Report and Selected Papers of the Regional Seminar on Ecological Implication of Rural and Urban Population Growth*, Asian population Studies Series, No. 10, Bangkok, 1971.
- Zaenal Kling, "Migrasi Indonesia ke Malaya Berlangsung sejak tahun 1920", *Kompas*, No. 246, tahun XIII, 8 Mei 1978.
- Zakaria Ahmad, *et al*, *Geografi Budaya Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banda Aceh, 1977.
- Zainuddin, H.M., *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.

---o0o---

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
III. 1. Penduduk yang Pernah Pindah Propinsi Terakhir Sebelum Tinggal di Daerah Istimewa Aceh	25
III. 2. Susunan Penduduk Daerah Aceh, Berdasarkan Suku Bangsa, Tahun 1930	29
V. 1. Asal Usul Ethis Responden	68
V. 2. Tingkat Umur dan Status Perkawinan Responden . .	69
V. 3. Jumlah Anak Responden	69
V. 4. Tingkat Pendidikan Responden	70
V. 5. Mata Pencaharian Hidup Responden	70
V. 6. Tempat Pemukiman Terakhir Responden Pendatang Sebelum di Sukarami dan Saree Serta Lama Rata-rata Mereka Tinggal di Sana	71
V. 7. Sumber Informasi Pertama Tentang Daerah Aceh Bagi Responden Pendatang	72
V. 8. Alasan Responden Bermigrasi ke Aceh	73
V. 9. Cara Responden Datang ke Aceh	74
V.10. Hubungan Responden Pendatang dengan Keluarga di Daerah Asal	74
V.11. Kecenderungan Responden Pendatang Untuk Membantu Migran Lain di Aceh	75
V.12. Keadaan Kehidupan Sekarang Responden Pendatang Dibandingkan dengan Sebelumnya dan Kecenderungan Menetap	

V.13.	Jenis Kekayaan Tetap Yang Dimiliki Responden Pendatang	76
V.14.	Kecenderungan Responden Untuk Saling Menerima Anggota Kelompok Lainnya	78
V.15.	Sikap Responden Terhadap Perkawinan Campuran Antara Anaknya dengan Suku Lain	79
V.16.	Keadaan Hubungan Responden dengan Anggota Kelompok Lainnya	82
V.17.	Sikap Responden Tentang Kehidupan Adat Istiadat dalam Hubungan Kehidupan Bersama Suku lain	83
V.18.	Pergaulan Responden dengan Anggota Kelompok lainnya	81
V.19.	Teman Responden yang Paling Erat Dalam Pergaulan	84
V.20.	Bahasa yang Dipakai Responden Setempat Dalam Lingkungan Keluarga	85
V.21.	Bahasa yang Dipakai Responden Setempat Dalam Berhubungan Dengan Pendatang	86
V.22.	Kemampuan Responden Untuk Memakai Bahasa Penduduk Pendatang	87
V.23.	Pengetahuan Responden Setempat Tentang Ceritera Rakyat dari Penduduk Pendatang	87
V.24.	Pengetahuan Responden Setempat Tentang Kesenian Daerahnya Sendiri	89
V.25.	Pengetahuan Responden Setempat Tentang Kesenian Penduduk Pendatang	88
V.26.	Penggunaan Peralatan Asal Pendatang oleh Responden Setempat	90
V.27.	Keadaan Ikut Serta Responden Setempat Dalam Organisasi Bersama Dengan Pendatang	91
V.28.	Pengikut Sertaan Penduduk Pendatang Dalam Kegiatan Responden	91

V.29.	Ikut Serta Responden Setempat Dalam Kegiatan Penduduk Pendetang	92
V.30.	Upacara yang Masih Dilakukan Responden Setempat	92
V.31.	Pengaruh Unsur-Unsur Kebudayaan Pendatang Pada Upacara Responden Setempat	93
V.32.	Lingkungan Pelaksanaan Upacara Adat oleh Responden Setempat	93
V.33.	Kemampuan Responden Pendatang Dalam Berbahasa Aceh	95
V.34.	Bahasa yang Dipakai Responden Pendatang dalam Lingkungan Keluarga	96
V.35.	Bahasa Yang Dipakai Responden Pendatang Dalam Hubungan Dengan Penduduk Setempat	97
V.36.	Pengetahuan Responden Pendatang Tentang Ceritera Rakyat Daerah Setempat	98
V.37.	Penggunaan Peralatan Masyarakat Setempat oleh Responden Pendatang	98
V.38.	Ikut Serta Responden Pendatang Dalam Organisasi Bersama Masyarakat Setempat	99
V.39.	Kemampuan Responden Pendatang untuk Membawakan Seni Tari Pendatang	100
V.40.	Kemampuan Responden Pendatang Untuk Memainkan Alat Kesenian Pendatang	100
V.41.	Kemampuan Responden Pendatang Untuk Membawakan Seni Tari Penduduk Setempat	101
V.42.	Pengikut Sertaan Penduduk Setempat Dalam Kegiatan Responden Pendatang	101
V.43.	Ikut Sertanya Responden Pendatang dalam Kegiatan Yang Diselenggarakan Masyarakat Setempat	102
V.44.	Upacara Yang Masih Dilakukan Responden Pendatang	103

V.45. Keadaan Perubahan Pada Tata Cara Pelaksanaan oleh Responden Pendatang	104
V.46. Pendapat Responden Pendatang Tentang Ada Tidaknya Pengaruh Setempat Pada Upacara Adat Mereka .	104
V.47. Lingkungan Pelaksanaan Upacara Adat oleh Responden Pendatang	105
V.48. Perhitungan Penanggalan Yang Dipakai Responden Pendatang Dalam Menentukan Hari Baik Untuk Melaksanakan Upacara	105

—oOo—

I N D E K S

adat laot 44
 alee tunjang 88
 aneuk pukat 44
 anggok 43
 are 42
 babah lueng 41
 bale 51
 bansi 55
 belah 53
 blang 51
 blat 49
 bubee 49
 buleuen kanduri apam 51
 — — boh kayee 51
 — — bu 51
 bungka 36
 bungong jeumpa
 catok 49
 ceumeulho 41
 creuh 49
 cupak 42
 haba jameuen 56
 hikayat Rante
 ijon 45
 imuem meusanah 51
 — meuseujid 50
 jaga tulo 41
 jakna niaga 36
 Jak meudagang 36
 Jak seumuga 36
 jalo 44
 jang 49
 janur
 jareng nilon 43
 jeungki 49
 jeureumai 49
 jeulen 53

Landbouwvoorlichtings
 dienst 40
 langai 49
 laweuet 88
 leusong 49
 lham 49
 daboh 88
 dayah 51
 — Baiturrahman 51
 — manyang 51
 eleumee 47,
 — akherat 47
 — burong 47
 — daboh 47
 — jeuheut 47
 — pari 47
 — sandrung 47
 — tuba 47
 gala 43
 gampong 41
 gantang 42
 genap mupakat 52
 geuchik 52
 geudeu-gedeu 55
 geuduembak 55
 geundrang 55
 gisahup 43
 gunca 41, 42
 kai 42
 karong 54
 kenduri alen 40
 — alen pade 41
 — ba bu 51
 — bijeh 41
 — blang 51
 — keumaweuh 41
 — laot 51

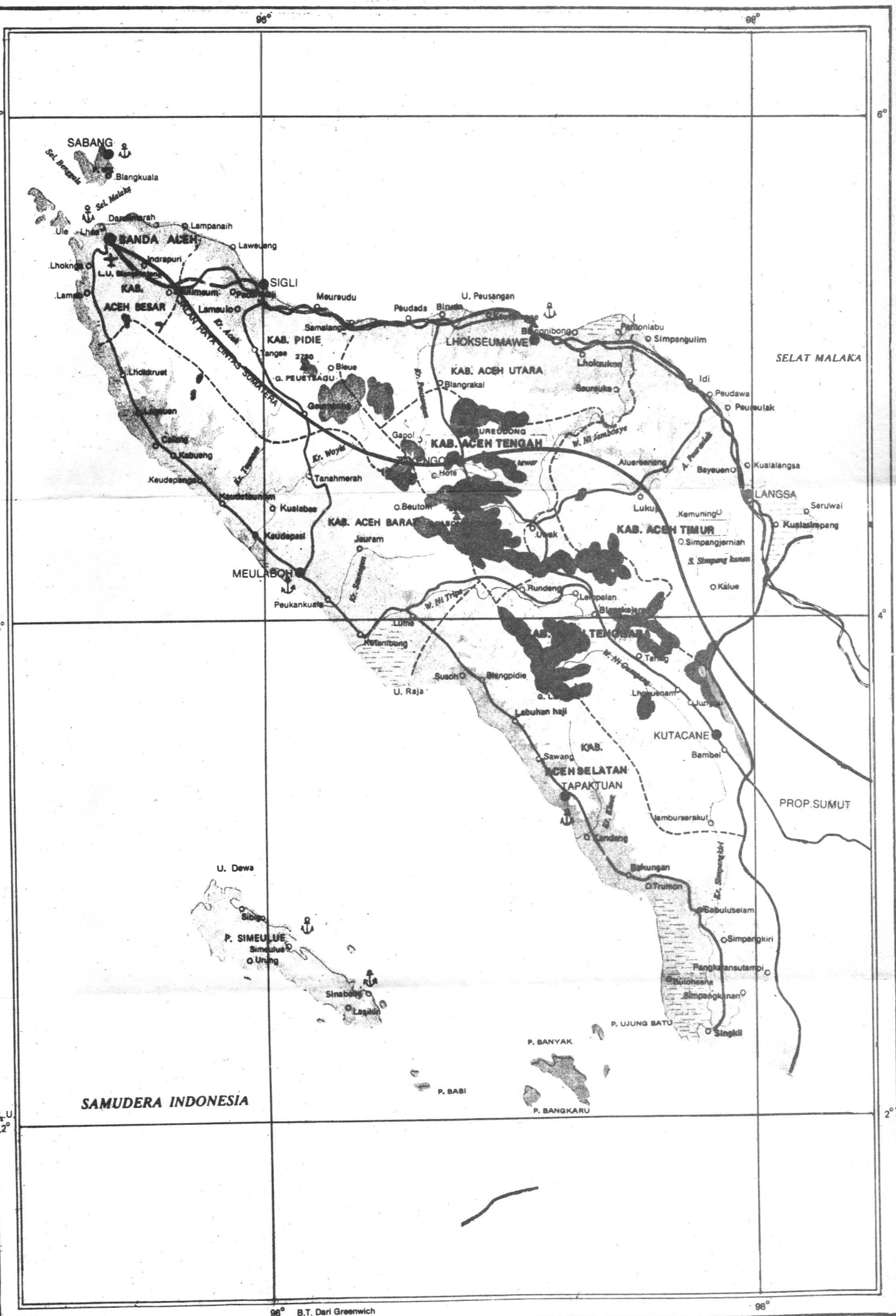
- tob blang 41
- trons blang 41
- tueng pade 41
- tulak bala 51.
- kerje angkap 53
 - ango 53
 - kuso kini 53
- Keujruen Blang 41
- Keumeukoh 41
- koh on 41
- krui pade 41
- kuru 53
- kuryan 42
- lueng 40
- naleh 42
- ndie 42
- nibai 42
- pade bungkuh 40
 - cut 40
 - idang 40
 - inggreh 43
 - jarum mudo 40
 - manyanggu 40
 - rhee 40
 - santan keudah 40
 - sicantek 40
 - sicantek maneh 40
- panglima laot 44
- parang 53
- peugala 43
 - ateueng 43
- peugleh lueng 41
- peulot manok 55
- peumeukleh 54
- peuneurah 53
- peuteungoh bleuet 41
- pupok keubiri 55
 - leumo 55
- pukat 44

- uleebalang 49
- umong 41
- umong ie peuneuk 40
- umong ujeuen 40
- upah 41
- aroe gantoe 45
- marhaban 89
- marjajo 34
- mawah 41
- meusanah 51
- meu'ue 41
- muge 45
- mukim
- rangkang 51
- rahub lam-puan
- rapai 56
- ratoh 88
- romusha

- sadeuep 49
- salueng 55
- sarak opat 52
- sawok 43
- seudati 88
- seulayang tunang 55
- seumula 41
- seumupuhun 41
- seurune kalee 88
- siwa 41
- suku
- tabu bijeh 41
- teumuweuh 41
- peuet 52
- tupeuen 49

- wali 54
- walli 53
- zawiyah 51

DAERAH ISTIMEWA ACEH



Tidak diperdagangkan untuk umum

